



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG
PISAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
STATISTIK DAN KESANDIAN**

Master Plan TIK Kabupaten Pulang Pisau 2019-2023



KATA PENGANTAR
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
STATISTIK DAN KESANDIAN KABUPATEN PULANG PISAU

Puji dan syukur kami panjatkan karena pekerjaan: **“Master Plan TI Kabupaten Pulang Pisau”**, dapat berjalan dengan baik.

Maka bersama ini kami persembahkan hasil kajian dari pekerjaan tersebut di atas berupa :

BUKU MASTER PLAN TI KABUPATEN PULANG PISAU

Penyusunan **Master Plan TI Kabupaten Pulang Pisau** ini pada pokoknya berisi tentang data apa yang akan diambil, kegiatan pelaksanaan pencarian data dan hasil yang diduplikasinya untuk tujuan berikut :

1. Meningkatnya kinerja pemerintahan khususnya Pemerintahan kabupaten Pulang Pisau agar tersusunnya sebuah rencana penerapan Teknologi Informasi (e-Government) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau yang selaras dengan perkembangan dan kebutuhan terkini;
2. Mewujudkan pemerintahan kabupaten pulang pisau yang bersih, transparan, dapat dipertanggung-jawabkan terhadap pengembangan, pemeliharaan dan manajemen Teknologi Informasi dalam rangka mendukung tugas dan fungsi pemerintahan periode tahun 2018 – 2023

3. Membuat standar mutu terhadap layanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi TIK dalam kerangka e-governance penyelenggaraan pemerintahan

Demikian laporan ini kami sampaikan. Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berperan dalam pekerjaan ini.

Pulang Pisau, 20 Mei 2018

Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian

Kepala Dinas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Maksud Dan Tujuan Kegiatan	9
1.3 Informasi Penyelenggaraan Kegiatan dan Landasan Hukum.....	10
1.4 Ruang Lingkup Pekerjaan.....	14
1.5 Manfaat & Keluaran Laporan.....	15
1.6 Metodologi Kegiatan.....	16
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DASAR.....	18
2.1 Internal Organisasi	18
2.2 Eksternal Organisasi.....	33
BAB III KONDISI SAAT INI DAN ANALISA KESENJANGAN	62
BAB IV INISIATIF DAN CETAK BIRU APLIKASI e- GOVERNMENT.....	117
BAB V INISIATIF DAN CETAK BIRU INFRASTRUKTUR e- GOVERNMENT	130
BAB VI INISIATIF DAN CETAK BIRU ORGANISASI dan TATA KELOLA e- GOVERNMENT.....	145
BAB VII INISIATIF DAN CETAK BIRU PENGELOLAAN SDM e- GOVERNMENT.....	155
BAB VIII PETA INISIATIF e-GOVERNMENT	169
BAB IX PENUTUP	170

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pemetaan Proses Bisnis Utama berdasarkan Visi Misi.....	31
Tabel 2. Bidang Pendidikan	36
Tabel 3. Bidang Kesehatan	36
Tabel 4. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	37
Tabel 5. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.....	38
Tabel 6. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan.....	39
Tabel 7. Bidang Sosial.....	39
Tabel 8. Bidang Tenaga Kerja	40
Tabel 9. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41
Tabel 10 Bidang Pangan	43
Tabel 11. Bidang Pertanahan.....	43
Tabel 12. Bidang Lingkungan Hidup	44
Tabel 13. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	46
Tabel 14. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	46
Tabel 15. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	46
Tabel 16. Bidang Perhubungan	47
Tabel 17. Bidang Komunikasi dan Informatika	50
Tabel 18. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	51
Tabel 19. Bidang Penanaman Modal	52
Tabel 20. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	52
Tabel 21. Bidang Statistik.....	53
Tabel 22. Bidang Persandian	53
Tabel 23. Bidang Kebudayaan	53
Tabel 24. Bidang Perpustakaan.....	54
Tabel 25. Bidang Kearsipan	54
Tabel 26. Bidang Kelautan dan Perikanan	56
Tabel 27. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.....	56
Tabel 28. Bidang Pariwisata.....	57

Tabel 29. Bidang Pertanian.....	57
Tabel 30. Bidang Kehutanan	59
Tabel 31. Bidang Perdagangan	59
Tabel 32. Bidang Perindustrian	61
Tabel 33. Bidang Transmigrasi	61
Tabel 34. Aplikasi dan Personel tiap SKPD.....	62
Tabel 35. Kebutuhan Aplikasi di Kabupaten Pulang Pisau	65
Tabel 36. Daftar Aplikasi yang Ada dan Dibutuhkan Kecamatan	69
Tabel 37. Aplikasi yang Ada dan Dibutuhkan Kelurahan	70
Tabel 38. DAFTAR BTS DI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2017	75
Tabel 39. DAFTAR BTS PER KECAMATAN DI KABUPATEN PULANG PISAU	78
Tabel 40. Dukungan infrastruktur TI Eksisting	86
Tabel 41. Tugas dan Fungsi DISKOMINFO, Statistik dan Persandian	95
Tabel 42. Teknologi Jaringan komputer	131
Tabel 43. Teknologi Target dan Emerging.....	133
Tabel 44. Ringkasan Inisiatif Infrastruktur TI.....	143
Tabel 45. Area perbaikan aspek kelembagaan dan SDM TIK.....	152
Tabel 46. Program/proyek terkait Kelembagaan	154
Tabel 47. Pengelompokan SDM TIK.....	156
Tabel 48. Pemetaan Kebutuhan SDM TIK	159
Tabel 49. Kebutuhan Pelatihan	160
Tabel 50. Area perbaikan aspek kelembagaan dan SDM TIK.....	163
Tabel 51. Program/Proyek Terkait Kelembagaan	164
Tabel 52. Program/Proyek terkait SDM SI.....	164

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kebutuhan Aplikasi 2018-2023.....	73
Gambar 2. Jaringan yang terpasang di Kabupaten Pulang Pisau.....	83
Gambar 3. Topologi Jaringan ICON+ Kabupaten Pulang Pisau	84
Gambar 4. Struktur Organisasi DISKOMINFO, Stastistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau	95
Gambar 5. Tujuan Implementasi Tata Kelola TI menurut COBIT 5	107
Gambar 6. Pemisahan Domain pada COBIT 5	107
Gambar 7. Proses-Proses TI Berdasarkan COBIT 5.....	108
Gambar 8. Panduan Tata-Kelola TIK Nasional 2007	109
Gambar 9. Inisiatif Tiga Portal	121
Gambar 10. Skema Fungsi GSB dan ETL.....	123
Gambar 11. Skema Fungsi Datamart dan Data Warehouse	124
Gambar 12. Skema Fungsi GRC	127
Gambar 13. Rancangan Data Center.....	137
Gambar 14. Model Tata-Kelola TIK Nasional	150
Gambar 15. Peta Alur Lengkap.....	170

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan global, teknologi, dan IPTEK merupakan instrument penting bagi penggerak ekonomi bangsa untuk menghadapi perkembangan pasar bebas. Dalam hal ini, TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) mempunyai peran besar dalam membangun kekuatan ekonomi, intelektual, dan sosial. Beberapa negara telah melakukan investasi sumber daya untuk infrastruktur TIK demi meningkatkan kinerja perekonomian termasuk Indonesia, yang menempatkan TIK sebagai sektor yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing bangsa. Pemerintah kabupaten sebagai salah satu ujung tombak layanan yang turut menentukan iklim investasi sudah barang tentu harus ikut berbenah meningkatkan kualitas layanan.

E-Government intinya adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Didalamnya ada dua hal utama dalam pengertian e-government di atas yaitu penggunaan TI sebagai alat bantu dan pemanfaatannya menjadikan pelayanan pemerintahan berjalan lebih efisien. Pengembangan e-Government dilakukan agar penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi yang mencakup aktivitas-aktivitas yang berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis.

Pemerintah pusat mengharapkan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di kabupaten menjadi lebih terarah dan terintegrasi. Oleh karenanya dibuatlah Masterplan Pengelolaan TIK yang bertujuan agar kebijakan pengembangan e-Government dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu. Dikarenakan pentingnya peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Republik Indonesia telah menyusun Rencana Induk strategis penerapan TIK untuk dunia pemerintahan melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Induk dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

Pemanfaatan TIK dalam kerangka e-Government berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 paling tidak mencakup dua aktivitas mendasar yakni:

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dituangkan dalam Masterplan Pengelolaan TIK digunakan sebagai pedoman pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK baik oleh pemangku kepentingan maupun aktor pelaksana serta evaluator di pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Dokumen Masterplan ini dibuat sebagai acuan untuk memberikan gambaran dan arahan bagi pengelola sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka mensukseskan implementasi e-Government di kabupaten tersebut.. Kondisi sumber daya TIK yang ada saat ini perlu ditelaah untuk kemudian dibandingkan dengan

hasil analisis kebutuhan masa datang. Kesenjangan yang dihasilkan perlu diisi secara bertahap sesuai dengan anggaran dan kurun waktu yang ditentukan. Adanya dokumen Masterplan Pengelolaan TIK diharapkan dapat mengurangi resiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan sistem informasi sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari.

1.2 Maksud Dan Tujuan Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melakukan penyelarasan rencana strategis di bidang pengembangan Teknologi Informasi (e-Government) dan menyusun kembali masterplan penerapannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Adapun tujuan yang diharapkan dapat dicapai meliputi:

4. Meningkatnya kinerja pemerintahan khususnya Pemerintahan kabupaten Pulang Pisau agar tersusunnya sebuah rencana penerapan Teknologi Informasi (e-Government) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau yang selaras dengan perkembangan dan kebutuhan terkini;
5. Mewujudkan pemerintahan kabupaten pulang pisau yang bersih, transparan, dapat dipertanggung-jawabkan terhadap pengembangan, pemeliharaan dan manajemen Teknologi Informasi dalam rangka mendukung tugas dan fungsi pemerintahan periode tahun 2018 – 2023
6. Membuat standar mutu terhadap layanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi TIK dalam kerangka e-governance penyelenggaraan pemerintahan

1.3 Informasi Penyelenggaraan Kegiatan dan Landasan Hukum

Pemegang mata anggaran pada pekerjaan ini adalah Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pulang Pisau.

Perundangan dan peraturan yang menjadi landasan hukum meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HaKI.
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Maret 2008), Pengaturan Mengenai Pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di Tingkat Nasional.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten Sebagai Daerah Otonom
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
13. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003, tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia.
14. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006, tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.
15. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi.
16. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2001, tentang Penggunaan Komputer dengan Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia.
17. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001, tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika.
18. Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional e-Government.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992, tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri (SIMDAGRI).
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah.
21. Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga, Kominfo 2003
22. Cetak Biru (Blueprint) Sistem Aplikasi e-Government Bagi Lembaga Pemerintah Daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika, 2005.
23. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah.

24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
27. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
29. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

30. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 31. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 32. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 36. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
-

Nomor 4815) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

1.4 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup dari pekerjaan penyusunan Masterplan Pengelolaan TIK adalah:

1. Lingkup Studi kajian bisnis Sebagai obyek dari kajian bisnis ini adalah penyusunan dokumen Perencanaan Review Dokumen Masterplan TIK Kabupaten Pulang Pisau.
2. Lingkup Substansi dan Kegiatan

- a) Survey market berupa pengumpulan info mengenai network provider existing yang sudah ada di Kabupaten Pulang Pisau
- b) Survey kondisi umum wilayah meliputi:
 - 1. Data administrasi area kelurahan, kecamatan dan kota.
 - 2. Kondisi ekonomi
 - 3. Data-data demografis,
 - 4. Sosial Budaya
- c) Analisa pricing layanan sewa infrastruktur dari provider existing yang berlaku saat ini di daerah Pulang Pisau
- d) Pembuatan prosedur layanan sewa menyewa infrastruktur pita lebar
- e) Pembuatan *draft* rancangan perda kerjasama pemanfaatan infrastruktur pita lebar
- f) Menyusun Roadmap Pengembangan dan Tata kelola TIK yang ideal yang sesuai dengan sumber daya yang ada di Kabupaten Pulang Pisau

3. Rekomendasi

Usulan atas langkah-langkah yang harus segera dilakukan pemerintah daerah dalam pelaksanaan e-Government, dilihat dalam berbagai aspek seperti bidang Kebijakan, Kelembagaan, Perencanaan, Infrastruktur, Aplikasi dan SDM.

1.5 Manfaat & Keluaran Laporan

- 1. Dokumen IT Asessment - Proses bisnis - Aplikasi TI - Infrastruktur TI - Manajemen organisasi TI
- 2. Dokumen IT Masterplan dan Roadmap - Rancangan pemodelan informasi yang dituju oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
 - a. Rancangan sistem informasi yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sampai 5 tahun mendatang;

- b. Rancangan infrastruktur yang akan dikembangkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau
- c. Manajemen dan organisasi TI di daerah Kabupaten Pulang Pisau
- d. Dokumen Peta Jalan (*Roadmap*) Teknologi Informasi Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau periode 2018 – 2023.

1.6 Metodologi Kegiatan

Pekerjaan dilaksanakan melalui pendekatan survey, kemudian hasil survey akan dilakukan analisis sebagai bahan pembuatan perencanaan. Tahapan pekerjaan tersebut adalah :

a. Tahapan Persiapan

Tahapan ini adalah tahapan untuk mempersiapkan segala sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan antara lain mobilisasi peralatan dan perlengkapan kerja, perancangan jadwal kerja dan koordinasi awal dengan instansi terkait.

b. Tahapan Survey

Survey meliputi pengumpulan data primer maupun sekunder. Rencana obyek survey antara lain:

1. Pengumpulan regulasi yang berkaitan TIK.
2. Survey kondisi fisik Kabupaten Pulang Pisau meliputi : batas wilayah, topografi, kemiringan, hidrologi, landuse dan sebagainya;
3. Survey kondisi kependudukan, perkembangan ekonomi dan keadaan sosial budaya penduduk Kabupaten Pulang Pisau;
4. Survey kondisi dan zonasi wilayah Kabupaten Pulang Pisau (wilayah pertokoan, perkantoran, perumahan, dan lain-lain).
5. Dan lain-lain yang mendukung.

c. Tahapan Analisis

Tahapan ini merupakan tahapan analisis terhadap hasil survey yang sudah dilaksanakan. Analisa tersebut meliputi :

1. Melakukan asesmen terhadap kondisi TI saat ini Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau
2. Melakukan kajian terhadap kondisi ideal pemanfaatan TI di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau
3. Gap analisis, yaitu mengukur kesenjangan antara asesmen kondisi saat ini terhadap kondisi ideal
4. Menyusun Dokumen Peta Jalan (*Roadmap*) Teknologi Informasi Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau periode 2018 - 2023

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN DASAR

1.1 Internal Organisasi

Organisasi yang mendukung terlaksananya e-government dengan optimal harus berada pada dua bagian, yaitu regulator dan operasional. Struktur organisasi juga harus dapat bereaksi dengan cepat terhadap kondisi-kondisi yang telah diprediksi maupun kondisi-kondisi yang insidental. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Memilih kepala daerah secara langsung merupakan satu dari delapan hak yang dimiliki daerah. Pasal. 21 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan adanya delapan hak yang dimiliki daerah dalam menyelenggarakan otonomi yaitu:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerinahannya.
2. Memilih pimpinan daerah
3. Mengelola aparatur daerah
4. Mengelola kekayaan daerah
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah Pulang Pisau.
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

2.1.1 Isu Strategis Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/ keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Identifikasi isu-isu strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang menjadi fokus dan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Isu-isu strategis ini mempunyai pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap **visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota sekitar** agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Sumber lain bagi informasi atau isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran

pembangunan jangka menengah juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Penentuan data atau informasi menjadi isu strategis sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

2.1.2 RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Periode 2013 – 2018

Visi

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau periode 2013-2018 memiliki visi:

TERWUJUDNYA MASYARAKAT PULANG PISAU YANG DAMAI, MAJU, BERKEADILAN, DAN SEJAHTERA

Secara spesifik penjelasan rumusan visi tersebut yaitu:

1. Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau yang **Damai**, yang dimaksud adalah kondisi Kabupaten Pulang Pisau yang dapat menjamin rasa aman masyarakat dan dunia usaha yang ditandai dengan terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat didukung oleh peningkatan mutu pengelola pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai modal dasar untuk pembangunan berkelanjutan.
2. Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau yang **Maju**, yang dimaksud adalah kondisi Kabupaten Pulang Pisau yang masyarakatnya semakin

meningkat kualitas sumber dayanya dan hasil-hasil pembangunan ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3. Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau yang **Berkeadilan**, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau tanpa memihak kepada perorangan, golongan atau wilayah tertentu dapat secara nyata menikmati pemerataan dari seluruh bidang pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau dengan sumber pendanaannya baik melalui APBD maupun APBN.
4. Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau yang **Sejahtera**, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang mampu bekerja dan memperoleh pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar, meliputi sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan secara layak dan memadai.

Misi

Misi yang dinyatakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau periode 2013-2018 untuk mewujudkan visi yang akan dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Adapun rumusan misi untuk memberikan kerangka, sasaran, dan arah kebijakan yang akan dicapai serta strategi yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi:

1. Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan.
4. Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri.
5. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

6. Mewujudkan aparaturnya pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (*Good and Clean Governance*).
7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan.

Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka akan diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan yang ingin dicapai akan dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2022, sebagai berikut:

Tujuan 1: Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta pemukiman yang mematuhi tataruang

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut adalah:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah
- b. Pembangunan wilayah pemukiman
- c. Menjaga kesesuaian pembangunan dengan tata ruang

Tujuan 2: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- b. Meningkatnya melek huruf di masyarakat
- c. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan
- d. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Meningkatnya Usia harapan Hidup

- f. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana
- g. Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat

Tujuan 3: Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatnya pendapatan masyarakat
- b. Meningkatnya UMKM
- c. Meningkatnya koperasi aktif
- d. Menurunnya angka kemiskinan
- e. Menurunnya tingkat pengangguran
- f. Meningkatnya penanaman modal

Tujuan 4 : Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustry

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut adalah:

- a. Berkembangnya agroindustry
- b. Meningkatnya produktifitas pertanian

Tujuan 5: Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
- b. Kualitas lingkungan hidup meningkat

Tujuan 6: Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara transparan, profesional, dan akuntabel

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
- b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- c. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah

Tujuan 7: Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial budaya, dan organisasi pemuda dalam membangun daerah

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
- b. Meningkatnya pemberdayaan di bidang agama

- c. Meningkatnya kesetaraan gender
- d. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal

2.1.3 Organisasi dan Proses Bisnis

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan poin-poin penting dari arahan strategis Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan poin-poin penting dari arahan strategis Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau baik yang bersumber dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Arahan strategis tersebut kemudian dieksekusi atau dioperasionalisasikan melalui Organisasi Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau dan proses bisnis yang dilakukannya. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hal-hal penting terkait organisasi Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau saat ini serta proses bisnis utama yang dijalankan saat ini.

I. SEKRETARIAT:

- A. Sekretariat Daerah
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Staff Ahli;
 - d. Bagian Umum.
- B. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - a. Bagian Umum;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Bagian Persidangan dan Risalah;
 - d. Bagian Perundangan-undangan;
 - e. Bagian Keuangan.

II. DINAS dalam Pemerintan Kabupaten Pulang Pisau:

- a. Dinas Pendidikan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;

- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- d. Dinas Lingkungan Hidup Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- e. Dinas Pertanian Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- f. Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- h. Dinas Perhubungan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- k. Dinas Ketahanan Pangan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- l. Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- m. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- n. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- o. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- q. Dinas Perikanan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- r. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- s. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;

- u. Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau.

III. BADAN dalam Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau

- a. Inspektorat;
- b. Bagian Ekonomi dan Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Bagian Hukum dan HAM Setda Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- d. Bagian Humas dan Protokol Setda Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- e. Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- f. Bagian Keuangan Setda Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- g. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- h. Bagian Perlengkapan Setda Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- i. Bagian Sumber Daya Alam Setda Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- j. Bagian Tata Pemerintahan Setda Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- k. Bagian Umum Setda Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
- l. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- m. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset;
- n. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.

IV. KECAMATAN

1. Kecamatan Banama Tingang

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Banama Tingang di Kota/Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng):

- Kelurahan/Desa Bawan (Kodepos : 74863)
- Kelurahan/Desa Guha (Kodepos : 74863)
- Kelurahan/Desa Hanua (Kodepos : 74863)
- Kelurahan/Desa Hurung (Kodepos : 74863)
- Kelurahan/Desa Kasali Baru (Kodepos : 74863)
- Kelurahan/Desa Lawang Uru (Kodepos : 74863)
- Kelurahan/Desa Manen Kaleka (Kodepos : 74863)
- Kelurahan/Desa Manen Paduran (Kodepos : 74863)
- Kelurahan/Desa Pahawan (Kodepos : 74863)
- Kelurahan/Desa Pandawei (Kodepos : 74863)
- Kelurahan/Desa Pangi (Kodepos : 74863)
- Kelurahan/Desa Ramang (Kodepos : 74863)
- Kelurahan/Desa Tambak (Kodepos : 74863)
- Kelurahan/Desa Tangkahen (Kodepos : 74863)
- Kelurahan/Desa Tumbang Tarusan (Kodepos : 74863)

2. Kecamatan Jabiren Raya

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Jabiren Raya di Kota/Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng):

- Kelurahan/Desa Garung (Garong) (Kodepos : 74816)
- Kelurahan/Desa Henda (Kodepos : 74816)
- Kelurahan/Desa Jabiren (Kodepos : 74816)
- Kelurahan/Desa Pilang (Kodepos : 74816)
- Kelurahan/Desa Saka Kajang (Kodepos : 74816)
- Kelurahan/Desa Simpur (Kodepos : 74816)
- Kelurahan/Desa Tanjung Taruna (Kodepos : 74816)

- Kelurahan/Desa Tumbang Nusa (Kodepos : 74816)

3. Kecamatan Kahayan Hilir

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kahayan Hilir di Kota/Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng):

- Kelurahan/Desa Pulang Pisau (Kodepos : 74811)
- Kelurahan/Desa Gohong (Kodepos : 74812)
- Kelurahan/Desa Kalawa (Kodepos : 74812)
- Kelurahan/Desa Anjir Pulang Pisau (Kodepos : 74813)
- Kelurahan/Desa Mintin (Kodepos : 74816)
- Kelurahan/Desa Buntoi (Kodepos : 74861)
- Kelurahan/Desa Mantaren I (Kodepos : 74861)
- Kelurahan/Desa Mantaren II (Kodepos : 74861)

4. Kecamatan Kahayan Kuala

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kahayan Kuala di Kota/Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng):

- Kelurahan/Desa Bahaur Hilir (Kodepos : 74872)
- Kelurahan/Desa Bahaur Hulu (Kodepos : 74872)
- Kelurahan/Desa Bahaur Tengah (Kodepos : 74872)
- Kelurahan/Desa Camatan (Cematan) (Kodepos : 74872)
- Kelurahan/Desa Kiapak (Kodepos : 74872)
- Kelurahan/Desa Sei/Sungai Barunai (Papuyu II) (Kodepos : 74872)
- Kelurahan/Desa Sei/Sungai Pasanan (Papuyu I) (Kodepos : 74872)
- Kelurahan/Desa Sei/Sungai Pudak (Papuyu III) (Kodepos : 74872)
- Kelurahan/Desa Sei/Sungai Rungun (Kodepos : 74872)
- Kelurahan/Desa Tanjung Perawan (Kodepos : 74872)

5. Kecamatan Kahayan Tengah

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kahayan Tengah di Kota/Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng):

- Kelurahan/Desa Bahu Palawa (Kodepos : 74862)
- Kelurahan/Desa Balukun (Kodepos : 74862)
- Kelurahan/Desa Bareng Rambang (Kodepos : 74862)
- Kelurahan/Desa Bukit Bamba (Kodepos : 74862)
- Kelurahan/Desa Bukit Liti (Kodepos : 74862)
- Kelurahan/Desa Bukit Rawi (Kodepos : 74862)
- Kelurahan/Desa Pamarunan (Kodepos : 74862)
- Kelurahan/Desa Parahangan (Kodepos : 74862)
- Kelurahan/Desa Penda Barania (Kodepos : 74862)
- Kelurahan/Desa Petuk Liti (Kodepos : 74862)
- Kelurahan/Desa Sigi (Kodepos : 74862)
- Kelurahan/Desa Tahawa (Kodepos : 74862)
- Kelurahan/Desa Tanjung Sangalang (Kodepos : 74862)
- Kelurahan/Desa Tuwung (Kodepos : 74862)

6. Kecamatan Maluku

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Maluku di Kota/Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng):

- Kelurahan/Desa Badirih (Kodepos : 74873)
- Kelurahan/Desa Gandang (Kodepos : 74873)
- Kelurahan/Desa Garantung (Kodepos : 74873)
- Kelurahan/Desa Kanamit (Kodepos : 74873)
- Kelurahan/Desa Kanamit Barat (Kodepos : 74873)
- Kelurahan/Desa Kanamit Jaya (Kodepos : 74873)
- Kelurahan/Desa Maluku Baru (Kodepos : 74873)
- Kelurahan/Desa Purwodadi (Kodepos : 74873)
- Kelurahan/Desa Sei/Sungai Baru Tewu (Kodepos : 74873)

- Kelurahan/Desa Sidodadi (Kodepos : 74873)
- Kelurahan/Desa Tahai Baru (Kodepos : 74873)
- Kelurahan/Desa Tahai Jaya (Kodepos : 74873)
- Kelurahan/Desa Wonoagung (Kodepos : 74873)

7. Kecamatan Pandih Batu

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pandih Batu di Kota/Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng):

- Kelurahan/Desa Belanti Siam (Kodepos : 74871)
- Kelurahan/Desa Dandang (Kodepos : 74871)
- Kelurahan/Desa Gadabung (Kodepos : 74871)
- Kelurahan/Desa Kantan Atas (Kodepos : 74871)
- Kelurahan/Desa Kantan Dalam (Kodepos : 74871)
- Kelurahan/Desa Kantan Muara (Kodepos : 74871)
- Kelurahan/Desa Karya Bersama (Kodepos : 74871)
- Kelurahan/Desa Mulyasari (Mulia Sari) (Kodepos : 74871)
- Kelurahan/Desa Pangkoh Hilir (Kodepos : 74871)
- Kelurahan/Desa Pangkoh Hulu (Kodepos : 74871)
- Kelurahan/Desa Pangkoh Sari (Kodepos : 74871)
- Kelurahan/Desa Pantik (Kodepos : 74871)
- Kelurahan/Desa Sanggang (Kodepos : 74871)
- Kelurahan/Desa Talio (Kodepos : 74871)
- Kelurahan/Desa Talio Hulu (Kodepos : 74871)
- Kelurahan/Desa Talio Muara (Kodepos : 74871)

8. Kecamatan Sebangau Kuala

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sebangau Kuala di Kota/Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng):

- Kelurahan/Desa Mekar Jaya (Kodepos : 74874)
- Kelurahan/Desa Paduran Sabangau (Kodepos : 74874)
- Kelurahan/Desa Panduran Mulya (Kodepos : 74874)

- Kelurahan/Desa Sebangau Jaya (Kodepos : 74874)
- Kelurahan/Desa Sebangau Mulya (Kodepos : 74874)
- Kelurahan/Desa Sebangau Permai (Kodepos : 74874)
- Kelurahan/Desa Sei/Sungai Bakau (Kodepos : 74874)
- Kelurahan/Desa Sei/Sungai Hambawang (Kodepos : 74874)

V. LEMBAGA LAIN :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Badan Pengelola Perbatasan
- c. Badan KESBANGPOL
- d. BAPPEDALDA
- e. Rumah Sakit Umum Daerah

2.1.4 Pemetaan Proses Bisnis Utama

Berdasarkan visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau terdapat 7 misi dan tujuan serta sasaran dari setiap tujuan yang ada

Tabel 1. Pemetaan Proses Bisnis Utama berdasarkan Visi Misi

PEMETAAN PROSES BISNIS UTAMA BERDASARKAN VISI MISI				
NO	MISI	TUJUAN	NO	SASARAN
1	Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman	Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta pemukiman yang mematuhi tata ruang	1	Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah
			2	Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
			3	Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang
2	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat	4	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
			5	Meningkatnya melek huruf di masyarakat
			6	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan

			7	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
			8	Meningkatnya Usia harapan Hidup
			9	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.
			10	Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat
3	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan	Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	11	Meningkatnya pendapatan masyarakat
			12	Meningkatnya UMKM
			13	Meningkatnya Koperasi Aktif
			14	Menurunnya angka kemiskinan
			15	Menurunnya tingkat pengangguran
			16	Meningkatnya penanaman modal
4	Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustry	Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustry	17	Berkembangnya agroindustry
			18	Meningkatnya produktifitas pertanian (arti
5	Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan	19	Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
			20	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
6	Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (<i>Good and Clean Governance</i>)	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	21	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
			22	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
			23	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan
7	Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (<i>Good and Clean Governance</i>)	Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (<i>Good</i>	24	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
			25	Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan

		<i>and Clean Governance)</i>		
			26	Meningkatnya kesetaraan gender
			27	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal

1.2 Eksternal Organisasi

2.2.1 Tren TI Global

Perusahaan konsultan global Accenture baru-baru ini mengeluarkan laporan bertajuk *Tecnology Vision 2018*. Dalam laporan tersebut disebutkan ada 5 tren teknologi yang wajib diperhatikan semua kalangan, teknologi tersebut yaitu *Citizen AI*, *Extended Reality*, *Data Veracity*, *Frictionless Business* dan *Internet of Thinking*.

Berikut penjelasan lengkap tentang teknologi tersebut

1. Citizen AI

Berkembangnya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah membuat banyak mengeksplorasi apa saja yang bisa dilakukan dengan sistem tersebut. Jika melihat trennya, kecerdasan buatan kini telah melompat lebih jauh tidak hanya sebatas sistem otomatisasi. Sejalan dengan waktu, AI bukan hanya sebuah sistem otomatisasi namun juga sistem yang berbicara dan komunikasi dengan customer, klien maupun vendor.

Di Indonesia sendiri, telah ada beberapa instansi yang menggunakan kecerdasan buatan dalam hal ini chatbot yang untuk mengambil alih sebagian fungsi fungsi *customer service*. Mesin digunakan untuk menjawab pertanyaan pertanyaan yang selama ini dijawab oleh manusia.

Untuk itu agar para personel IT juga memperhatikan tingkat keandalan AI. Jangan sampai algoritma yang salah justru membuat respon yang tidak baik (*hang*) akhirnya justru menjadi blunder.

2. Extended Reality

Teknologi yang mengkombinasikan antara teknologi virtual dan augmented ini disebut sebut akan banyak membantu operasional perusahaan maupun instansi tertentu. *Extended Reality* bakal memberikan dampak ke banyak industri, mulai dari Pertambangan, manufaktur, kesehatan, edukasi hingga ritel. Teknologi ini semakin menghilangkan jarak dengan virtualisasi dan rekayasa tambahan. Sebagai contoh bahwa dengan *extended reality* sebuah perusahaan bisa mengurangi jumlah expertis perbaikan mesin. Untuk memperbaiki mesin, mereka ekspertis tidak lagi perlu terbang dari satu lokasi ke lokasi lain. Ekspertis cukup berkomunikasi dengan staf yang belum terlalu ekspert dan memberikan arahan lewat jarak jauh.

Adanya *Extended Reality* ini memungkinkan karyawan bisa 'eksis' di manapun walaupun nyatanya tidak berada di tempat tersebut. Dengan *Extended Reality* jarak semakin bisa dieliminasi dan produktivitas meningkat. Platform-platform yang ada memungkinkan adanya virtualisasi dan terjadi penukaran informasi secara realtime

3. Data Veracity

Data telah menjadi bagian yang sangat penting bagi peradaban manusia seperti halnya minyak bumi, yang telah mendapat julukan *black gold*. Pernyataan tersebut disampaikan berdasar fakta bahwa data telah menjadi sumber laba bagi para pelaku bisnis di dunia maya Internet. Manajemen data bukan lagi hanya menjadi kompetensi yang penting bagi suatu organisasi, melainkan telah menjadi bagian kritis yang berperan sebagai penentu kemenangan dalam penguasaan pasar maupun dalam

pencapaian misi. Untuk menjawab tantangan itu peronel IT harus mampu mengaplikasikan gaya kepemimpinan dua arah untuk memaksimalkan keakuratan data dan meminimalisir ruang untuk manipulasi data.

4. Frictional Bussiness

Untuk dapat menjadi instansi cerdas dan terhubung, maka suatu instansi harus merancang ulang bisnis mereka agar tak terlibas kemajuan teknologi. Pengembangan kemitraan untuk pertumbuhan bisnis merupakan salah satu isu penting. Dari sisi teknologi arsitektur ada dua hal yang mendukung hal tersebut yaitu Micro Services dan Blockchain.

5. Internet of Thinking

Sederhananya, *Internet of Things* adalah konsep dasar yang menghubungkan perangkat apapun satu sama lain. Umumnya IoT dimaknai dengan adanya sensor yang bisa berikan informasi ke seseorang atau *commend center*. Dengan kemajuan AI, sensor di mesin saat ini bisa melakukan bisa melakukan aktivitas lebih canggih. Contohnya kamera di cctv tak hanya bisa merekam pergerakan orang, namun sudah bisa melakukan pengenalan atau *face recognition*.

Untuk mewujudkan lingkungan pintar ke dalam kehidupan sehari-hari tak hanya membutuhkan keterampilan khusus dan kualitas tenaga kerja yang mumpuni, namun juga modernisasi infrastruktur teknologi di masing-masing instansi yang ada.

2.2.2 Pemetaan Urusan Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014

Tabel 2. Bidang Pendidikan

NO	SUB URUSAN	URAIAN KERJA DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3	Akreditasi	---
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.
5	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Tabel 3. Bidang Kesehatan

NO	URUSAN	URAIAN KERJA DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
2	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota.

3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	<p>a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).</p> <p>c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.</p> <p>d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.</p> <p>e. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan-minuman industri rumah tangga.</p>
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.

Tabel 4. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	SUB URUSAN	URAIAN KERJA DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Sumber Daya Air (SDA)	<p>a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p>
2	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota .
3	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota.
4	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.
5	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota.
6	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/kota.
7	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah

		kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota.
9	Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.
10	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota.

Tabel 5. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	SUB URUSAN	URAIAN KERJA DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin pembangunandan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.
4	Prasarana, Sarana,	Penyelenggaraan PSU perumahan.

	dan Utilitas Umum (PSU)	
5	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Tabel 6. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota. b. Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan peraturan bupati/Bupati. c. Pembinaan PPNS kabupaten/ kota.
2	Bencana	Penanggulangan bencana kabupaten/kota.
3	Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Tabel 7. Bidang Sosial

NO	SUB BIDANG	URAIAN KERJA DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaansosial KAT. b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah

		kabupaten/kota.
2	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/ kelurahan asal.
3	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.
5	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.
6	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.
7	Sertifikasi dan Akreditasi	

Tabel 8. Bidang Tenaga Kerja

NO	SUB BIDANG	URAIAN KERJA DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota.

2	Penempatan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan antar kerja diDaerah kabupaten/kota b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota. d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) diDaerah kabupaten/kota. e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
3	Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota
4	Pengawasan Ketenagakerjaan	

Tabel 9. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN / KOTA
1	Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
2	Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan layananbagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.

		c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
3	Kualitas Keluarga	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota</p>
4	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.
5	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<p>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota</p>
6	Perlindungan Khusus Anak	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.</p>

Tabel 10 Bidang Pangan

NO	SUB URUSAN	URAIAN KERJA DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.
2	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota
4	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Tabel 11. Bidang Pertanahan

NO	SUB URUSAN	URAIAN KERJA DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
2	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	---
3	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota.
4	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah

	Pembangunan	kabupaten /kota.
5	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam Daerah kabupaten/kota.
6	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota.
7	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanahkosong dalamDaerah kabupaten/kota
8	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
9	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Tabel 12. Bidang Lingkungan Hidup

NO	SUB BIDANG	Uraian kerja DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH kabupaten/kota.
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

	pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	kabupaten/kota.
7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.
8	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
9	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10	Pengaduan Lingkungan Hidup	<p>Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
11	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaaur ulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Tabel 13. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	SUB URUSAN	URAIAN KERJA DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
2	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan kabupaten/kota.
4	<i>Profile</i> Kependudukan	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan kabupaten/kota.

Tabel 14. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	SUB URUSAN	URAIAN KERJA DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa.
2	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
3	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
4	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

Tabel 15. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota.
2	Keluarga Berencana (KB)	a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan

		<p>edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.</p> <p>b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).</p> <p>c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.</p>
3	Keluarga Sejahtera	<p>a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p> <p>b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p>
4	Standardisasi dan Sertifikasi	---

Tabel 16. Bidang Perhubungan

NO	SUB URUSAN	URAIAN KERJA DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<p>a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</p> <p>b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.</p> <p>c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.</p> <p>d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.</p> <p>e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.</p> <p>g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.</p> <p>h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan</p>

		<p>kabupaten/kota.</p> <p>i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten.</p> <p>m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.</p>
2	Pelayaran	<p>a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota</p> <p>c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan</p>

		<p>angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.</p> <p>d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan</p> <p>e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai domisili badan usaha.</p> <p>f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.</p> <p>g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikankapal.</p> <p>i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>l. Pembangunan,penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>n. Penerbitanizin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.</p> <p>o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.</p>
--	--	---

		<p>p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</p>
3	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
4	Perkeretaapian	<p>a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.</p> <p>e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota.</p>

Tabel 17. Bidang Komunikasi dan Informatika

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika	
2	Informasi dan	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik

	Komunikasi Publik	Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
3	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Tabel 18. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	SUB URUSAN	URAIAN KERJA DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Badan Hukum Koperasi	
2	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
3	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
4	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
5	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
6	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota.
7	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para

		pemangku kepentingan.
8	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Tabel 19. Bidang Penanaman Modal

NO	SUB URUSAN	URAIAN KERJA DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
2	Kerja Sama Penanaman Modal	---
3	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
6	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota.

Tabel 20. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

NO	SUB BIDANG	URAIAN KERJA DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga

		rekreasi.
2	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

Tabel 21. Bidang Statistik

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Statistik Dasar	---
2	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.

Tabel 22. Bidang Persandian

NO	SUB URUSAN	URAIAN KERJA DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota.
2	Akreditasi dan Sertifikasi	---
3	Analisis Sinyal	---

Tabel 23. Bidang Kebudayaan

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
2	Perfilman Nasional	---
3	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.

4	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota.
5	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya keluar Daerah kabupaten/kotadalam 1(satu) Daerah Kabupaten.
6	Permuseuman	Pengelolaan museum kabupaten/kota.
7	Warisan Budaya	---

Tabel 24. Bidang Perpustakaan

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota.
2	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
3	Sertifikasi Pustakawan dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan	

Tabel 25. Bidang Kearsipan

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota. b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, perusahaan swasta yang

		<p>kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten/kota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten/kota.</p>
2	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	<p>a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota.</p> <p>c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan.</p> <p>d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota.</p> <p>e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip</p>
3	Akreditasi dan Sertifikasi	
4	Formasi Arsiparis	
5	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah kabupaten/kota.

Tabel 26. Bidang Kelautan dan Perikanan

NO	SUB URUSAN	URAIAN KERJA DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	
2	Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
3	Perikanan Budidaya	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.
4	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
5	Pengolahan dan Pemasaran	---
6	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	---
7	Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan	---

Tabel 27. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Geologi	
2	Mineral dan Batubara	
3	Minyak dan Gas Bumi	
4	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota.
5	Ketenagalistrikan	

Tabel 28. Bidang Pariwisata

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
2	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
3	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.
4	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Tabel 29. Bidang Pertanian

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Sarana Pertanian	a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota. d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten/kota. f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten lain.

2	Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
3	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<ul style="list-style-type: none"> a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
4	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.
5	Perizinan Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, subdistributor) obat hewan
6	Karantina Pertanian	---
7	Varietas Tanaman	---

Tabel 30. Bidang Kehutanan

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan Hutan	---
2	Pengelolaan Hutan	---
3	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaanTAHURA kabupaten/kota.
4	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan	---
5	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	
6	Pengawasan Kehutanan	---

Tabel 31. Bidang Perdagangan

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. d. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat. e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan

		<p>dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat Daerah kabupaten/ kota.</p> <p>f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau</p> <p>g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).</p>
2	Sarana Distribusi Perdagangan	<p>a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.</p>
3	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<p>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasarkabupaten/kota.</p> <p>c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya</p>
4	Pengembangan Ekspor	<p>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1(satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah Kabupaten (lintas Daerah kabupaten/kota).</p>
5	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Tabel 32. Bidang Perindustrian

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
2	Perizinan	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
3	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: <ul style="list-style-type: none"> - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Tabel 33. Bidang Transmigrasi

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah kabupaten/kota.
2	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
3	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

BAB III

KONDISI SAAT INI DAN ANALISA KESENJANGAN

3.1 Sistem Aplikasi

Sistem aplikasi pada Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau diperlukan untuk mendukung strategi bisnis yang telah dicanangkan serta fungsi bisnis yang dikelola sebagaimana tercermin pada Arsitektur Bisnis yang akan diterapkan pada Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau. Pada bagian ini akan dijabarkan sistem aplikasi yang terdapat pada Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau saat ini serta dukungan sistem aplikasi tersebut terhadap bisnis yang ada.

3.1.1 Sistem Aplikasi Per Satuan Kerja

Pada bagian ini akan dijelaskan aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh setiap satuan kerja dan personel yang terdapat di Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau. Berikut ini adalah aplikasi dan personel yang didefinisikan oleh representasi pengguna aplikasi di tiap SKPD :

Tabel 34. Aplikasi dan Personel tiap SKPD

NO	NAMA PROGRAM APLIKASI	PERSONEL	KETERANGAN
I	DINAS PERTANIAN		
1.1	SIMDA Penerima	Albert	
1.2	SIMDA Pengeluaran	Riskardo	
1.3	SIMDA Barang	Ranju, SP.	
1.4	Modul Pelaporan Online (MPO) APBN	Ranju, SP.	
1.5	Pelaporan Informasi Pasar (PIP) TP		
1.6	e-Form Holtikultura	1. Marini, SP.	

		2. Adi Febri Nispianto	
1.7	Pelaporan Informasi Pasar (PIP) Hortikultura	Rio Paskah Rianto	
1.8	e-Monev DAK	Hermansyah ,SP	
1.9	e-Monev SMAP	Jeddyson, SP., MM.	
1.10	e-Proposal APBN	Jeddyson,SP.MM	
1.11	e-Bapenas	Jeddyson,SP.MM	
II	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA		
NO	PROGRAM APLIKASI	PERSONEL	Keterangan
2.1	Simfony PPA	Mesahk Hatisuka,SE	Website kekerasan kemenppa.go.id
2.2		Susi Susanti,S.Kep	Aplikasi bkkbn.go.id
2.3		Reza Setiawan	
III	BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) Kabupaten Pulang Pisau		
No	PROGRAM APLIKASI	PERSONEL	KETERANGAN
3.1	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	1 Intan Mayasari, Amd (user) 2 Supriansyah,S.Kom (user) 3 Riady (user) 4 Alif Sundar,SE (User)	Ada Server Badan Kepegawaian Negara
3.2	E-formasi	1 Murni Rosani (user) 2 Sulistya Ayu Maladjim,SH (USER)	Ada Server :Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara
IV	BADAN PENDAPATAN		

	PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) Kabupaten Pulang Pisau		
NO	Program Aplikasi	PERSONEL /SDM	Keterangan
4.1	SIMDA-keuangan	Riduan,Amd	Penggunaan Aplikasi penatausahaan keuangan dan Penganggaran (Pranata Komputer)
4.2	SIMDA-BMD	Andy Aries, Amd	Penatausahaan Aset/BMD (Pranata Komputer)
4.3	SISMIOP	ERNI AnitaSari, S.kom	Penatausahaan Pendapatan
4.4	SIM-Gaji		Penatausahaan Gaji
V	DINAS KESEHATAN Kabupaten Pulang Pisau		
NO	Program Aplikasi	Personel	Keterangan
5.1	SAS	Iwan E.A.Hasibuan,SKM	Penanggungjawab : Susilawati,SE.MM
5.2	SIMPEG	Iwan E.A.Hasibuan,SKM	Penanggungjawab : Susilawati,SE.MM
5.3	SIMDA Barang	Yulira Margareth,S.Kep	Penanggungjawab: Susilawati,SE.MM
5.4	SIMDA Keuangan	M.Yusuphan, S.Farm Apt Febrina R.Oktara	Penanggungjawab : Susilawati,SE.MM
5,6	ASPAK	Sandiati,S Giz	Penanggungjawab : dr.Jamil Muslim
5,6	EPPGM	Waloyo,SST	Penanggungjawab :Ma'rup Kurkhi,SKM
5.7	STBM Android	Ma'rup Kurkhi,SKM	Penanggungjawab : Ma'rup Kurkhi,SKM
5.8	E-Logistik Obat	Kiki Sulistini,Amd.Farm	Lambang Sunkoco,S.Farm.Apt

5.9	E- Malaria	Puguh Setiawan, Amd .AK	Penanggungjawab :dr.Pande Putu Gina
5.10	E-TBC	Rina Suryani,SKM	Penanggungjawab: dr. Pande Putu Gina
5.11	E-Imunisasi	Sutarti,Amd.Kesling	Penanggungjawab :dr.Pande Putu Gina
5.12	E-Survelians	Siska Hertiana,SKM	Penanggungjawab: dr.Pande Putu Gina
5.13	E-PTM	Surtati,Amd Kesling	Penanggungjawab: dr.Pande Putu Gina
5.14	Siskohakes	Elly Rahmawati, SKM	Penanggungjawab : dr. Pande Putu Gina

Berdasarkan data di atas, diperoleh informasi penting bahwa sebagian besar SOPD yang ada di Kabupaten Pulang Pisau masih kekurangan aplikasi untuk melaksanakan program yang ada di SOPD masing-masing. Oleh karena itu dibutuhkan aplikasi tambahan untuk menunjang keberlangsungan kegiatan kerja di masing-masing SOPD yang ada. Berikut ini aplikasi yang dibutuhkan kabupaten Pulang Pisau untuk melakukan aktivitas kerja di masing-masing OPD.

Tabel 35. Kebutuhan Aplikasi di Kabupaten Pulang Pisau

SKPD Kabupaten	Aplikasi yang dibutuhkan
Sekretariat Daerah	<p>a. Sistem Pengawasan Daerah untuk menunjang kegiatan audit</p> <p>Aplikasi Produk Hukum di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)</p> <p>b. Studi kasus permasalahan hukum dan Legal Opinion</p> <p>Aplikasi Pelayanan Pusat Informasi seperti Kiosk tentang Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, Absensi Kepegawaian dan daftar tamu</p>
Sekretariat DPRD	Belum ada aplikasi yang menunjang tupoksi

SKPD Kabupaten	Aplikasi yang dibutuhkan
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	<p>A Database Anggota Korpri berikut SI. Tracking Status Pembayaran Iuran Anggota.</p> <p>Aplikasi pengelolaan spreadsheet</p>
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	<p>Aplikasi Pendukung Tupoksi Rumah Sakit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran Pasien - Rekam Medis Pasien - Inventarisasi sumber daya
Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas	GIS lokasi PKL dan acara masyarakat
Inspektorat	Belum ada aplikasi yang menunjang tupoksi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	Aplikasi Perencanaan (E- Planning) untuk membantu penyusunan dokumen perencanaan daerah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	<p>a. Database dan Aplikasi yang secara realtime dan online mengintegrasikan informasi daerah rawan bencana dan kejadian bencana dari tingkat kelurahan.</p> <p>Aplikasi Pemetaan Bencana</p>
Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	<p>a. integrasi dengan SKPD lain /antar Unit Kerja/Satuan Pendidikan</p> <p>b. Aplikasi Absensi</p> <p>c. Aplikasi Pengembangan karir PNS</p>
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT)	<p>a. Penyusunan Master Data</p> <p>b. Sistem Pelaporan dan Pengarsipam Digital</p> <p>c. Dukungan interkoneksi ke dinas/OPD teknis</p>
Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (BPKBD)	Aplikasi Online untuk pengelolaan keuangan
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan masyarakat dan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (BKBMPPPA)	Aplikasi data keluarga dan kependudukan untuk kegiatan pelayanan keluarga berencana

SKPD Kabupaten	Aplikasi yang dibutuhkan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Data dasar ketahanan pangan dari skpd2 teknis (pertanian, peternakan dan perikanan, kesehatan, deperindagkop dan UMKN, dinas perhubungan, dinas kependudukan,)
Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA)	Aplikasi sistem pendapatan daerah untuk pengelolaan pajak daerah non PBB yang mendukung Operasional SKPD Sistem
Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup	
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Aplikasi penyelenggaraan penyuluhan untuk menampilkan data kelembagaan dan SDM petani dan penyuluh, kelembagaan petani (Posluhdes, Poktan, Gapoktan, Asosiasi) dan SDM petani, kelembagaan penyuluh (BP kecamatan, posluhdes) dan SDM penyuluh PNS, THL, Penyuluh swadaya.
Dinas Perhubungan (DISHUB)	a. Mobile ATCS : Aplikasi Mobile ATCS kota untuk feedback dari masyarakat, sistem pemantau kecepatan kendaraan, aplikasi dan sistem penghitungan volume kendaraan, Sistem Bus Prioritas untuk pengaturan prioritas bagi kendaraan prioritas tinggi : Ambulance, Pemadam kebakaran
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	a. Database Persebaran Demografi Sosial Penduduk, Integrasi Data dengan Instansi Terkait seperti BP3TKI, Disdukcaapil, dsb b. SI Pendataan dan Tracking Status Pekerjaan Penduduk,

SKPD Kabupaten	Aplikasi yang dibutuhkan
Dinas Kesehatan	a. Aplikasi Posyandu, Posbindu, Puskesmas Pembantu untuk pelaporan ke Dinkes. Aplikasi Data Kesehatan Berbasis GIS b. Ketersediaan hardware di puskesmas belum memadai
Dinas Pendidikan	
Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi	
Dinas Pekerjaan Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Aplikasi Operasional SKPD, Pelayanan berbasis NIK b. Pemutakhiran Penduduk, Data base penduduk terintegrasi c. SMS Center, SMS Gateway
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (KARPUSDA)	a. Aplikasi database kekayaan perpustakaan dan arsip daerah. Integrasi data perpustakaan daerah dengan b. perpustakaan di level terkecil daerah, seperti perpustakaan sekolah di segala level.
Dinas Komunikasi dan Informatika	
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)	a. Agenda surat menyurat Disposisi B Pengendalian kepegawaian, kapan harus pension, naik pangkat. Pengendalian surat keterangan terdaftar bagi ormas, kapan harus registrasi ulang / 3 tahun. c. Surat Rekomendasi: penelitian LSM, Mahasiswa, yayasan yang akan melakukan penelitian harus mendapat rekomendasi KESBANGPOL. d.

Berikut aplikasi yang ada di tiap kecamatan dan informasi kebutuhan aplikasi tiap kecamatan:

Tabel 36. Daftar Aplikasi yang Ada dan Dibutuhkan Kecamatan

Kecamatan	Aplikasi yang sudah ada	Aplikasi yang dibutuhkan
Kecamatan Kahayan Hilir	SIPPD	a. Sinkronisasi data PBB b. E-monev c. Data Masyarakat Miskin
Kecamatan Kahayan Tengah	M-Kas SIPKD SIAK e-KTP	d. SIM perijinan IMB e. Pengaduan Tramtib f. Perijinan Kegiatan Masyarakat g. Data Posyandu dan KB h. Data LPM dan LSM i. Data UKM j. Data LAMPIN
Kecamatan Kahayan Kuala	SAPK (PNS)	k. Profil Kelurahan l. Asset/kekayaan daerah m. Pemantauan potensi daerah (perdagangan, pariwisata, perkebunan, peternakan, perikatan)
Kecamatan Jabiren Raya		n. Pemantauan Penyaluran Kredit
Kecamatan Banama Tingang		o. Data Sosial Penduduk p. Data Monografi Penduduk q. Data pendidikan r. Data Pertanahan
Kecamatan Maliku		s. Data ormas, organisasi keagamaan, toga toma, data tempat ibadah t. Data Budpora u. Surat menyurat digital v. Dokumentasi Digital
Kecamatan Pandih Batu		w. SMS Center x. Portal Kecamatan y. Aplikasi pelaporan data dari desa dan pertukaran data desa-kecamatan
Kecamatan Sebangau Kuala		z. Aplikasi pelaporan dari kecamatan ke tingkat Kabupaten Pulang Pisau

3.1.1.1 Aplikasi Kelurahan

Aplikasi yang ada di lingkungan kelurahan bersifat tipikal atau serupa. Hingga saat ini belum ada aplikasi yang sudah dipergunakan di tingkat kelurahan. Berikut ini perkiraan aplikasi yang sebaiknya ada di lingkungan Kelurahan agar dapat mendukung tupoksi kelurahan di wilayah kabupaten Pulang Pisau

Tabel 37. Aplikasi yang Ada dan Dibutuhkan Kelurahan

No	Aplikasi	Keterangan Fungsional
1	APBDES	a. Data Anggaran SKPD b. Keuangan c. Perencanaan
2	BKU	a. Data bendahara penerimaan b. Pengeluaran SKPD
3	Keuangan	a. Pemasukan b. Pengeluaran
4	PBB	a. Data Perpajakan
5	Penilaian Kerja (P2KP)	a. Menilai kinerja kegiatan PNS
6	Profil Kelurahan	a. Profil Desa b. Data Monografi
7	SIK	a. Data kependudukan
8	SIBANGDA	a. Penyerapan anggaran
9	SIMBADA	a. Data inventaris
13	SIMPEG	a. Data kepegawaian
14	SIPEN	a. Data pernikahan
15	Sistem Informasi Akuntansi Daerah	a. Pengelolaan data keuangan b. Neraca keuangan c. Jurnal
16	Sistem Informasi Manajemen Beras	a. Data beras b. Aset kelurahan
17	SIK (pemukiran)	
18	Keudes	a. Keuangan desa
19	Perpustakaan	a. Data perpustakaan
20	Kearsipan	1. Data kearsipan
21	SPIN	1) Data pencatatan pernikahan

No	Aplikasi	Keterangan Fungsional
22	Kependudukan	1. Surat kependudukan 2. Laporan kependudukan

3.1.2 Resume Kondisi Umum Sistem Aplikasi Eksisting

Kondisi umum yang terdapat pada sistem aplikasi yang dikelola di saat ini:

1. Pemanfaatan Data

Data yang terdapat diberbagai sumber yang telah dikumpulkan belum dimaanfaatkan secara optimal. Masih banyak data yang hanya disimpan (diarsipkan) disejumlah tempat penyimpanan yang ada namun belum digunakan dengan semestinya.

2. Ketersediaan Aplikasi

Untuk mendukung proses bisnis ketersediaan aplikasi masih saat kurang sehingga perlu dilakukan perhitungan prioritas pengadaan terhadap aplikasi tersebut. Pencapaian tujuan dan sasaran fungsi bisnis akan terhambat apabila aplikasi ini belum ada.

3. Integrasi Sistem

Kondisi aplikasi yang ada dipemerintahan kabupaten pulang pisau sebagian besar belum dikelola dan terintegrasi dengan baik. Hal ini menyebabkan antara lain :

a. Terjadi redundansi Data

Terdapat data yang sama dibutuhkan di beberapa sistem namun belum terintegrasi dengan baik, maka dibutuhkan pengelolaan data yang sama di beberapa sistem yang berbeda. Selain itu tidak efisien dalam penggunaan sumber dayanya, hal ini juga menyebabkan perlunya dilakukan rekonsiliasi terhadap data yang sama tersebut yang dikelola oleh beberapa sistem yang berbeda yang ada di setiap SOPD yang ada di Pemerintahan kabupaten Pulang Pisau.

b. Integritas data rendah

Data yang terdapat di Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau perlu dilakukan entri ulang (baik itu manual ataupun menggunakan tool) di sistem aplikasi lain yang membutuhkan datanya karena sistem yang ada belum terintegrasi dengan baik.

c. Manfaat dari sistem menjadi belum optimal

Karena sistem yang ada belum terintegrasi, maka *value* dari sistem secara individual maupun kolektif juga tidak optimal. Sistem masih banyak dikelola secara terfragmentasi.

4. Sistem Tumpang Tindih

Karena sistem yang ada belum terintegrasi, sehingga masih banyak sistem aplikasi yang memiliki peran dan fungsi yang mirip yang berjalan yang dihasilkan dari beberapa inisiatif.

5. Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan

Belum memadainya sistem pengambilan keputusan yang diperlukan di lingkungan. Padahal data yang dimiliki oleh berpotensi untuk mendukung pengambilan keputusan-keputusan seperti untuk pertanian, pertanian/hortikultura, transportasi, pertahanan, dll.

6. Fungsionalitas Sistem

Masih cukup banyak fungsi bisnis yang dikelola belum didukung oleh Sistem Aplikasi secara memadai.

3.1.3 Model Sistem Aplikasi Per Standar Nasional

Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau berikut ini merupakan model sistem aplikasi per standar Nasional :

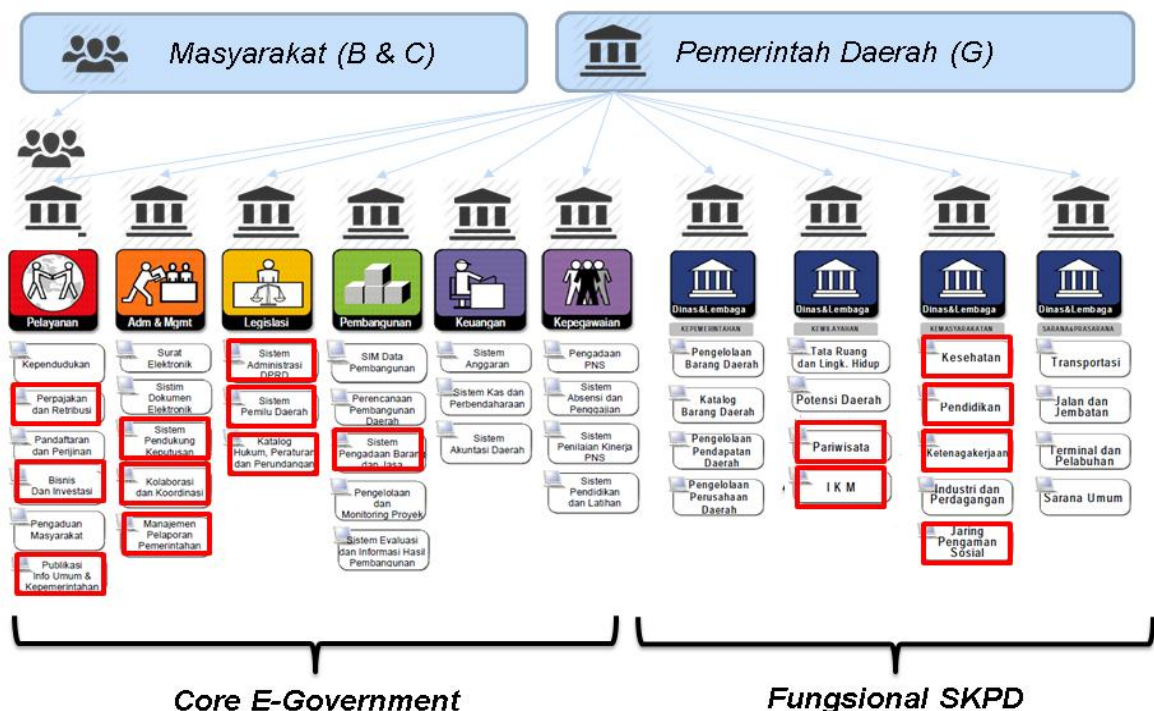
Dari arsitektur tersebut, ada 3 kelompok aplikasi, yaitu kelompok besar operasional, kelompok besar aplikasi ekstraksi, dan Kelompok besar infratraktur. Kelompok besar operasional berfungsi untuk mengumpulkan dan mengedit data, Kelompok besar ekstraksi berfungsi untuk mengolah

dan menampilkan data yang diolah, sedangkan kelompok besar infrastruktur berfungsi sebagai landasan operasi dan penyedia sistem database.

Untuk sistem *electronic government*, terdapat 2 kelompok aplikasi, yaitu kelompok besar core e-Government (6 fungsi utama) dan kelompok operasional SKPD (4 fungsi utama), jadi untuk sistem e-Government, minimal ada 10 fungsi utama, seperti pada gambar tersebut.

3.1.4 Analisis Kesenjangan Sistem Aplikasi

Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan berikut ini adalah kondisi umum yang terdapat di Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau terkait dengan sistem aplikasi yang dikelola disaat ini :



Gambar 1. Kebutuhan Aplikasi 2018-2023

Dari sekitar 35 aplikasi yang digunakan secara mandiri oleh 32 OPD yang ada di kabupaten Pulang Pisau, yang paling penting untuk

disediakan agar sistem e-Government berfungsi yakni bagian yang ditandai dengan kotak merah.

3.2 Infrastruktur TI

Secara konseptual infrastruktur TI di Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau memperlihatkan bagaimana interkoneksi elemen structural membentuk sebuah infrastruktur teknologi informasi yang memberikan dasar terhadap keberhasilan sebuah sistem yang ada di kabupaten pulang pisau.

Secara umum sistem teknologi informasi di Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau saat ini masih didukung oleh beberapa elemen yaitu:

1. Server
2. Jaringan Komunikasi
3. Peralatan Komputasi
4. Pengkabelan
5. Pendingin Ruangan
6. Catu daya dan peralatan listrik
7. *Civil works*

3.2.1 Infrastruktur TI Eksisting

Infrastruktur yang terdapat di Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau sebagai landasan untuk keberhasilan sebuah layanan. Saat ini Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau melakukan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur TI belum berjalan optimal, tugas pokok yang ada belum terdefinisi dengan baik dan jelas yang berada di bawah kewenangan SOPD. Keadaan infrastruktur TI yang ada di Pmerintahan Kabupaten Pulang Pisau akan dijadikan sebagai dasar (*baseline*) untuk perancangan terhadap arsitektur TI ke depan (*target*). Diharapkan ada keselarasan

program kerja dan kontinuitas layanan TI yang lebih baik dengan pemanfaatan aset infrastruktur TI yang telah dimiliki oleh SOPD saat ini.

Tabel 38. DAFTAR BTS DI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2017

NO	ALAMAT		LATT	LONG	TINGGI	STRUKTUR MENARA	TAHUN BANGUNAN
	KELURAHAN	KECAMATAN					
TELKOMSEL							
1	Desa Mekar Jaya	Sebangau Kuala	- 2,91934	113,815	72 m	4 kaki	2008
2	Desa Paduran Sebangau	Sebangau Kuala	- 3,03103	113,856	72 m	4 kaki	2014
3	Desa Bahaur	Kahayan Kuala Bahaur	- 3,23725	114,096	72 m	4 kaki	2005
4	Desa Pangkoh	Pandih Batu	- 3,06252	114,156	52 m	4 kaki	2005
5	Desa Maluku	Maliku	- 2,95938	114,156	72 m	4 kaki	2006
6	Desa Gandang	Maliku	- 2,88985	114,154	72 m	4 kaki	2011
7	Desa Gohong	Kahayan Hilir	- 2,67765	114,283	65 m	4 kaki	2005
8	Kahayan Hilir	Kahayan Hilir	- 2,72023	114,307	60 m	3 kaki	2014
9	Desa Mintin	Kahayan Hilir	- 2,87942	114,237	72 m	4 kaki	2006
10	Desa Mentarem I	Kahayan Hilir	- 2,80800	114,245	72 m	4 kaki	2014
11	Desa Anjir	Kahayan Hilir	- 2,77747	114,275	72 m	4 kaki	2004
12	Desa Anjir	Kahayan Hilir	- 2,76789	114,259	72 m	4 kaki	2014
13	Desa Anjir	Kahayan Hilir	- 2,76448	114,286	42 m	3 kaki	2014
14	Desa Henda	Jabiren Raya	-	114,2	72 m	4 kaki	2005

			2,6229 5	06			
15	Desa Jabiren Raya	Jabiren Raya	- 2,5514 0	114,1 91	72 m	4 kaki	2009
16	Desa Tumbang Nusa	Jabiren Raya	- 2,3765 7	114,1 25	82 m	4 kaki	2005
17	Desa Taruna	Jabiren Raya	- 2,3292 4	114,7 00	62 m	4 kaki	2006
18	Desa Bukit Rawi	Kahayan Tengah	- 2,0746 0	113,9 48	20 m	4 kaki	2005
19	Desa Sigi	Kahayan Tengah	- 2,0329 3	113,9 44	72 m	3 kaki	2014
20	Desa Petuk Liti	Kahayan Tengah	- 1,9937 8	113,9 54	72 m	4 kaki	2007
21	Desa Tahawa	Kahayan Tengah	- 1,8831 2	113,9 56	72 m	4 kaki	2014
22	Desa Lawang Uru	Banama Tingang	- 1,7775 9	113,9 50	72 m	4 kaki	2011
	Desa Pahawan	Banama Tingang	- 1,6685 0	113,9 44	42 m	4 kaki	2014
24	Desa Bawan	Banama Tingang	- 1,6176 6	113,9 31	72 m	4kaki	2006
25	Desa Pangi	Banama Tingang	- 1,5555 1	113,9 19	62 m	4 kaki	2011
MITRATEL							
26	Desa Belanti Siam	Pangkoh	- 3,1477 4	114,1 99	72 m	4 kaki	2014
27	Desa Tahai Jaya	Maliku	- 3,0211 7	114,1 85	72 m	4 kai	2011
PROTELINDO							
28	Desa Papuyu II	Kahayan Kuala Bahaur	- 3,2927 8	114,0 41	60 m	3 kaki	2014
29	Desa Talio	Pandih Batu	- 3,1307 1	114,1 19	62 m	3 kaki	2011
30	Desa Talio Muara	Pandih Batu	- 3,0905 0	114,1 06	62 m	3 kaki	2014
31	Desa Belanti Siam	Pandih Batu	- 3,1338	114,1 88	52 m	3 kaki	2014

			9				
32	Desa Taruna	Jabiren Raya	- 2,3364 9	114,0 77	72 m	3 kaki	2009
TBG							
33	Desa Gohong	Kahayan Hilir	- 2,6811 6	114,2 76	42 m	4 kaki	2007
34	Desa Jabiren Raya	Jabiren Raya	- 2,5280 8	114,1 90	72 m	4 kaki	2007
XL AXIATA							
35	Desa Pangkoh Hulu	Pandih Batu	- 3,0634 6	114,1 58	72 m	3 kaki	2005
36	Desa Pilang	Jabiren Raya	- 2,4797 8	114,1 97	72 m	4 kaki	2002
37	Desa Tumbang Nusa	Jabiren Raya	- 2,3767 6	114,1 27	62 m	4 kaki	2009
INDOSAT							
38	Desa Bahaur Hilir	Kahan Kuala Bahaur	- 3,2386 2	114,0 96	72 m	4 kaki	2006
39	Desa Pangkoh	Pandih Batu	- 3,0620 2	114,1 54	52 m	4 kaki	2007
40	Desa Maluku Baru II	Maliku	- 2,9611 9	114,1 55	65 m	3 kaki	2007
41	Desa Kamamit	Maliku	- 2,8863 4	114,1 60	72 m	4 kaki	2005
42	Dsa Anjir	Kahayan Hilir	- 2,7480 0	114,2 66	42 m	3 kaki	2002
43	Desa Anjir	Kahayan Hilir	- 2,7649 3	114,2 85	72 m	4 kaki	2002
44	Desa Pilang	Jabiren Raya	- 2,4836 5	114,1 93	72 m	3 kaki	2007
45	Desa Bukit Rawi	Kahayan Tengah	- 2,0853 0	113,9 44	20 m	4 kaki	2007
TELKOM							
46	Desa Pulang Pisau	Kahayan Hilir	- 2,7511 3	114,2 58	42 m	3 kaki	1994
47	Desa Pilang	Jabiren Raya	- 2,4811 7	114,1 92	112 m	4 kaki	1991
HCPT							

48	Desa Gohong	Kahayan Hilir	- 2,6757 2	114,2 95	42 m	3 kaki	2009
49	Desa Mintin	Kahayan Hilir	- 2,8487 3	114,2 09	72 m	4 kaki	2009
50	Desa Pulang Pisau	Kahayan Hilir	- 2,6605 5	114,2 56	42 m	3 kaki	2009
51	Desa Henda	Jabiren Raya	- 2,6100 0	114,2 07	72 m	4 kaki	2009
52	Desa Jabiren Raya	Jabiren Raya	- 2,5414 6	114,1 93	72 m	4 kaki	2009
53	Desa Tumbang Nusa	Jabiren raya	- 2,4282 3	114,1 69	72 m	3 kaki	2009
TAMBAHAN PEMBANGUNAN BTS 2017							
54	Desa Parahangan	Kahayan Tengah	- 1,8625 2	113,9 54	72 m	4 kaki	2017
55	Desa Bereng Rambang	Kahayan Tengah	- 1,8262 6	113,9 61	72 m	4 kaki	2017
56	Desa Tahai Baru	Maliku	- 2,0542 2	114,2 16	52 m	4 kaki	2017
57	Desa Pangkoh Hilir	Pandih Batu	- 3,0619 8	114,1 54	52 m	4 kaki	2017
58	Desa Bukit Liti	Kahayan Tengah	- 1,5803 1	113,9 51	30 m	1 kaki	2017
59	Desa Tumbang Tarusan	Banama Tingang	- 1,5798 60	113,9 29	62 m	4 kaki	2017
60	Desa Darun Bawan	Kahayan Hilir	- 2,7478 3	114,2 66	30 m	4 kaki	2017
61	Desa Bahu Palawa	Kahayan Tengah	- 1,9542 7	113,9 56	52 m	4 kaki	2017
62	Desa Pamarunan	Kahayan Tengah	- 1,9261 7	113,9 58	52 m	4 kaki	2017
63	Desa Buntoi	Kahayan Hilir	- 2,8120 7	114,1 98	72 m	4 kaki	2017

Tabel 39. DAFTAR BTS PER KECAMATAN DI KABUPATEN PULANG PISAU

NO	ALAMAT	DESA/ KEL	KECAMA- TAN	OPERA- TOR	PEMILIK MENARA	LATDECIMAL	LONG DECIMAL
	KEC. KAHA- YAN KUALA						
1	Jl. Barunai Hilir Rt 02	Ds Papuyu II	Kahayan Kuala	Telkomsel	Protelindo	-3,29278	114,041
2	Jl. Kabupaten Rt.08/3	Ds Bahaur Hilir	Kahayan kuala	Indosat,X 1	Indosat	-3,23862	114,096
3	-	Ds Bahaur	Kahayan Kuala	Telkomsel	Telkomsel	-3,23725	114,096
	KEC. MALIKU						
1.	Jl. Nusa Indah VI RT 05/02	Ds Tahai Jaya	Maliku	Telkomsel	Mitratel	-3,02117	114,185
2	-	Ds Maliku Baru II	Maliu	Indosat	Indosat	-2,96119	114,155
3	Jl. Kramat Raya Rt 07	Desa Maliku	Maliku	Telkomsel	Telkomsel	-2,95938	114,156
4	Jl. Opak Rt 17/05 Kamamit	Desa Gandang	Maliku	Telkomsel	Telkomsel	-2,88985	114,154
5	Samping Puskesmas Kamamit	Desa Kamamit	Maliku	Indosat	Indosat	--2,88634	114,16
	KEC. KAHAYA N TENGAH						
1	Jl, Pertiwi	Desa Bukit Rawi	Kahayan Tengah	Indosat, XL	Indosat	-2,0853	113,944
2	Jl. Palangka-kuaala kurun Rt 03	Desa Bukit Rawi	Kahayan Tengah	Telkomsel	Telkomsel	-2,0746	113,948
3	Desa Sigi Rt 01	Desa Sigi	Kahayan Tengah	Telkomsel	Telkomsel	-2,03293	113,944
4	Jl. Provinsi Lintas Kalimantan Rt 01	Desa Petuk Liti	Kahayan Tengah	Telkomsel	Telkomsel	-1,99378	113,954
5	Jl. Lintas	Desa	Kahayan	Telkomsel	Telkomsel	-1,88312	113,956

	Palangka-Kuala Kurun	Tahawa	Tengah				
	KEC. KAHAYAN HILIR						
1	Jl.Simpang Tiga Pertamina	Desa Gohong	Khayan Hilir	Indosat	TBG	-2,68116	114,276
2	Jl.Tajihan ANTANG Rt 07	Desa Gohong	Kahayan hilir	Telkomsel	Telkomsel	-2,67765	114,283
3	Jl. Trans Kalimantan Km 78	Desa Gohong	Kahayan Hilir	HCPT/TR EE	HCPT/TR EE	-2,67572	114,295
4	Jl. PolRes Pulang Pisau	Kahayan Hilir	Kahayan Hilir	Telkomsel	Telkomsel	-2,72023	114,307
5	Jl. Trans Kalimantan KM 24,5 Perbatasan	Desa Mintin	Kahayan Hilir	Telkomsel	Telkomsel	-2,87942	114,237
6	Jl. Trans Kalimantan Km 112	Desa Mintin	Kahayan Hilir	HCPT/TR EE	HCPT/TR EE	-2,84873	114,209
7	Jl.Trans Kalimantan	Desa Menteren I	Kahayamn Hilir	Telkomsel	Telkomsel	-2,808	114,245
8	Jl, Trans Kalimantan km 10	Desa Anjir	Kahayan Hilir	Telkomsel	Telkomsel	-2,77747	114,275
9	JL Abel Gawei/Futsal	Desa ANJIR	Kahayan HILIR	Telkomsel	Telkomsel	-2,76789	114,259
10	Jl, Tinggang Menteng STO UPND Pulang Pisau	Desa Pulang Pisau	Kahayan Hilir	Telkomsel	Telkom	-2,75113	114,258
11	Jl. Darung Bawan Rt 02	Desa Anjir	KAHAYAN Hilir	Indosat,X L	INDOSAT	-2,748	114,266
12	Jl. Darung Bawan km 10	Desa Anjir	Kahayan Hilir	Indosat	INDOSAT	-2,76493	114,285

13	Jl.Darung Bawan Rt 10	Desa Anjir	Kahayan Hilir	Telkomsel	TELKOM SEL	-2,76448	114,286
14	Jl. Trans Kalimantan km 82	Desa Pulang Pisau	Kahayan Hilir	HCPT/TR EE	HCPT/TR EE	-2,66055	114,256
	KEC. PANDIH BATU						
1	JL,POROS Trans Kalimantan	Ds Talio	Pandih Btu	Telkomsel	Protelindo	-3,13071	114,119
2	Jl. Budi Utomo Rt 27/02	Ds Talio Muara	Pandih Batu	Telkomsel	Protelindo	-3,0905	114,106
3	Jl.Pembangunan I	Ds Pangkoh	Pandih Batu	Indosat	Indosat	-3,06252	114,154
4	Jl. Pembangunan I	Ds Pangkoh	Pandih Batu	Telkomsel	Telkomsel	-3,06252	114,156
5	Jl.Suka Lemu	Ds Pangkoh Hulu	Pandih Batu	Xl, axiata	Xl AXIATA	-3,06346	114,158
6	Jl.Poros Barito IV	Ds BelantiSiam	Pandih Batu	Telkomsel	Protelindo	-3,13389	114,188
7	Jl. Poros Cempaka Rt 17	Ds Belanti Siam	Pandih Batu	TELKOM SEL	Mitratel	-3,14774	114,199
	KEC. BANAMA TINGANG						
1	Jl,Lintas Palangka-Kurun	Ds Lawang Uru	Banama Tingang	Telkomsel	Telkomsel	-1,77759	113,950
2	Jl.Lintas Palangka-Kurun	Ds Pahanwan	Banama Tingang	Telkomsel	Telkomsel	-1,66850	113,944
3	Jl, Palangka Kuala Kurun Rt03	Ds Bawan	Banama Tingang	Telkomsel	Telkomsel	-1,61766	113,931
4	Jl. Palangka-Kuala Kurun	Ds Pangi	Banama Tingan	Telkomsel	Telkomsel	-1,55551	113,919
	KEC. JABIREN RAYA						

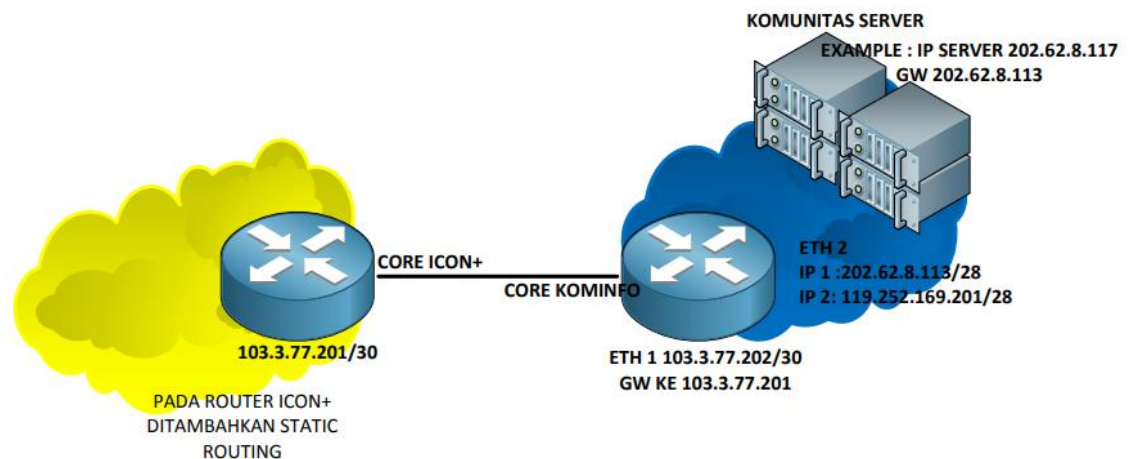
1	Jl. Trans Kalimantan RT 01	Ds. Henda	Jabiren Raya	Telkomsel	Telkomsel	-2,62295	114,206
2	Jl. Trans Kalimantan Km 68	Ds. Henda	Jabiren Raya	HCPT/Tre e,XL	HCPT/Tre e	-2,61000	114,207
3	Jl Trans Kalimantan	Ds. Jabiren Raya	Jabiran raya	Telkomsel	Telkomsel	-2,55140	114,191
	Jl. Trans Kalimantan Km 58	Ds. Jabiren Raya	Jabiren Raya	HCPT/Tre e	HCPT/Tre e	-2,54146	114,193
	Jl. Trans Kalimantan, Masjid Al Jabir	Ds. Jabiren Raya	Jabiren Raya	INDOSAT	TBG	-2,52808	114,190
	Jl. Trans Kalimantan RT 01	Ds. Pilang	Jabiran raya	HCPT/Tre e, INDOSAT	INDOSAT	-2,48365	114,193
	Jl. Temanggung Tambuan g, Belakang STO Pilang	Ds. Pilang	Jabiren Raya	XL AXIATA	XL, AXIATA	-2,47978	114,197
8	Jl. Jabiren STO Pilang	Ds. Pilang	Jabiren Raya	TELKOM SEL	TELKOM	-2,48117	114,192
9	Jl. Trans Kalimantan Km 35 Jembatan	Ds. Tumbang Nusa	Jabiren Raya	HCPT/Tre e	HCPT/Tre e	-2,42823	114,163
10	Jl. Trans Kalimantan Km 45 Jembatan Ujung Arah Palangka Raya	Ds. Tumbang Nusa	Jabiren Raya	XL AXIATA	XL AXIATA	-2,37676	114,127
11	Jl. Trans Kalimantan	Ds Tumbang Nusa	Jabiren Raya	Telkomsel	Telkomsel	-2,37657	114,125
12	Jl. Trans Kalimantan Km 26	Ds. Taruna	Jabiren Raya	HCPT/Tre e,XL	Protelindo	-2,33649	114,077
13	Jl. Trans Kalimantan Km 26	Ds. Taruna	Jabiren Raya	Telkomsel	Telkomsel	-2,32924	114,070

	KEC. SEBA- NGAU KUALA						
1	RT 01 RW 01	Ds. Mekar Jaya	Sebangau Kuala	Telkomsel	Telkomsel	-2,91934	113,815
2	PT. Suryamas Cipta Perkasa (SPC)	Ds. Paduran Sebangau	Sebangau Kuala	Telkomsel	Telkomsel	-3,03103	113,856

3.2.2 Arsitektur Infrastruktur Teknologi Informasi

a) Jaringan Lokal (LAN)

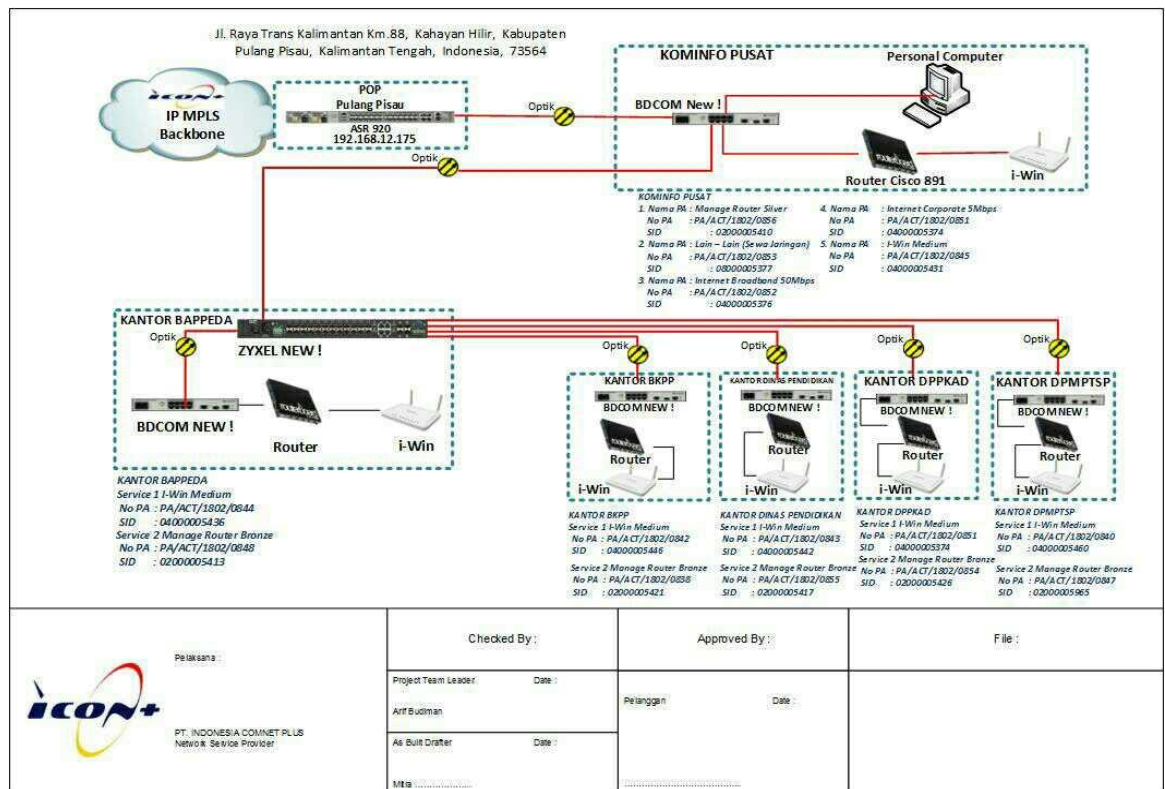
Secara umum di kabupaten pulang pisau interkoneksi LAN disediakan *bandwidth* internetnya oleh Diskominfo, statistik dan persandian, dengan provider ICON+. Adapun skema konektifitas backbone adalah sebagai berikut.



Gambar 2. Jaringan yang terpasang di Kabupaten Pulang Pisau

Setelah itu, *bandwidth* internet disebarkan ke kompleks perkantoran baru pemerintahan kabupaten Pulang Pisau dan ke

kantor-kantor pemerintahan kabupaten lainnya dikelurahan dan kecamatan dengan menggunakan jaringan radio sebagai berikut



Gambar 3. Topologi Jaringan ICON+ Kabupaten Pulang Pisau

b) Jaringan WAN

Kantor – kantor yang ada di kabupaten Pulang Pisau melakukan pelayanan pemerintah dengan koneksi internet menggunakan jaringan internet berbasis radio yang belum menerapkan jalur ganda untuk *backup* layanan. Saat ini koneksi internet di kantor-kantor SOPD di luar kawasan kompleks perkantoran dirasakan kurang memenuhi unsur keandalan yang baik. Adapun kondisi jaringan Internet saat ini di kantor Pemerintah Kabupaten di luar kompleks perkantoran Pulang Pisau diperlihatkan pada Gambar berikut.

3.2.3 Resume Kondisi Infrastruktur TI Eksisting

Berikut ini adalah simpulan dari kondisi infrastruktur TI yang ada saat ini ini :

1. Topologi jaringan lokal setiap SOPD masih bersifat heterogen dan belum mengikuti kaidah terstandarisasi sesuai dengan standard dan best practice yang ada.
2. Belum adanya manajemen untuk pengamanan informasi baik secara fisik maupun non fisik. Kebanyakan OPD belum secara terorganisasi menggunakan anti virus atau program untuk proteksi data lainnya.
3. Akses internet sudah menerapkan manajemen terpusat seperti penggunaan bandwidth manajemen, tetapi belum terpusat untuk penerapan Firewall dan Proxy.
4. Belum adanya proteksi terhadap keamanan jaringan internal dari masing-masing OPD.
5. Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System belum terimplementasi untuk mendeteksi dan mencegah ancaman dari jaringan internet yang mencoba masuk ke jaringan internal .
6. Government email untuk domain Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau belum terimplementasi dengan baik.
7. Saat ini sudah ada beberapa tempat untuk menyimpan beberapa server dan peralatan infrastruktur IT lainnya, tetapi belum memenuhi sebagai Data Center yang dapat digunakan sebagai tempat pengumpulan pusat Data dan Informasi untuk melayani keseluruhan kepentingan dari masing-masing OPD.

3.2.3.1 Analisis Kesenjangan Infrastruktur TI

Berikut ini adalah penjelasan hasil assesement kondisi infrastruktur IT saat ini.

Tabel 40. Dukungan infrastruktur TI Eksisting

NO	KATEGORI	ANALISA KONDISI UMUM	STATUS		
			Belum memadai	Cukup Memadai	Sudah Memadai
1.	Jaringan lokal	Jaringan backbone penghubung antar gedung di kompleks memerlukan fiber optic dengan jalur ganda, agar kapasitas dan ketersediaan jaringan backbone antar gedung tidak ada masalah. Pengalokasian IP Address di setiap gedung per lantainya perlu menggunakan VLAN, sehingga tingkat keamanan dan ketersediaan IP address terjamin. Konsep jaringan dibuat menggunakan metode hirarki 3 tingkat, dimana ada pemisahan antara lapisan core, distribusi dan akses.			
	a. Ketersediaan (availability)	Implementasi pembangunan jaringan dengan konsep model hirarki dan penerapan jalur ganda untuk backbone antar gedung di kawasan Diskominfo, statistik dan persandian membuat ketersediaan jaringan lokal bisa tercapai dengan baik.	√		
	b. Kapasitas	Penggunaan fiber optic, UTP cat 6 dan wireless menjamin kapasitas <i>bandwith</i> untuk jaringan lokal antar gedung di kawasan Diskominfo, statistic, dan persandian Pulang Pisau	√		
2.	Koneksi akses Internet	Jaringan internet memegang peranan penting sebagai penghubung dengan dunia luar. Saat ini <i>bandwith</i> internet tersedia dengan kapasitas cukup besar.			
	a. Kapasitas	Dengan <i>bandwith</i> internet saat ini maka jalur koneksi ke jaringan publik dapat terakomodasi dengan baik. penggunaan internet di Kantor telah bisa dimonitoring		√	

NO	KATEGORI	ANALISA KONDISI UMUM	STATUS		
			Belum memadai	Cukup Memadai	Sudah Memadai
		dengan baik menggunakan perangkat <i>Network Managemen System</i> (NMS). Pertumbuhan kebutuhan <i>bandwith</i> terhadap aplikasi yang dikembangkan masih dapat dipenuhi dengan baik.			
	b. Ketersediaan (<i>availability</i>)	Saat ini sudah ada jalur backup jaringan internet di Kantor Diskominfo, statistik, dan persandian. Jika jalur ini tiba-tiba terputus maka aktivitas pengguna yang menggunakan jalur internet untuk mendukung kegiatan operasional sehari-harinya di kantor tidak terganggu.	√		
3.	Koneksi akses jaringan komunikasi	Jaringan komunikasi internet berbasis Radio memegang peranan penting sebagai penghubung antar Kantor SOPD.			
	a. Kapasitas	Dengan <i>bandwith</i> untuk jalur komunikasi saat ini, pertumbuhan kebutuhan <i>bandwith</i> terhadap aplikasi yang dikembangkan masih dapat dipenuhi dengan baik.		√	
4.	Manajemen Jaringan	Penggunaan NMS di kantor memungkinkan monitoring jaringan secara terpadu. Saat ini penggunaan <i>bandwith</i> telah dapat dimonitoring dengan baik.	√		
5.	Data Center	Data Center Gedung Pusat .			

NO	KATEGORI	ANALISA KONDISI UMUM	STATUS		
			Belum memadai	Cukup Memadai	Sudah Memadai
	a. Kapasitas storage penyimpanan data	Data center yang ada telah menyiapkan media penyimpanan dan backup menggunakan SAN untuk kebutuhan penggunaan media saat ini.	√		
	b. Kapasitas Server Pemrosesan	Saat ini data center mengelola server yang dititipkan dari tiap OPD maupun server dari Data Center itu sendiri. Jumlah komputasi beban saat ini bisa ditangani dengan baik. Tetapi dimasa mendatang jika akan dilakukan implementasi <i>Green Computing</i> melalui Virtualisasi maka Kapasitas Komputasi harus ditingkatkan lagi.		√	

3.3 Organisasi dan Tata Kelola TI

Dalam mendapatkan *value* dari teknologi informasi yang ada di Kabupaten Pulang Pisau diperlukan tata kelola TI yang terdiri dari kepemimpinan, struktur organisasi dan proses TI. Struktur organisasi TI yang tidak atau kurang tepat serta kondisi SDM yang dialokasikan padanya baik dari segi kuantitas maupun kualitas (kompetensi) tentunya akan berdampak pada kemampuan TI dalam memberikan dukungan yang optimal terhadap pencapaian tujuan-tujuan yang ada di kabupaten Pulang Pisau.

Selain itu tata kelola TI (*IT Governance*) sangat menentukan efektifitas penerapan TI baik dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis maupun operasional.

3.3.1 Organisasi dan Tata Kelola TI Eksisting

Pada saat ini kabupaten Pulang Pisau memiliki tata kelola TI yang terdiri dari kepemimpinan, struktur organisasi dan proses TI sangat penting dalam memastikan mendapatkan *value* dari teknologi informasi. Struktur organisasi TI yang tidak atau kurang tepat serta kondisi SDM yang dialokasikan padanya baik dari segi kuantitas maupun kualitas (kompetensi) tentunya akan berdampak pada kemampuan TI dalam memberikan dukungan yang optimal terhadap pencapaian tujuan-tujuan.

Berdasarkan komponen tata kelola TI tersebut diatas, berikut adalah hasil asesmen tata kelola TIK untuk kondisi saat ini di setiap satuan kerja yang dilakukan melalui kuisioner dengan skala likert didapatkan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan TI secara terpusat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian belum sepenuhnya dilakukan.
- b. Keamanan Informasi dan tata kelola TI merupakan isu yang harus segera ditangani untuk kemajuan TI Kabupaten Pulang Pisau
- c. Struktur Organisasi dan Tata Kelola TI sudah menjadi tugas pokok dari Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian
- d. Data Policy, kebijakan pemanfaatan data terutama sebagai aset bernilai strategis dan ekonomi.
- e. Diperlukan organisasi TI yang mampu mengelola semua sumber daya TI (terutama SDM) yang melayani kepentingan seluruh organisasi dan stakeholdernya.
- f. Pengelolaan TIK sudah dipahami tetapi beberapa OPD belum dapat mendefinisikan bagaimana praktek TIK yang ada sehingga secara umum praktek pengelolaan TIK belum sepenuhnya dipahami dan dirasakan. Pada sisi lain beberapa OPD sudah memahami dan

menyetujui pentingnya pengelolaan TIK didefinisikan secara lebih rinci dan teknis.

- g. Arahana strategis terkait TIK sudah ada tetapi belum terstruktur dan terpoladengan baik sesuai dengan praktek terbaik industry yang sudah mengimplementasikan tata kelola TIK dengan baik dan sesuai dengan arahan strategis bisnis.
- h. Arsitektur Government belum banyak dipahami oleh sebagai OPD dan pemanfaatan lebih jauh dari implementasinya harus disosialisasikan dan dirasakan oleh pengguna TIK
- i. Pengelolaan Inovasi sudah dipahami oleh sebagian besar OPD tetapi melihat hasil kuisioner lainnya ada kesenjangan antara pemahaman ini dengan praktek implementasinya.
- j. Pengelolaan Portfolio proyek TIK belum dipahami benar siklusnya sehingga implementasinya mulai dari perencanaan sampai dengan penggelaran sebuah inisiatif proyek dapat dikelola dengan baik melalui proses monitoring dan evaluasi setiap inisiatif TIK yang diimplementasikan.
- k. Anggaran biaya Investasi TIK sangat besar kebutuhannya tetapi menjadi tantangan bagaimana menyiasati keterbatasan anggaran tersebut agar pengelolaan TIK dapat optimal
- l. Hubungan dengan mitra TIK sudah berjalan dan perlu peningkatan pengelolaan dalam kerangka menjaga dan meningkatkan kualitas luaran yang didefinisikan oleh para pemangku kepentingan dalam penggunaan dan pengelolaan TIK.
- m. Layanan TIK secara mendasar sudah dirasakan tetapi pola pengelolaan yang baku belum diterapkan sehingga adanya kesadaran akan pentingnya pengelolaan TIK harus dibarengi dengan layanan TIK yang standar dan sesuai dengan kebutuhan bisnis di Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
- n. Keamanan Informasi adalah isu yang penting untuk dikelola, dari sisi pemahaman pentingnya hal ini sudah didapatkan tetapi implemetasi

teknis pengamanan informasi perlu dikembangkan, didefinisikan dan diimplementasikan.

3.3.2 Standar Tata Kelola TI

COBIT 5 memberikan arahan kepada para eksekutif dan pihak yang bertanggung jawab membuat keputusan mengenai penggunaan teknologi dalam mendukung tujuan organisasi. COBIT 5 membantu para pemimpin bisnis memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan di perusahaan dan pada akhirnya memaksimalkan nilai dari informasi dan teknologi.

Menggunakan COBIT (*Control Objectives for Information and related Technology*) 5 sebagai kerangka kerja yang umum diadopsi untuk tata kelola teknologi informasi menyatakan bahwa tata kelola TI merupakan tanggung-jawab dari Dewan Direksi (Pimpinan Organisasi) dan Eksekutif Senior dan terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu: kepemimpinan, struktur organisasi dan proses-proses yang ada di Teknologi Informasi dan Komunikasi.

3.3.2.1 Kepemimpinan

Kabupaten Pulang Pisau memerlukan peran *leader* dalam pengelolaan TIK didefinisikan oleh seorang *executive director*. Berdasarkan telaah dari Magister Teknologi Informasi Universitas Gajahmada, peran, struktur dan tugas dari CIO level pemerintah (Government CIO) di level Pemerintahan Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

Konsep tentang Government CIO (GCIO) telah dikenal dan dipraktekkan secara luas di luar negeri. Di lingkungan Asia-Pasifik misalnya, forum APECTEL mendefinisikan peran GCIO dalam dua poin besar:

1. Government leadership in information and IT management and provision to support future projects for competitive business value
2. Management of daily delivery of IT/IS services

Definisi peran GCIO menurut APECTEL perlu disesuaikan dengan kondisi lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia, terutama di lingkungan pemerintah daerah. “Government leadership” harus diterjemahkan sebagai kepemimpinan yang mencakup seluruh struktur perangkat daerah. “Information and IT management provision” memang mutlak harus dilakukan, tentu dalam konteks lokal sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pemerintah kabupaten/kota. Hanya saja penyediaan informasi dan TIK tersebut harus ditempatkan dalam kerangka tugas lembaga-lembaga pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik.

Dalam konteks Indonesia, pada akhirnya peran GCIO tidak dapat dilepaskan dengan rencana pemerintah untuk menerapkan e-government di semua perangkat pemerintahan. Hampir semua lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, saat ini masih berada dalam tataran “mulai mengenal” pemanfaatan TIK untuk berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Kenyataan ini dicirikan dengan banyaknya program-program pengembangan TIK seperti pembuatan website, pengembangan sistem-sistem informasi, pembangunan jaringan komputer dan koneksi Internet, serta pelatihan SDM TIK. Semua program tersebut memang mengarah pada implementasi e-government, tetapi itu saja tidak cukup. Perlu ada “perekat” yang mengintegrasikan semua usaha tersebut dengan “roh” dari penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, karena pada akhirnya TIK hanyalah berfungsi sebagai enabler untuk menuju keadaan yang lebih baik.

Pada umumnya implementasi TIK yang efektif selalu memerlukan perubahan/penyelarasan pada aspek-aspek yang lain. Dalam konteks pemerintahan, implementasi TIK harus disertai juga penyelarasan tujuan dan sistem birokrasi yang ada. Pada kenyataannya, proses asimilasi TIK ke sistem birokrasi, atau bahkan reformasi sistem birokrasi itu sendiri sebagai syarat mengefektifkan implementasi TIK, tidaklah mudah dilakukan karena berbagai kendala. Dalam posisi inilah GCIO (dan staf

lain yang berperan sebagai information officers – IO) memegang peranan penting. GCIO (dan IO) berperan sebagai agent of change: menjadi promotor perubahan, menetapkan arahan dan kebijakan, dan merencanakan, mengeksekusi, serta mengevaluasi berbagai program yang terkait dengan implementasi TIK.

GCIO yang saat ini Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau ada pada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian. Pada Level dibawahnya ada pada tingkat kepala Bidang yang tugasnya bersifat manajemen operasional, dan mencakup perencanaan dan pengusulan program, eksekusi program, operasional, dan evaluasi program/kegiatan.

Agar kepemimpinan GCIO lebih efektif maka diperlukan adanya Komite Teknologi Informasi yang berperan dalam memastikan adanya keselarasan antara tujuan penggunaan teknologi informasi dengan tujuan dari organisasi yang memanfaatkan TI tersebut. Untuk saat ini di Komite Teknologi Informasi ini belum ada sehingga perlu segera dibentuk dan berperan efektif sesuai dengan tujuan di atas.

3.3.2.2 Struktur Organisasi TI

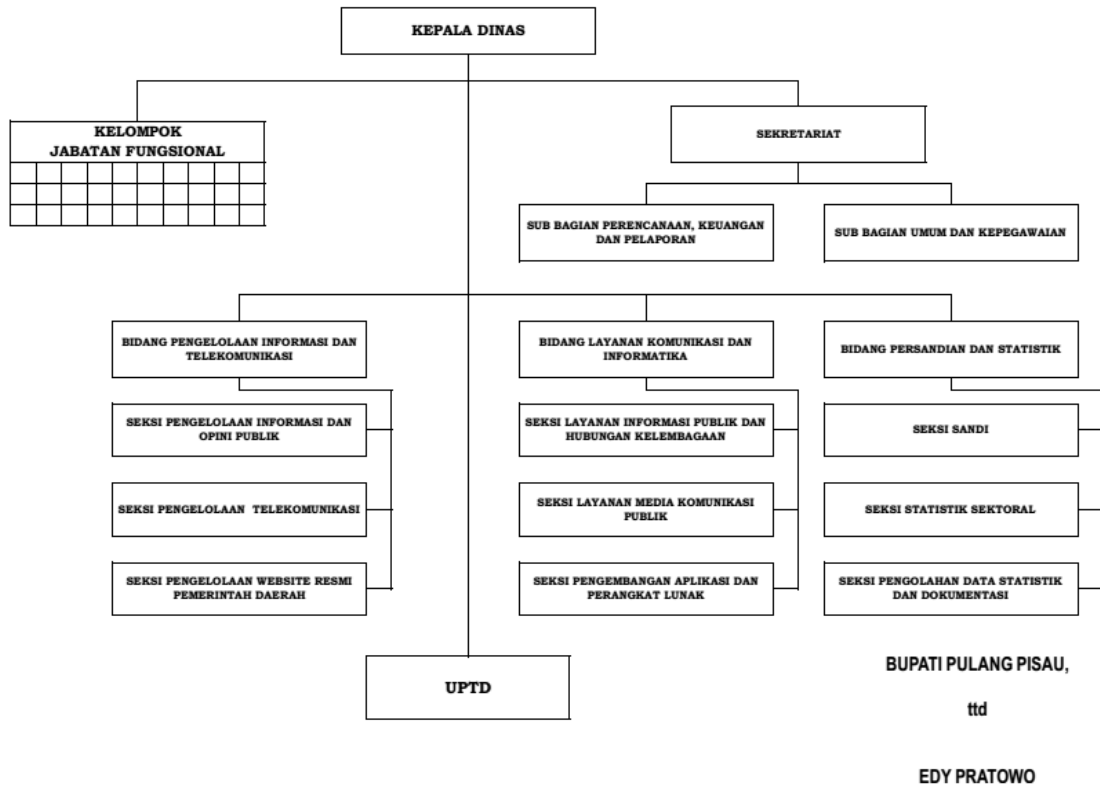
Organisasi TI merupakan satuan kerja dalam suatu instansi yang bertanggung-jawab dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan TI. Oleh karena itu maka dibutuhkan struktur organisasi yang tepat dan sumber daya manusia yang kuat pula.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika, berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 48 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

- c. Bidang Pelayanan Komunikasi dan Informatika:
 - 1) Seksi Layanan Informasi Publik dan hubungan Kelembagaan;
 - 2) Seksi Layanan Media Komunikasi Publik;
 - 3) Seksi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak
- d. Bidang Pengelolaan Informasi dan Telekomunikasi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik
 - 2) Seksi Pengelolaan Telekomunikasi
 - 3) Seksi Pengelolaan Website Resmi Pemerintahan Daerah
- e. Bidang Persandian dan Statistik :
 - 1) Seksi Sandi
 - 2) Seksi Statistik Sektoral
 - 3) Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Dokumentasi

Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4. Struktur Organisasi DISKOMINFO, Stastistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau

Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Organisasi Kabupaten Pulang Pisau

Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau dibentuk melalui Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda tersebut, Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

Tabel 41. Tugas dan Fungsi DISKOMINFO, Statistik dan Persandian

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Kepala Dinas	mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan	a. Pengendalian dan pengawasan Menara telekomunikasi; b. Pengawasan perangkat telekomunikasi; c. Pembinaan dan pengawasan peredaran media cetak dan media

		melaporkan seluruh kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan kewenangannya.	<p>elektronik;</p> <p>d. Pembinaan organisasi, kelompok, komunitas kreatif dan kemitraan bidang informasi dan komunikasi;</p> <p>e. Pengelolaan jaringan sandi daerah;</p> <p>f. Pengelolaan dan pengolahan data statistik lintas sektoral;</p> <p>g. Pengelolaan lembaga penyiaran pemerintah lokal radio handep hapakat;</p> <p>h. Pengelolaan website resmi pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;</p> <p>i. Pemberdayaan mas media elektronik dan cetak;</p> <p>j. Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama;</p> <p>k. Penyediaan papan informasi publik; dan</p> <p>l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
2	Sekretariat	mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.	<p>a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;</p> <p>b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;</p> <p>c. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;</p> <p>d. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;</p> <p>e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan</p>

			<p>Informatika, Statistik dan Persandian;</p> <p>f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan</p> <p>g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.</p>
2.1	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	merencanakan kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing, penyusunan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran, pembinaan bendaharawan, mengecek dan mengontrol, mengatur, menyiapkan dan menyusun data dari bidang sebagai bahan perencanaan dan anggaran dinas, serta menghimpun penyusunan pelaporan	<p>a. Mengumpulkan dan pensistematisasian data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;</p> <p>b. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;</p> <p>c. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;</p> <p>d. Melaksanakan pembelajaran dan penelaahan Peraturan Perundang-undangan mengenai keuangan;</p> <p>e. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA);</p> <p>f. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah;</p> <p>g. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>h. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>i. Melaksanakan pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>j. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban; dan</p> <p>k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.</p>

2.2	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, administrasi umum, tata usaha serta pengembangan sumber daya aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lainlain; b. Melaksanakan pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain; c. Melaksanakan penyelenggaraan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan menyelenggarakan tata usahanya; d. Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Aparatur; e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; f. Melaksanakan pengendalian arsip aktif, surat masuk dan surat keluar; g. Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat; h. Melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor; i. Menyiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan kantor; j. Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan; k. Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor; l. Menyiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); m. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor; n. Menyiapkan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan serta perlengkapan kantor; o. Melaksanakan pembuatan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
-----	---------------------------------	--	---

			<p>p. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan</p> <p>q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.</p>
3	Bidang Pengelolaan Informasi dan Telekomunikasi	melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan telekomunikasi serta tata kelola egovernment lingkup pemerintah daerah.	<p>a. Pengelolaan opini dan aspirasi publik skala daerah;</p> <p>b. Pengelolaan informasi dan telekomunikasi di lingkup pemerintah daerah;</p> <p>c. Pengelolaan website resmi pemerintah daerah;</p> <p>d. Pengkajian opini dan aspirasi publik yang beredar skala daerah;</p> <p>e. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan</p> <p>f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan.</p>
3.1	Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik	membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik	<p>a. Menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan informasi dan opini publik;</p> <p>b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan informasi dan opini publik skala daerah;</p> <p>c. Melakukan pengawasan/ pemantauan perkembangan aspirasi publik skala daerah;</p> <p>d. Melakukan dan mengatur kegiatan tatap muka dengan para wartawan, tokoh organisasi profesi yang menyangkut berbagai kebijakan pemerintah daerah;</p> <p>e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan</p> <p>f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.</p>
3.2	Seksi Pengelolaan Telekomunikasi	membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,	<p>a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan telekomunikasi;</p> <p>b. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pendirian BTS/Menara Telekomunikasi;</p> <p>c. Menyiapkan bahan pemberian</p>

		serta evaluasi, dan pelaporan di seksi Pengelolaan Telekomunikasi.	<p>rekomendasi izin pendirian dan melaksanakan pendataan menara jaringan network;</p> <p>d. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pendirian Radio Amatir dan Radio Antar Penduduk;</p> <p>e. Melakukan pendataan titik koordinat BTS/Menara Telekomunikasi;</p> <p>f. Melakukan pendataan radio amatir dan radio antar penduduk;</p> <p>g. Melakukan pengawasan dan pendataan kantor pos;</p> <p>h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan</p> <p>i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.</p>
3.3	Seksi Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Daerah	membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di seksi Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Daerah.	<p>a. Menghimpun dan menempatkan berbagai data dan informasi untuk pengolahan data elektronik;</p> <p>b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan website resmi pemerintah daerah;</p> <p>c. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat di website resmi pemerintah daerah;</p> <p>d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan</p> <p>e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.</p>
4	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan informasi publik, layanan media komunikasi publik, serta layanan	<p>a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan layanan informasi publik;</p> <p>b. Penyiapan bahan rencana pengembangan aplikasi;</p> <p>c. Penyiapan bahan rumusan kebijakan integrasi layanan publik dan pemerintahan;</p> <p>d. Penyediaan media komunikasi publik;</p> <p>e. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan</p>

		pengembangan aplikasi.	f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.
4.1	Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Kelembagaan	membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Kelembagaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan pelaksanaan desiminasi informasi nasional; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan desiminasi informasi skala daerah; c. Menyiapkan bahan penyediaan akses informasi publik; d. Menyiapkan bahan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Utama; e. Menyiapkan bahan rekomendasi pengembangan pelayanan di bidang informasi publik dan hubungan kelembagaan; f. Menyediakan layanan informasi publik melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau; g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.
4.2	Seksi Layanan Media Komunikasi Publik	membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Layanan Media Komunikasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala daerah; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala daerah; c. Melakukan pembinaan, pembimbingan dan penyuluhan kelompok informasi masyarakat (KIM); d. Menyiapkan bahan penyediaan akses media komunikasi publik; e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.
4.3	Seksi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak	membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pengembangan aplikasi dan perangkat lunak; b. Menyiapkan bahan pengkajian sistem aplikasi; c. Menyiapkan bahan kebutuhan perangkat lunak; d. Menyiapkan bahan pelaksana

		supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak.	<p>kerjasama dalam rangka pengembangan perangkat lunak;</p> <p>e. Menyiapkan bahan rekomendasi pengembangan pelayanan di bidang pengembangan aplikasi dan perangkat lunak;</p> <p>f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan</p> <p>g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.</p>
5	Bidang Persandian dan Statistik	melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sandi, statistik lintas sektoral, analisa, pengumpulan, pengolahan data dan dokumentasi.	<p>a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan sandi skala daerah;</p> <p>b. Pengendalian dan pengawasan jaringan sandi daerah;</p> <p>c. Penyiapan bahan pengumpulan data statistik sektoral;</p> <p>d. Penyiapan bahan pengolahan data statistik;</p> <p>e. Penyiapan bahan dokumentasi;</p> <p>f. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan</p> <p>g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.</p>
5.1	Seksi Sandi	membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Sandi.	<p>a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Sandi;</p> <p>b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Sandi;</p> <p>c. Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sandi;</p> <p>d. Melaksanakan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari Pusat atau Kabupaten / Kota;</p> <p>e. Menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan Sandi Pemerintah Daerah;</p> <p>f. Melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materiil Sandi;</p> <p>g. Memelihara, menyimpan dan</p>

			<p>mengamankan dokumen dan dan alat-alat Sandi serta mengembangkan sistem dan alat-alat Sandi;</p> <p>h. Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin sandi;</p> <p>i. Melakukan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian, untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas Sandi;</p> <p>j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan</p> <p>k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.</p>
5.2	Seksi Statistik Sektoral	Membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Statistik Sektoral.	<p>a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pelaksanaan statistik sektoral;</p> <p>b. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan statistik sektoral skala Daerah;</p> <p>c. Menyiapkan bahan koordinasi statistik lintas sektoral;</p> <p>d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan</p> <p>e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.</p>
5.3	Seksi Pengolahan Data Statistik dan Dokumentasi	membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Pengolahan Data Statistik dan Dokumentasi.	<p>a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengolahan data statistik dan dokumentasi;</p> <p>b. Menyiapkan bahan analisa data statistik;</p> <p>c. Menyiapkan bahan dokumentasi;</p> <p>d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan</p> <p>e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan</p>

3.4 Analisis Kondisi Umum Pengelolaan TIK Saat ini

Kondisi umum pengelolaan TIK saat ini bila dibandingkan dengan kerangka kerja, struktur fungsional tata kelola TI, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengembangan TIK didasarkan pada kebutuhan aplikasi/informasi dari OPD di lingkungan
- b. Tidak ada susunan prioritas pengembangan TIK dalam jangka panjang.
- c. Untuk fungsi kontrol seperti audit TI, *Quality Control* dan *Compliance* masih belum ada penugasannya. Inspektorat sebagai unsur pengawasan di lingkungan juga belum memiliki unsur audit TI.
- d. Fungsi operasional layanan TI terutama yang memberikan dukungan bagi user dalam penggunaan aplikasi, database dan infrastruktur TI masih belum ada atau belum jelas penugasannya.

Untuk dapat melaksanakan tata kelola TIK yang baik maka perlu dilakukan proses-proses pengelolaan TIK yang sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan asesmen yang dilakukan berikut hasil analisis yang terkait dengan proses-proses TIK yang ada saat ini (*existing*) di:

a) Kebijakan dan Prosedur TIK

- a. Kebijakan dan prosedur TIK harus didefinisikan ulang dengan akan adanya perubahan nomenklatur urusan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Kebijakan dan prosedur TIK yang sudah ada perlu dilakukan assessment kembali sesuai dengan perubahan organisasi, RPJMD dan perkembangan Teknologi.
- c. Kelengkapan kebijakan dan Prosedur TIK harus mengacu pada praktek terbaik industry khusus dapat menggunakan referensi dari beberapa standar seperti ITSM/ISO 2000, ISO 27000, dan juga

kerangka kerja COBIT 5 serta standar lainnya yang dapat digunakan dan sesuai dengan kebutuhan TIK

b) Pengadaan TIK

- a. Untuk pengadaan TI masih dilakukan oleh masing-masing OPD.
- b. Infrastruktur TI dikelola oleh Pusat Jaringan Komunikasi.
- c. Masing-masing pengadaan server dan aplikasi TI dilakukan oleh masing-masing OPD tanpa kewajiban memberitahukan kepada DISKOMINFO selaku pelaksana dan pengendali TI.

c) IT Service Management

- a. Belum ada layanan Help Desk/contact center untuk layanan TI. Untuk dukungan atas layanan TI masih langsung menghubungi Personil TI terkait. Karena pengadaan TI saat ini masih dilakukan sendiri oleh masing-masing OPD maka setelah operasional pun pengelolaannya tidak dilakukan oleh DISKOMINFO selaku pelaksana dan pengendali TI.
- b. Kesepakatan eksternal (SLA) antara lembaga sudah ada misalnya antara dengan BNPB, Inatews dan lain-lain.
- c. Aplikasi Help Desk sudah ada yang dibuat oleh pihak ketiga namun belum digunakan.
- d. Manajemen Layanan TI dan perangkatnya belum ada seperti Layanan Contact Center, katalog layanan TI, SLA/OLA internal belum tersedia.

d) Manajemen Layanan Pihak Ketiga

- a. Saat ini pengadaan layanan TI dilakukan oleh masing-masing OPD yang ada di Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau.
- b. Untuk layanan-layanan TI yang diberikan oleh pihak ketiga belum dilakukan secara terkoordinir dalam lingkup secara keseluruhan.

e) Manajemen Keamanan TI

- a. Inisiatif untuk menerapkan manajemen keamanan informasi belum dilakukan.
- b. Inisiatif tersebut perlu dilakukan guna memastikan bahwa sistem manajemen keamanan informasi yang dibangun memang sudah sesuai dengan kebutuhan dan memastikan bahwa aset-aset yang kritikal sudah diproteksi secara memadai. Sebagai contoh kelengkapan seperti *asset register* sebagai dokumen awal yang penting dalam manajemen keamanan informasi saat ini belum ada.

f) Manajemen Kelangsungan Organisasi

- a. Belum ada fasilitas DRC (Data Recovery Center)
- b. Belum ada rencana untuk menjamin keberlangsungan organisasi seperti DRP (disaster recovery planning) dan BCP (business continuity planning)

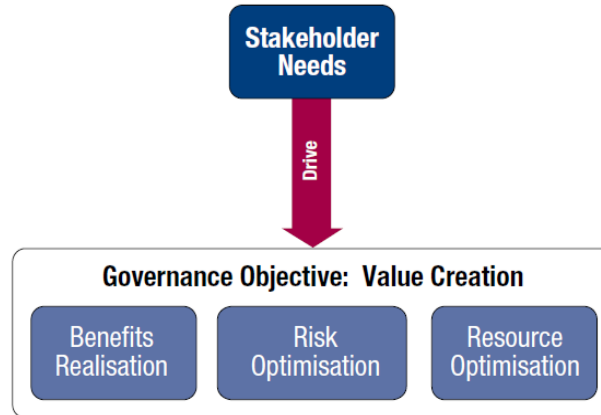
3.5 Strategi Pengembangan e- Government Kabupaten Pulang Pisau

3.5.1 COBIT 5

Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) merupakan sebuah framework untuk tata kelola teknologi informasi. COBIT dikeluarkan oleh ISACA, sebuah organisasi nirlaba untuk para profesional audit dan kontrol di bidang sistem informasi. Saat ini COBIT versi terakhir adalah COBIT 5.

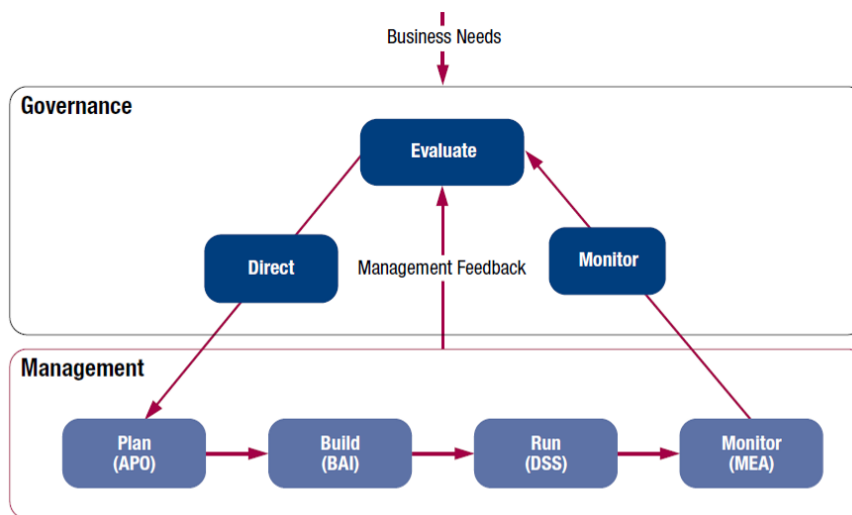
Sebagai framework tata kelola, COBIT 5 sangat fokus terhadap penciptaan nilai (*value creation*) dari teknologi informasi, sehingga diharapkan implementasi tata kelola TI yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan memberikan *value* yang nyata. Terdapat 3 (tiga) *value* yang ingin dicapai yaitu:

- Realisasi benefit
- Optimalisasi risiko
- Optimalisasi sumber daya



Gambar 5. Tujuan Implementasi Tata Kelola TI menurut COBIT 5

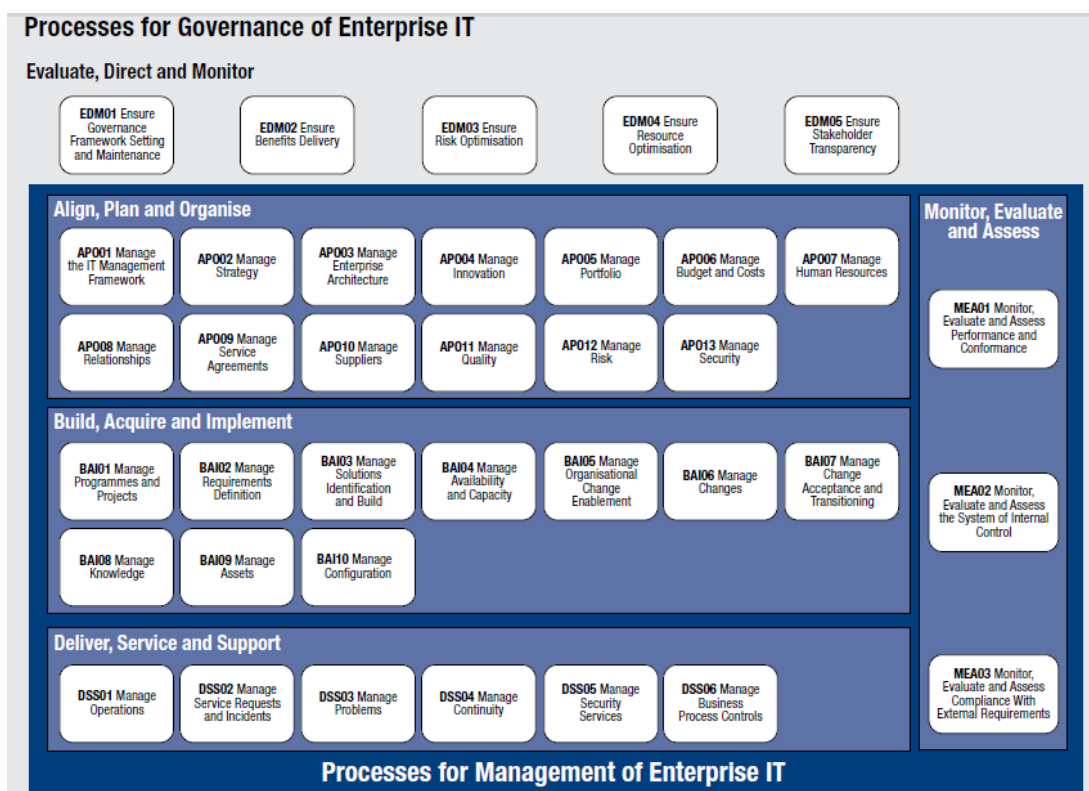
COBIT 5 telah memberikan pemisahan yang jelas antara domain governance (tata kelola) dengan domain manajemen teknologi informasi.



Gambar 6. Pemisahan Domain pada COBIT 5

Untuk melaksanakan tata kelola TI, COBIT 5 merekomendasikan sekumpulan proses TI yang berisi aktifitas-aktifitas yang terkait dengan

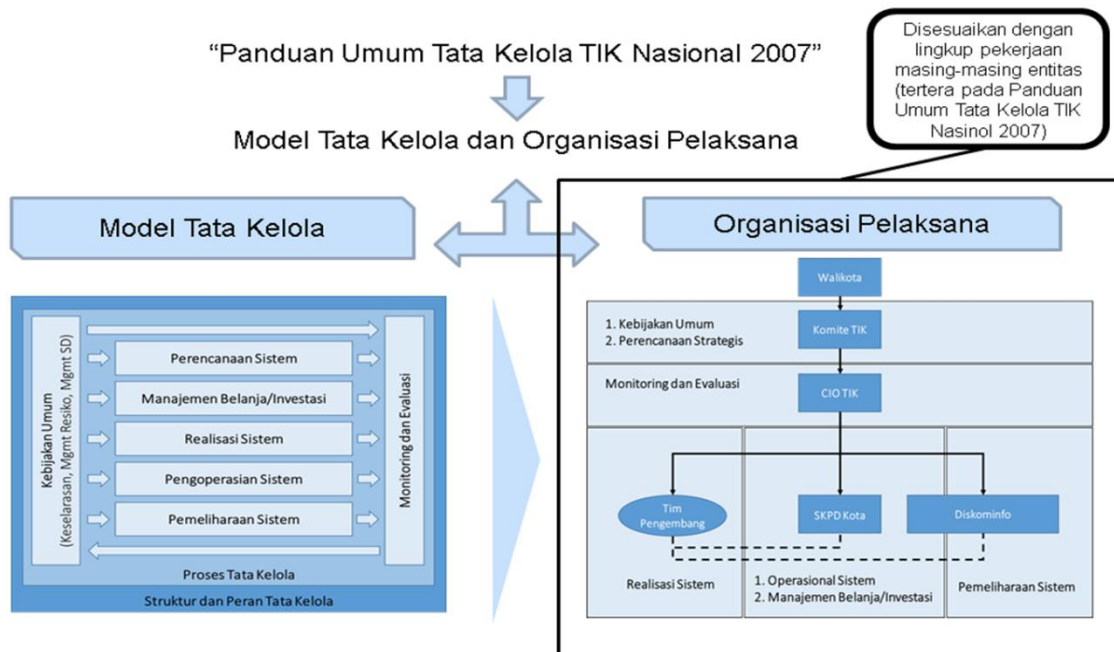
teknologi informasi. Pada praktiknya setiap organisasi dianjurkan untuk menyesuaikan proses-proses TI yang akan diterapkan dengan kebutuhannya masing-masing. Untuk mengetahui proses TI yang dibutuhkan itu maka dapat dilakukan *assessment* untuk mengetahui kondisi saat ini dan kebutuhan-kebutuhan yang ada yang perlu dipenuhi.



Gambar 7. Proses-Proses TI Berdasarkan COBIT 5

Pada penyusunan IT Blueprint ini COBIT 5 akan menjadi salah satu rujukan terutama dalam penyusunan tata kelola TI.

3.5.2 Standar TIK Nasional



Gambar 8. Panduan Tata-Kelola TIK Nasional 2007

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo nomor 41 tahun 2007 tentang Panduan Umum TIK Nasional. Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional akan digunakan sebagai prinsip dan panduan bagi setiap institusi pemerintahan dalam penggunaan sumber daya TIK di institusi masing-masing, sehingga memenuhi asas: efektivitas, efisiensi, dan akseptabilitas.

Tujuan Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional adalah memberikan batasan dan panduan bagi institusi pemerintahan dan entitas pengambil keputusan di dalamnya dalam pengelolaan sumber daya TIK.

Model Tata Kelola TIK Nasional difokuskan pada pengelolaan proses-proses TIK melalui mekanisme pengarahan dan monitoring & evaluasi. Pengelolaan TIK dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu:

1. Struktur & Peran Tata Kelola – yaitu entitas apa saja yang berperan dalam pengelolaan proses-proses TIK dan bagaimana pemetaan perannya dalam pengelolaan proses-proses TIK tersebut. Struktur dan peran tata kelola ini mendasari seluruh proses tata kelola TIK.
2. Proses Tata Kelola -- yaitu proses-proses yang ditujukan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan utama tata kelola dapat tercapai, terkait dengan pencapaian tujuan organisasi, pengelolaan sumber daya, dan manajemen risiko.

3.6 Referensi dan Asesmen Pita Lebar di Kabupaten Pulang Pisau

3.6.1 Referensi Pita Lebar

Dalam membangun suatu perkotaan maupun pedesaan diperlukan suatu infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Utilitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi berbasis pita lebar (*broadband*), menjadikan penyediaan, pengolahan dan pendistribusian informasi dilakukan secara lebih cepat, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, sehingga informasi tersebut tidak kehilangan nilai dan bahkan dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Dalam rangka mendorong pemanfaatan Pitalebar, dunia internasional, baik tataran global maupun regional (ASEAN) menetapkan berbagai sasaran antara lain : mendorong ketersediaan (*availability*), jangkauan layanan (*accessibility*), dan keterjangkauan harga (*affordability*).

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 (RPI) atau juga dikenal dengan Indonesia Broadband Plan, secara jelas mendorong peran pemerintah daerah ditingkat provinsi dan kabupaten / kota untuk berperan aktif dalam pembangunan dan penyediaan sarana infrastruktur telekomunikasi tetap berbasis pita lebar (*broadband*). Peranan pemerintah daerah dalam penyediaan utilitas infrastruktur telekomunikasi tetap diprogramkan untuk mendorong percepatan penyebaran akses telekomunikasi secara merata, sehingga

seluruh wilayah / daerah memiliki akses telekomunikasi untuk percepatan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi regional. Masyarakat ditingkat perkotaan dan pedesaan memiliki sarana akses yang sama dan merata ke jaringan internet. Pertumbuhan ekonomi regional dapat didorong dengan memanfaatkan infrastruktur TIK, sehingga memiliki peluang dan akses yang sama ke jaringan ekonomi secara global. Pemerintah daerah selaku pemegang regulasi dalam perencanaan pembangunan kewilayahan memiliki kewajiban dalam perencanaan pembangunan dan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dengan persebaran cakupan area layanan secara adil dan merata.

Pemerintah pusat secara komprehensif telah merumuskan program nasional Rencana Pita Lebar Indonesia (RPI) dengan sasaran dapat memberikan arah dan panduan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan Pitalebar dalam upaya mendorong percepatan pembangunan nasional. Program Rencana Pita Lebar Indonesia (RPI) secara terstruktur, terintegrasi dan komprehensif disusun sesuai dengan karakteristik geografis dan berbasis kewilayahan yang harus dicapai secara nasional dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

Dalam sudut pandang pemerintah (daerah) RPI berfungsi sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan dan rencana tindak percepatan dan perluasan Pembangunan Pitalebar Indonesia pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dipahami sepenuhnya bahwa Pulang Pisau dengan jumlah penduduk yang mencapai 46 juta lebih (hampir 1/5 populasi penduduk Indonesia), serta berbagai infrastruktur strategis dan kawasan industri yang berada didalamnya merupakan potensi pasar tersendiri bagi pembangunan infrastruktur telekomunikasi, dalam hal ini adalah

pembangunan infrastruktur/prasarana pasif berupa jaringan kabel serat optik melalui pembangunan/pemanfaatan ducting bersama (share duct);

Dengan tersedianya ducting maka memungkinkan penggelaran kabel serat optik di sepanjang jalan yang bersangkutan dan tanpa harus selalu melakukan gali-lubang tutup-lubang di jalan yang bersangkutan.

Penggelaran kabel serat optik oleh para penyelenggara/operator telekomunikasi dengan demikian relatif lebih efektif dan efisien karena ditempatkan dalam ducting bersama yang sudah ditanam sedemikian rupa sehingga wilayah kota tetap terjaga estetikanya.

3.6.2 Asesmen BUMD Pita Lebar

Pengembangan dan pengelola infrastruktur telekomunikasi dibentuk atas dasar kepentingan dan kondisi yang ada di kabupaten Pulang Pisau, secara umum dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden (PERPRES) No. 96 Tahun 2014 dan Arah Panduan Strategis dalam percepatan dan perluasan Rencana Pita Lebar Indonesia (RPI / Broadband Telecommunication) dalam kerangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 dan implementasi MP3EI tahun 2011 – 2025 mengamanatkan upaya mendorong peran aktif pemerintah daerah dan BUMD dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi pasif dalam percepatan persebaran dan pemerataan area cakupan wilayah layanan infrastruktur telekomunikasi di daerah.
2. Peluang investasi dan pengusaha infrastruktur telekomunikasi daerah berbasis pita lebar (RPI) oleh pemerintah daerah maupun BUMD melalui pola pemanfaatan sumberdaya infrastruktur secara bersama (share) oleh seluruh operator telekomunikasi secara bisnis

sangat menarik dan atraktif dan sangat berpotensi memberikan pendapatan asli daerah (PAD) yang berkelanjutan (suistunable) kepada pemerintah daerah dari sector telekomunikasi.

3. Pertumbuhan pengguna layanan telekomunikasi diwilayah Pulang Pisau sangat pesat dan besar, sehingga pemerintah daerah didorong bersifat kreatif dan inovatif menggalang potensi pendapatan asli daerah bukan pajak (PAD) dari pesatnya masyarakat pengguna layanan telekomunikasi diwilayahnya.
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian dari pemerintah daerah dianggap sebagai institusi dan unit usaha yang bersifat netral, diakui dan diterima oleh seluruh operator dan provider telekomunikasi untuk menjadi mitra strategis dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi daerah melalui pola penggunaan sarana infrastruktur secara bersama (resources sharing).
5. Pemerintah daerah ditingkat kota dapat memiliki posisi dan peran yang kuat dalam pengaturan dan pengendalian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dalam menata keindahan, keamanan dan kenyamanan kota.
6. Pemerintah daerah dapat mendorong percepatan persebaran dan pemerataan cakupan area layanan (*Coverage Area*), sehingga seluruh wilayah memiliki peluang akses dan kelengkapan utilitas infrastruktur telekomunikasi yang sama untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara regional.
7. Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi daerah bersama, dapat mendorong terbentuknya aliansi bisnis bersama antara BUMD milik pemerintah kota dalam menggalang program investasi, pembangunan dan pengusahaan infrastruktur telekomunikasi bersama berbasis pita lebar (broadband), sehingga secara maksimal dapat mengupayakan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang berkelanjutan dari pesatnya pertumbuhan

masyarakat pengguna jasa layanan telekomunikasi di wilayah daerah Pulang Pisau.

3.6.3 Sasaran Prioritas Pembangunan Pita Lebar

a. e-Logistik

1. e-Logistik ditujukan untuk mendukung pemantauan dan pertukaran data yang terkait dengan ketersediaan bahan pokok makanan dan industri, kelangkaan suatu barang, dan kebutuhan armada pengangkutan untuk logistik.
2. Tantangan pengembangan e-Logistik antara lain belum terpadunya berbagai sistem informasi logistik.

b. e-Pengadaan

Pembangunan dan pengembangan Pita lebar pada sektor e-Pengadaan ditujukan untuk :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
4. Mendukung proses monitoring dan audit;
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi secara real time. Tantangan pengembangan e-Pengadaan antara lain:
 - a) ketersediaan konketivitas kualitas tinggi dengan sistem keamanan yang handal;
 - b) kesenjangan digital antar daerah yang dapat menghambat proses pengadaan; dan
 - c) ketersediaan standar tentang prasarana dan aplikasi untuk memastikan kompatibilitas sistem.

c. e-Pemerintahan

1. e-Pemerintahan ditujukan untuk memperkuat dan meningkatkan efisiensi proses internal pemerintah (back office) yang tersebar di lebih dari 70 instansi pemerintah pusat, dan 500 instansi pemerintah daerah.
2. Tiga layanan pokok yang memerlukan dukungan Pitallebar adalah birokrasi, keuangan, dan keterhubungan dengan pemerintah daerah.
3. Tantangan pengembangan e-Pemerintahan untuk birokrasi antara lain:
 - a) keragaman petunjuk pelaksanaan e-Pemerintahan;
 - b) implementasi e-Pemerintahan yang masih dalam tahap digitalisasi sehingga belum terjadi transformasi proses bisnis;
 - c) duplikasi program dan investasi instansi pemerintah; dan
 - d) keterbatasan pegawai/pejabat pemerintah yang memahami TIK.
4. Tantangan pengembangan e-Pemerintahan untuk keuangan, antara lain :
 - a) memiliki banyak instansi yang harus dihubungkan dengan sistem pusat data; dan
 - b) memerlukan pusat data dengan tingkat keamanan yang sangat baik.
5. Tantangan pengembangan e-Pemerintahan untuk keterhubungan dengan pemerintah daerah antara lain :
 - a) pengendalian pelaksanaan program secara terpusat perlu dikembangkan; dan
 - b) agenda pembangunan nasional yang dicantumkan dalam

RPJMN harus dikaitkan dengan program pembangunan di daerah.

d. e-Pendidikan

1. e-Pendidikan ditujukan untuk pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia melalui pendistribusian dan pertukaran materi ajar, serta peningkatan kualitas proses belajar mengajar melalui eksplorasi informasi dan virtualisasi materi ajar.
2. Tantangan pengembangan e-Pendidikan antara lain :
 - a) keterbatasan jaringan Pitalebar ke sekolah dan perguruan tinggi;
 - b) fokus belum menyentuh pemanfaatan penggunaan TIK; dan
 - c) kebutuhan penyimpanan data berkapasitas besar.

e. e-Kesehatan

1. e-Kesehatan ditujukan untuk memberikan konsultasi dan pendampingan jarak jauh langsung dari dokter atau ahli medik yang berkualitas kepada semua Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia.
2. Tantangan pengembangan e-Kesehatan antara lain :
 - a) tidak adanya sistem e-Kesehatan yang terpadu;
 - b) rendahnya kualitas akses TIK; dan
 - c) perlindungan data pasien dan pengelolaan data kesehatan yang bersifat rahasia dan strategis.

BAB IV

INISIATIF DAN CETAK BIRU APLIKASI e- GOVERNMENT

4.1 Ringkasan Layanan Pemerintahan terkait kondisi Aplikasi Eksisting

Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan berikut ini adalah kondisi umum yang terdapat pada sistem aplikasi yang dikelola di saat ini:

1. Pemanfaatan Data

Data yang terdapat diberbagai sumber yang telah dikumpulkan belum dimaanfaatkan secara optimal. Masih banyak data yang hanya disimpan (diarsipkan) disejumlah tempat penyimpanan yang ada namun belum digunakan dengan semestinya.

2. Ketersediaan Aplikasi

Untuk mendukung proses bisnis ketersediaan aplikasi masih saat kurang sehingga perlu dilakukan perhitungan prioritas pengadaan terhadap aplikasi tersebut. Pencapaian tujuan dan sasaran fungsi bisnis akan terhambat apabila aplikasi ini belum ada.

3. Integrasi Sistem

Kondisi aplikasi yang ada dipemerintahan kabupaten pulang pisau sebagian besar belum dikelola dan terintegrasi dengan baik. Hal ini menyebabkan antara lain:

a. Terjadi redundansi data

Terdapat data yang sama dibutuhkan di beberapa sistem namun belum terintegrasi dengan baik, maka dibutuhkan pengelolaan data yang sama di beberapa sistem yang berbeda. Selain itu tidak efisien dalam penggunaan sumber dayanya, hal ini juga menyebabkan perlunya dilakukan rekonsiliasi terhadap data yang sama tersebut yang dikelola oleh beberapa sistem yang berbeda yang ada di setiap SOPD yang ada di Pemerintahan kabupaten Pulang Pisau.

b. Integritas data rendah

Data yang terdapat di Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau perlu dilakukan entri ulang (baik itu manual ataupun menggunakan tool) di sistem aplikasi lain yang membutuhkan datanya karena sistem yang ada belum terintegrasi dengan baik.

c. Manfaat dari sistem menjadi belum optimal

Karena sistem yang ada belum terintegasi, maka value dari sistem secara individual maupun kolektif juga tidak optimal. Sistem masih banyak dikelola secara terfragmentasi.

4. Sistem Tumpang Tindih

Karena sistem yang ada belum terintegrasi, sehingga masih banyak sistem aplikasi yang memiliki peran dan fungsi yang mirip yang berjalan yang dihasilkan dari beberapa inisiatif.

5. Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan

Belum memadainya sistem pengambilan keputusan yang diperlukan di lingkungan. Padahal data yang dimiliki oleh berpotensi untuk mendukung pengambilan keputusan-keputusan seperti untuk pertanian, pertanian/hortikultura, transportasi, pertahanan, dll.

6. Fungsionalitas Sistem

Masih cukup banyak fungsi bisnis yang dikelola belum didukung oleh Sistem Aplikasi secara memadai.

4.2 Kebutuhan Pengembangan Aplikasi di Periode 2018 -2023

Kebutuhan yang perlu untuk tersedia berdasarkan situasi dan kondisi saat ini, yaitu:

- a. Perpajakan dan retribusi
- b. Bisnis dan Investasi
- c. Publikasi informasi umum dan pemerintahan
- d. Sistem pendukung keputusan
- e. Kolaborasi dan koordinasi
- f. Manajemen pelaporan pemerintahan
- g. Sistem administrasi DPRD
- h. Sistem Pemilu daerah
- i. Sistem promosi pariwisata
- j. Sistem pemberdayaan IKM & UKM
- k. Sistem pelayanan kesehatan online
- l. Sistem pelayanan pendidikan online
- m. Sistem pelayanan ketenaga-kerjaan online
- n. Sistem pelayanan jarring pengaman sosial online.
- o. Sistem pengendalian sampah perkotaan
- p. Sistem pengendalian lalu-lintas dan kemacetan
- q. Sistem Pengaduan Masyarakat

4.3 Cetak biru Inisiatif Aplikasi dan Perawatan (*Maintenance*) Aplikasi

4.3.1 Business Process Re-Engineering

4.3.1.1 Analisis Terhadap 6 Masalah Aplikasi Eksisting

1. Pemanfaatan Data
2. Ketersediaan Aplikasi
3. Integrasi Sistem
4. Sistem Tumpang Tindih
5. Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan
6. Fungsionalitas Sistem

Karena masalah yang sama selalu terjadi, maka perlu dilakukan pendekatan baru terhadap aliran kerja dan proses bisnis yang ada di kabupaten Pulang Pisau

4.3.1.2 Pengertian Business Process Re-Engineering (BPR)

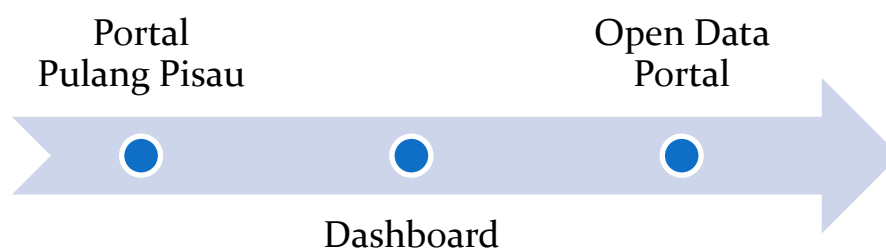
Business process reengineering (BPR) adalah praktik memikirkan ulang dan mendesain ulang cara kerja dilakukan untuk lebih mendukung misi organisasi dan mengurangi biaya. Reengineering dimulai dengan penilaian tingkat tinggi terhadap misi organisasi, tujuan strategis, dan kebutuhan pelanggan. Pertanyaan dasar diajukan, seperti "Apakah misi kita perlu didefinisikan ulang? Apakah sasaran strategis kita selaras dengan misi kita? Siapakah pelanggan kita?" Suatu organisasi mungkin menemukan bahwa operasinya beroperasi berdasarkan asumsi yang dipertanyakan, terutama dalam hal keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Baru setelah organisasi memikirkan kembali apa yang seharusnya dilakukan, apakah terus menentukan cara terbaik untuk melakukannya.

Dalam kerangka penilaian dasar misi dan sasaran ini, rekayasa ulang berfokus pada proses bisnis organisasi - langkah dan prosedur yang mengatur bagaimana sumber daya digunakan untuk menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau pasar tertentu. Sebagai penataan urutan langkah kerja secara terstruktur sepanjang waktu dan tempat, proses bisnis dapat didekomposisi menjadi aktivitas spesifik, diukur, dimodelkan, dan ditingkatkan. Hal ini juga dapat sepenuhnya didesain ulang atau dihilangkan sama sekali. Re-engineering mengidentifikasi, menganalisis, dan mendesain ulang proses bisnis inti organisasi dengan tujuan untuk mencapai peningkatan dramatis dalam ukuran kinerja penting, seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan.

4.3.1.3 BPR untuk Pengembangan Aplikasi Baru

Kabupaten Pulang Pisau mempunyai masalah yang sama selalu terjadi, maka perlu dilakukan pendekatan baru untuk pengembangan aplikasi baru, antara lain: Inisiatif 3 Portal e-Government, Inisiatif Integrasi Data via GSB & ETL, Inisiatif Datamart dan Data Warehouse, Inisiatif GRC dan 3 Tahap E-Government, dan Inisiatif Business Intelligence.

4.3.2 Inisiatif Ide e-Government



Gambar 9. Inisiatif Tiga Portal

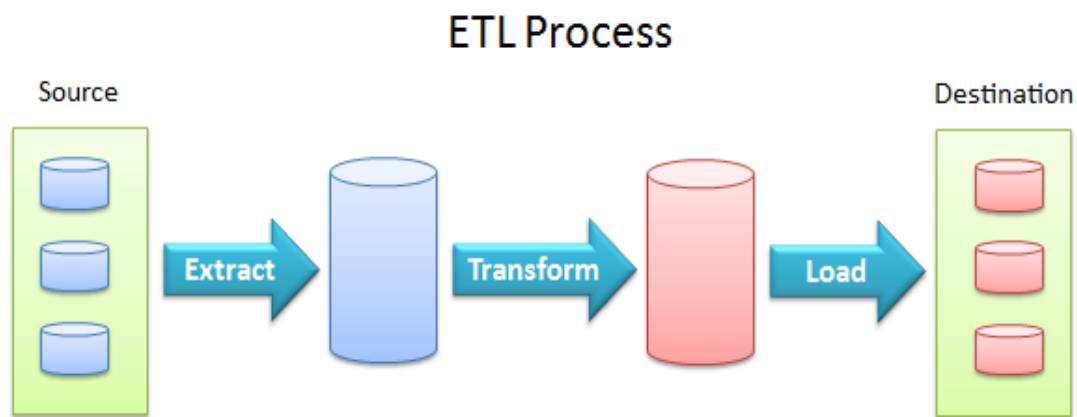
Sistem e-Government yang akan dibangun di Kabupaten Pulang Pisau haruslah memenuhi kebutuhan seluruh stake holder Kabupaten Pulang Pisau, yaitu dengan memiliki 3 portal untuk setiap kelompok pengguna, yaitu:

1. Inisiatif Dashboard EIS (Executive information System), untuk Pimpinan daerah, termasuk Bupati dan Anggota DPRD, serta tim kerja pendukung untuk pengambilan keputusan.
2. Inisiatif Open Data Portal, yang menyediakan layanan open data untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan fungsi dan manfaat kinerja pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau secara keseluruhan.
3. Inisiatif Portal Pulang Pisau Smart City, untuk digunakan oleh masyarakat dalam rangka menggalang kolaborasi masyarakat, dan memberikan pelayanan lewat aplikasi E-Layan Kabupaten Pulang Pisau, serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh komponen masyarakat (Business & Citizen).

4.3.3 Inisiatif Integrasi Data Via GSB dan ETL

Sehubungan dengan pola kerja baru yang berbasis kolaborasi antar OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, maka data OPD yang dikerjasamakan akan dibuka lewat GSB (Government Service Bus) dan ditransformasikan menjadi kumpulan data tunggal dengan proses ETL (Extract, Transform, Load) dalam sebuah inisiatif Aplikasi-Platform e-Government.

Skema fungsi GSB dan ETL bisa dilihat pada gambar berikut:

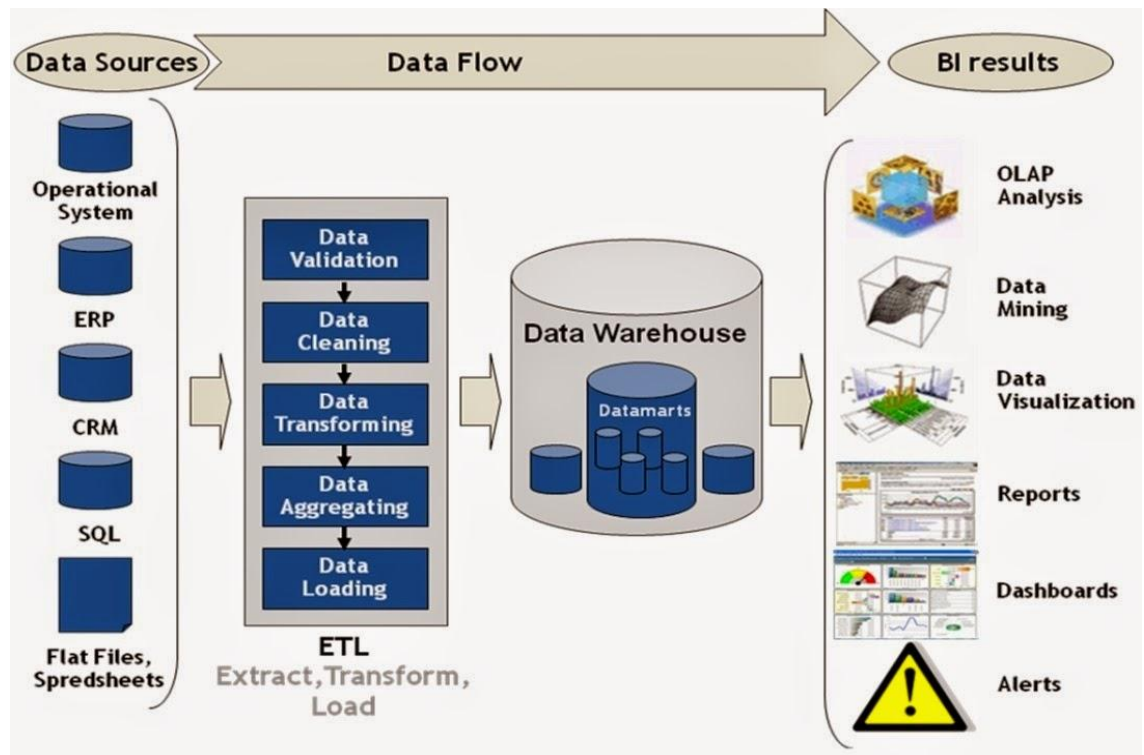


Gambar 10. Skema Fungsi GSB dan ETL

4.3.4 Inisiatif Datamart dan Data Warehouse

Kumpulan data tunggal yang merupakan hasil dari GSB dan ETL, akan dikelola lewat sejumlah Datamart untuk selanjutnya diintegrasikan dalam sebuah Inisiatif Data Warehouse sebagai Pusat Repository Data Pemerintahan di Kabupaten Pulang Pisau. Selanjutnya Data Warehouse ini haruslah dikelola dengan standar keamanan informasi yang memenuhi persyaratan ISO 27000.

Skema data dalam datamart dan data warehouse bisa dilihat pada gambar berikut:



Gambar 11. Skema Fungsi Datamart dan Data Warehouse

4.3.5 Inisiatif GRC dan Empat Tahap Implementasi E-Government

Inisiatif Aplikasi GRC dan tiga tahap e-Government adalah langkah-langkah penting dalam penerapan sistem e-Government di Kabupaten Pulang Pisau.

4.3.5.1 Definisi GRC dan Manfaatnya

GRC adalah kepanjangan dari *Governance, Risk management and Compliance*, atau dalam bahasa Indonesia disebut Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (GRC) adalah tiga aspek terkait yang membantu memastikan sebuah organisasi memenuhi tujuannya. Tata kelola adalah gabungan antara proses yang dibuat dan dijalankan oleh direksi (atau dewan direksi) yang tercermin dalam struktur organisasi dan bagaimana pengelolaannya dan mengarah pada pencapaian tujuan. Manajemen risiko meramalkan dan mengelola risiko yang dapat menghambat organisasi

untuk mencapai tujuannya. Kepatuhan mengacu pada kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, undang-undang dan peraturan perusahaan.

GRC adalah disiplin yang bertujuan untuk menyinkronkan informasi dan aktivitas lintas tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan agar beroperasi lebih efisien, memungkinkan berbagi informasi yang efektif, melaporkan kegiatan dengan lebih efektif dan menghindari tumpang tindih. Meskipun ditafsirkan secara berbeda di berbagai organisasi, GRC biasanya mencakup kegiatan seperti corporate governance, Government risk management (ERM) dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Pulang Pisau adalah organisasi dengan ukuran cukup besar, dimana kontrol terkoordinasi atas kegiatan GRC diperlukan untuk beroperasi secara efektif. Masing-masing dari ketiga disiplin ilmu ini menciptakan informasi bernilai bagi dua lainnya, dan ketiganya berdampak pada teknologi, orang, proses dan informasi yang sama.

Konsep Dasar dari GRC

Governance (Tata kelola) menggambarkan keseluruhan pendekatan manajemen dimana eksekutif senior mengarahkan dan mengendalikan keseluruhan organisasi, menggunakan kombinasi informasi manajemen dan struktur kontrol manajemen hirarkis. Kegiatan pengelolaan memastikan bahwa informasi manajemen penting yang mencapai tim eksekutif cukup lengkap, akurat dan tepat waktu untuk memungkinkan pengambilan keputusan manajemen yang tepat, dan menyediakan mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa strategi, arahan dan instruksi dari manajemen dilakukan secara sistematis dan efektif.

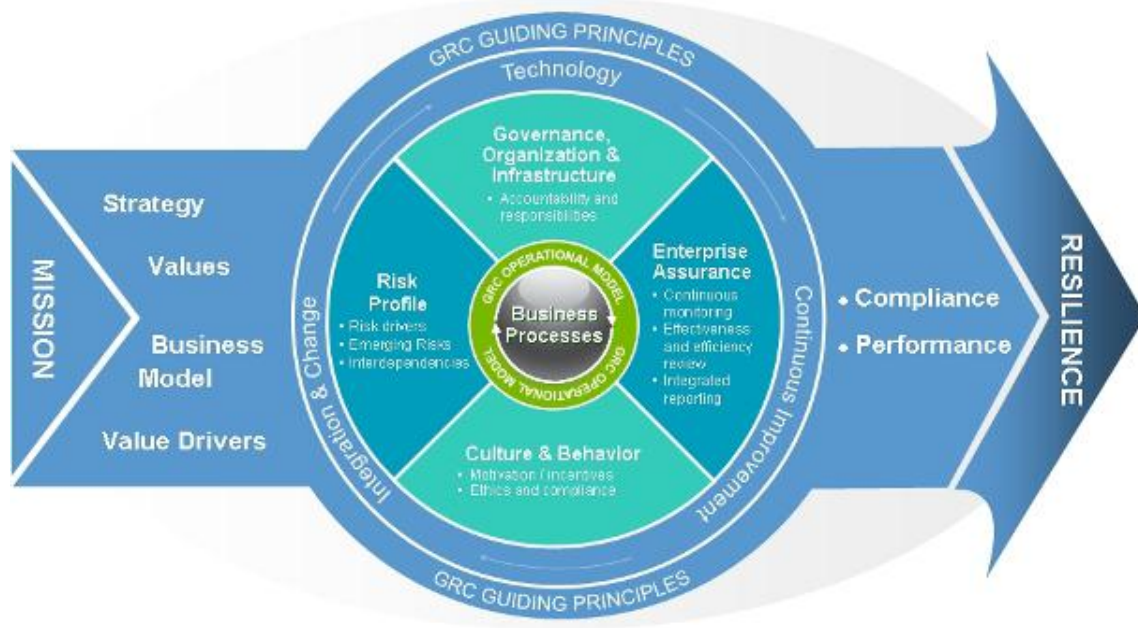
Tata kelola manajemen risiko adalah perhatian yang diberikan untuk mencegah manajemen risiko yang berlebihan dengan mengingat selera akan risiko organisasi. Penanggulangan yang memadai diperlukan

daripada tindakan berlebihan, tidak perlu dan tidak berarti. Risiko pengelolaan risiko adalah niat baik menjadi pemborosan atau hambatan bagi pertumbuhan, inovasi dan peluang.

Risk Management (Manajemen risiko) adalah serangkaian proses dimana manajemen mengidentifikasi, menganalisis, dan, jika perlu, merespons secara tepat risiko yang dapat mempengaruhi realisasi tujuan bisnis organisasi. Respon terhadap risiko biasanya bergantung pada gravitasi yang dirasakan, dan melibatkan pengendalian, penghindaran, penerimaan atau pemindahan ke pihak ketiga. Sedangkan organisasi secara rutin mengelola berbagai risiko (misalnya risiko teknologi, risiko komersial / keuangan, risiko keamanan informasi, dll.), Risiko kepatuhan hukum dan peraturan eksternal dapat dibilang merupakan isu utama dalam GRC.

Compliance (Kepatuhan) berarti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pada tingkat organisasi, hal itu dicapai melalui proses manajemen yang mengidentifikasi persyaratan yang berlaku (didefinisikan misalnya dalam undang-undang, peraturan, kontrak, strategi dan kebijakan), menilai keadaan kepatuhan, menilai risiko dan biaya potensial ketidakpatuhan terhadap Biaya yang diproyeksikan untuk mencapai kepatuhan, dan dengan demikian memprioritaskan, mendanai dan melakukan tindakan perbaikan yang dianggap perlu.

Berikut adalah skema fungsi GRC dalam sebuah organisasi



Gambar 12. Skema Fungsi GRC

4.4 Empat Tahap Implementasi e-Government

Sistem e-Government untuk kabupaten Pulang Pisau perlu dibangun dari kondisi aplikasi eksisting, yang dikembangkan agar berfungsi maksimal sesuai kebutuhan, sebagai berikut:

Tahap 1 : Pembuatan modul Keuangan & Penganggaran, modul Kolaborasi Masyarakat, dan Modul Pelayanan

Tahap 2 : Modul Pemerataan, dan modul Kinerja Kota & Pemerintahan

Tahap 3 : Modul Business Intelligence, dan Modul manajemen SDM

Tahap 4 : Modul pemasaran potensi kota, dan modul pengelolaan kekayaan Kota

4.5 Visi e-Government untuk Kabupaten Pulang Pisau

Dari empat tahap e-Government di atas, ditambah adanya kebutuhan Business Intelligence sebagai bagian dari sistem e-Government, maka keseluruhan skema e-Government untuk Kabupaten Pulang Pisau bisa dilihat sebagai berikut

4.5.1 Inisiatif *Business Intelligence*

Business Intelligence (BI) terdiri dari strategi dan teknologi yang digunakan oleh organisasi besar seperti perusahaan dan pemerintah untuk analisis data informasi bisnis. Teknologi BI memberikan pandangan historis, terkini dan prediksi tentang operasi bisnis. Fungsi umum teknologi intelijen bisnis mencakup pelaporan, pemrosesan analisis online (OLAP), analisis, data mining, proses penambangan data, pemrosesan data kejadian yang kompleks, manajemen kinerja bisnis, *benchmarking*, penambangan teks, analisis prediktif dan analisis preskriptif. Teknologi BI dapat menangani sejumlah besar data terstruktur dan terkadang tidak terstruktur untuk membantu mengidentifikasi, mengembangkan dan menciptakan peluang bisnis strategis baru. BI bertujuan untuk memudahkan interpretasi data besar ini. Mengidentifikasi peluang baru dan menerapkan strategi efektif berdasarkan wawasan dapat memberi keuntungan pasar yang kompetitif bagi bisnis dan stabilitas jangka panjang.

BI dapat digunakan oleh perusahaan dan pemerintah (selanjutnya disebut organisasi) untuk mendukung berbagai keputusan bisnis - mulai dari operasional hingga strategis. Keputusan operasi dasar meliputi penentuan posisi atau harga produk. Keputusan bisnis strategis melibatkan prioritas, sasaran dan arahan pada tingkat yang paling luas. Dalam semua kasus, BI paling efektif bila menggabungkan data yang

berasal dari pasar dimana organisasi beroperasi (data eksternal) dengan data dari sumber internal organisasi terhadap bisnis seperti data keuangan dan operasi (data internal). Bila digabungkan, data eksternal dan internal dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap yang, pada dasarnya, menciptakan "kecerdasan" yang tidak dapat diturunkan oleh rangkaian data tunggal manapun. Diantara banyak sekali penggunaan, alat BI memberdayakan organisasi untuk mendapatkan wawasan tentang pasar baru, Untuk menilai permintaan dan kesesuaian produk dan layanan untuk segmen pasar yang berbeda dan untuk mengukur dampak upaya pemasaran.

4.6 Potensi Masalah, Tantangan dan Manajemen Perubahan pada Inisiatif Aplikasi

Potensi masalah adalah pada *business process re-engineering* karena bisa mengganggu kegiatan yang sudah berjalan walaupun tidak sempurna, dan orang-orang terkait business process lama bisa jadi akan berusaha menghalangi. Pemecahannya adalah dengan mendapatkan SK Bupati Pulang Pisau selaku pimpinan tertinggi di Kabupaten Pulang Pisau.

BAB V

INISIATIF DAN CETAK BIRU

INFRASTRUKTUR e- GOVERNMENT

5.1 Ringkasan Layanan Pemerintahan Saat ini terkait kondisi Infrastruktur TIK

Berikut ini adalah ringkasan layanan Pemerintahan kondisi infrastruktur TI yang saat ini digunakan saat ini:

1. Topologi jaringan lokal setiap OPD masih bersifat heterogen dan belum mengikuti kaidah terstandarisasi sesuai dengan standard dan best practice yang ada.
2. Belum adanya manajemen untuk pengamanan informasi baik secara fisik maupun non fisik. Kebanyakan OPD belum secara terorganisasi menggunakan anti virus atau program untuk proteksi data lainnya.
3. Akses internet belum menerapkan manajemen terpusat seperti penggunaan bandwidth manajemen, penerapan Firewall dan Proxy.
4. Belum adanya proteksi terhadap keamanan jaringan internal dari masing-masing OPD.
5. Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System belum terimplementasi untuk mendeteksi dan mencegah ancaman dari jaringan internet yang mencoba masuk ke jaringan internal .
6. Government email untuk domain Pemerintahan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau belum terimplementasi dengan baik.
7. Saat ini sudah ada beberapa tempat untuk menyimpan beberapa server dan peralatan infrastruktur IT lainnya, tetapi belum memenuhi sebagai Data Center yang dapat digunakan sebagai tempat

pengumpulan pusat Data dan Informasi untuk melayani keseluruhan kepentingan dari masing-masing OPD.

5.2 Kebutuhan Pengembanagn Infrastruktur TIK Untuk Periode 2018 – 2023

Aplikasi yang digunakan didaerah Kabupaten Pulang Pisau diperlukan rancangan Arsitektur infrastruktur, serta dalam penggunaan aplikasi dibuthkan masukan, keamanan, dan lain-lain serta memperhatikan arahan strategis serta masukan lainnya terkait kinerja.

5.2.1 Rekomendasi Teknologi Jaringan Komputer

Teknologi Jaringan komputer yang ada di kabupaten Pulang Pisau sudah tersedia, namun ada banyak hal yang perlu diingat yakni teknologi jaringan komputer tersebut hendaknya mempunyai kemampuan untuk memfasilitasi dan mendukung segala persyaratan fungsional proses kerja di lingkungan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau.

5.2.2 Rekomendasi Data Center

Tabel 42. Teknologi Jaringan komputer

Teknologi Target (Strategic)	Teknologi Emerging
Physical Layer (Layer 1)	
Kabel UTP kategori 6, Fiber Optik, <i>Radio Wave</i> Topologi <i>Logical Star, Ring</i>	<i>Wireless :Ultra Wide BandServices, Adhoc Network</i> Topologi <i>Mesh, dynamic (adhoc).</i>
Data Link Layer (Layer 2)	
<i>EthernetIEEE 802.3, 100Mbps/1Gbps</i> <i>Wireless IEEE 802.11, WLAN 802.16, SONET,</i> <i>Frame Relay</i>	<i>Wireless berbasisCell danEmerging Packet Satellite Protocols</i> 40 Gbps IEEE 802.3

IEEE 802.1 p/Q QoS, RSVP, VLA IEEE 802.3af PoE	<i>Ethernet.</i>
Network Layer (Layer 3)	
IPv4, ICMP, IPv6 <i>Protokol Routing</i> BGP, IGMP,PIM, MBGP,OSPF	<i>Mobile IP, IPv6</i> <i>Multi Layer Switching, Multi</i> <i>ProtocolLayer Switching</i> (MPLS).
Transport Layer (Layer 4)	
TCP, UDP <i>Wireless WDP, Wireless ProfiledTCP,</i> RTCP, RTP Jaringan Terpusat (<i>ConvergedNetwork</i>) dengan QoS,Penggunaanmekanisme prioritas dan <i>traffic flow control</i>	
Session, Presentation & Application Layer(Layer5, 6 dan 7)	
Jaringan SNMP, SIP	<i>Intelligent, Content-Level</i> <i>Switching dan Penggunaan</i> <i>sistem prioritas.</i>
<i>Platform</i> Penggunaan <i>platform</i> yang mempunyai <i>industry- standard</i> yang terbuka, yang telah mencakup masalah penanganan keamanan (<i>embedded security</i>).	Penggunaan <i>platform</i> yang mempunyai <i>industry-</i> <i>standard</i> terbuka,dengan <i>embedded</i> <i>security,Multifactor</i> <i>authentication, Intelligent</i> <i>I/O.</i>
Piranti Lunak Aplikasi piranti lunak terdistribusi	Penggunaanpiranti lunakOOP, IIOP, <i>Unified</i>

<p>dalam bentuk <i>n-tier</i>, yang digunakan untuk peningkatan produktivitas dan kinerja, proses pengambilan keputusan, penggunaan <i>browser</i> dengan mekanisme <i>client access</i>. Penggunaan bahasa pemrograman yang bersifat OOP (<i>Object Oriented Programming</i>), seperti C++, Java, dan .NET.</p>	<p><i>Modelling Language (UML).</i></p>
--	---

Tabel 43. Teknologi Target dan Emerging

Teknologi Target (<i>Strategic</i>)	Teknologi <i>Emerging</i>
Penggunaan akses aplikasi dengan HTTP dilengkapi fitur keamanan (HTTPS atau SHTTP).	Pengaksesan segala layanan dengan menggunakan <i>portal Government Federated Management</i>
Aplikasi yang dapat dikelola dengan peralatan manajemen jaringan berbasis <i>SNMP LDAP Directory Service</i>	<i>Government LDAP</i>
<i>Database</i> RDBMS. <i>Open database-connectivity</i> SQL, ODBC, OLDB, JDBC	OODMBS, ORDBMS
<i>Email</i> SMTP, POP3, IMAP	<i>Government Email Directory Service</i>

Secara umum, unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam perencanaan, implementasi, penggunaan, dan pengembangan teknologi jaringan komputer adalah sebagai berikut.

1. Keamanan.

2. Reliabilitas.
3. Unjuk Kerja.
4. *Upgrading*.
5. Pemeliharaan.
6. Skalabilitas.

Dengan demikian, proses identifikasi kebutuhan dan persyaratan fungsional jaringan, terutama aplikasi-aplikasi yang berjalan di atas jaringan tersebut harus memperhatikan unsur-unsur perencanaan, implementasi, penggunaan, dan pengembangan teknologi jaringan komputer. Sebagai gambaran praktis, proses identifikasi yang dapat dilakukan antara lain adalah sebagai berikut.

- a) Ruang lingkup *traffic broadcast*. Proses ini dilakukan terutama untuk menentukan cakupan sebuah jaringan komputer sehingga proses *routing* dapat dilakukan secara lebih maksimal.
- b) Ketersediaan *bandwidth*. Hal ini menyangkut jenis dan jumlah data yang akan lewat melalui jaringan tersebut.
- c) Persyaratan fungsionalitas aplikasi yang akan berjalan di atas jaringan tersebut, terutama yang menyangkut reliabilitas dan keamanan.
- d) Pengguna/*client* yang menggunakan jaringan tersebut.
- e) Kondisi terkini jaringan yang ada.

Secara fisik, jaringan komputer untuk komunikasi antar pegawai pada umumnya terletak pada satu gedung. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk jaringan komputer di dalam satu gedung (LAN) yakni sebagai berikut.

- a) Media yang digunakan minimal menggunakan kabel UTP kategori 5, namun direkomendasikan menggunakan kabel UTP kategori 6 seperti yang terdapat dalam Commercial Building Telecommunications

Cabling Standards TIA/EIA 568-B.2.1. Kabel UTP kategori 6 dapat mentransmisikan data hingga 10 Gbps sepanjang 100 meter.

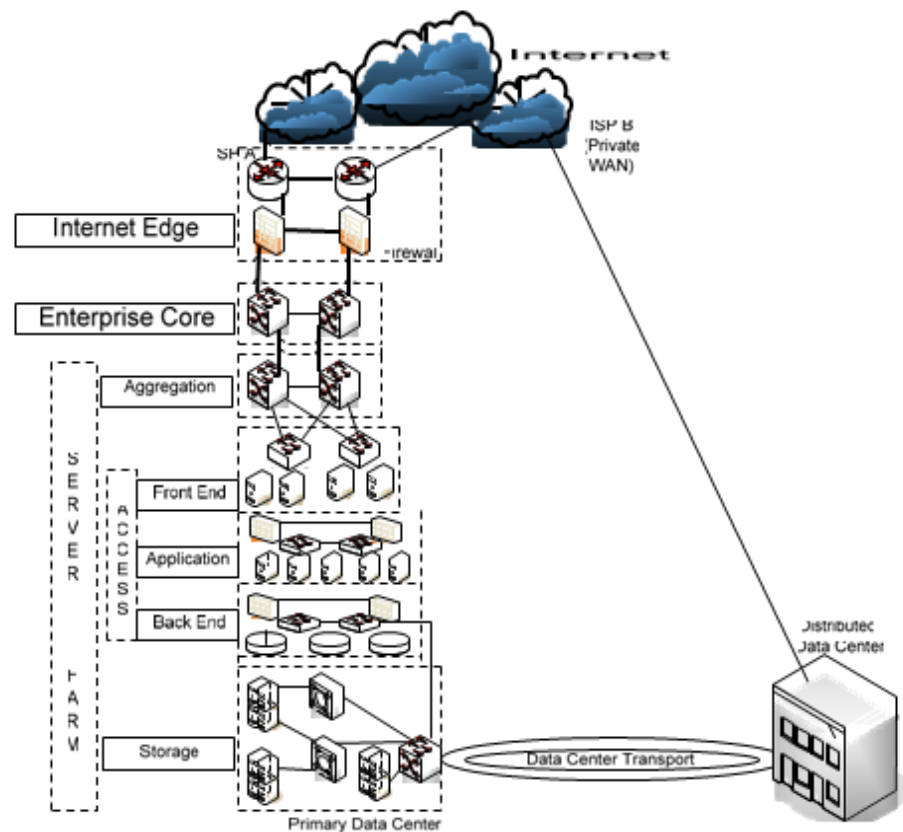
- b) Untuk menjawab kebutuhan penyaluran data yang lebih besar dapat digunakan media serat optik. Pengembangan media serat optik baik menggunakan *multi-mode* atau *single-mode* terdapat dalam TIA/EIA 568-B.3 dan ISO/IEC 11801:2002 (Commercial Building Telecommunications Cabling Standards).
 - 1. Untuk subsistem horizontal digunakan serat *multi-mode* 50/125 micron, sedangkan untuk subsistem vertikal digunakan serat *multi-mode* atau *single-mode* 50/125 micron (8/125 micron).
 - 2. Serat *multi-mode* dapat mentransmisikan data hingga 10 Gbps Ethernet dengan jarak sekitar 35 meter sampai 300 meter (50/125 micron), sedangkan serat *single-mode* (8/125 micron) dapat mentransmisikan data hingga 10 Gbps Ethernet dalam jarak 2, 10 dan 40 kilometer.
- c) Topologi yang digunakan adalah topologi Star. Pertimbangannya adalah skalabilitas dan kemudahan pengembangan jaringan komputer untuk kebutuhan yang akan datang. Titik sentral pada topologi jaringan ini sebaiknya tidak menggunakan *Hub*, melainkan menggunakan menggunakan *Switch*. IEEE 802.3 Ethernet standards mendukung *Local Area Network* dengan topologi Star.
- d) Penggunaan media nirkabel, seperti *WirelessLAN/Wifi*, perlu dipertimbangkan untuk lebih meningkatkan produktivitas. Teknologi ini dapat dijadikan sebagai teknologi pelengkap atau pendukung, terutama untuk mengakomodasi pengguna dengan mobilitas tinggi namun tetap membutuhkan hubungan dengan jaringan misalnya ketika berada dalam ruang rapat, diskusi, atau presentasi.
- e) Protokol yang digunakan sebaiknya menggunakan protokol TCP/IP. IPv4 dapat tetap digunakan, namun tidak menutup kemungkinan untuk penggunaan IPv6 pada masa yang akan datang. Dengan

digunakannya TCP/IP sebagai protokol jaringan komputer di Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, maka aplikasi yang berjalan di atas jaringan ini juga mendukung protokol TCP/IP. Mengingat ruang lingkup jaringan komputer LAN atau BAN relatif kecil, alokasi alamat IP dapat menggunakan *DHCP server*.

- f) Menerapkan protokol manajemen jaringan. Protokol manajemen jaringan yang dapat digunakan antara lain *Simple Network Management Protocol* (SNMP). Protokol SNMP merupakan standar *Internet Engineering Task Force* (IETF) yang dikeluarkan RFC 1157. Dengan SNMP, manajer jaringan dapat memantau dan mengelola unjuk kerja jaringan tersebut, menemukan dan memberi solusi terhadap masalah yang timbul di dalam jaringan, serta dapat membantu dalam hal perencanaan pengembangan jaringan untuk masa yang akan datang. Pada akhirnya SNMP akan membantu Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk memastikan pelayanan *e-Government* yang lebih baik serta pendanaan proses bisnis yang lebih efisien.
- g) Untuk mencegah kerusakan komponen atau terganggunya jaringan akibat padamnya listrik, jaringan harus memiliki sistem sumber daya cadangan antara lain dapat berupa *Uninterruptible Power Supplies* (UPS).
- h) Fasilitas lingkungan seperti *Air Conditioner* (AC) dan alat pengatur kelembaban harus diatur sesuai dengan daerah operasi komponen dalam jaringan untuk mencegah terjadinya kerusakan.

Gedung utama di Perkantoran Bupati baru dan Perkantoran Bupati Lama memiliki jaringan LAN tersendiri yang terpisah satu sama lain. Saat ini VPN-IP baru digunakan untuk akses dari *Data Center* Perkantoran Bupati baru ke Perkantoran Bupati Lama dan sebaliknya. Kedepannya diharapkan gedung-gedung di lingkungan Kemenakertrans dapat membentuk jaringan bersama yang

cakupannya lebih besar yaitu *Wide Area Network* (WAN) bahkan sampai terhubung ke Unit Kerja daerah di seluruh Indonesia. Jaringan ini dapat digunakan untuk menunjang proses komunikasi antar satuan kerja DISKOMINFO melalui sebuah portal Intranet. Selain itu, jaringan WAN ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sampai ke kelurahan-kelurahan.



Gambar 13. Rancangan Data Center

Rancangan *Data Center* secara kemampuan umum dapat memiliki spesifikasi sebagai berikut.

a) *High Speed.*

Data Center dirancang dengan kecepatan 10 Gigabit per detik dengan menggunakan media transmisi *serat optic*. Kecepatan tersebut diterapkan pada jaringan data dan jaringan *storage* (SAN).

b) *Full Redundancy.*

Semua perangkat terdiri dari 2(dua) perangkat dengan fungsi yang sama sehingga kerusakan pada suatu perangkat dapat secara otomatis digantikan oleh perangkat yang lain. Perbaikan pada perangkat yang rusak dapat dilakukan tanpa menonaktifkan layanan *Data Center* yang sedang berjalan.

c) *Load Balancing.*

Perangkat yang ada memiliki kemampuan untuk membagi beban kerja pada perangkat kedua yang memiliki fungsi yang sama. Hal ini diperlukan untuk menjamin kinerja setiap perangkat ketika terjadi *overload* padalayanan yang diberikan serta menghindari *crash* perangkat.

d) *Modular.*

Data Center dirancang secara modular dengan membaginya ke dalam beberapa bagian. Tiap bagian memiliki fungsi yang spesifik. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengelolaan dan mempercepat proses pencarian kerusakan serta menghindari gangguan total layanan *Data Center* akibat suatu perangkat mengalami kerusakan.

e) *Multi-Tier Environment.*

Data Center dirancang pada lingkungan aplikasi *multi-tier* untuk menjamin dan memudahkan integritas data antar aplikasi.

f) *Secure.*

Data Center dirancang dengan keamanan yang tinggi, baik keamanan fisik maupun logik. Untuk keamanan logik, diterapkan *firewall* pada

setiap jaringan yang terhubung dengan jaringan eksternal (Internet dan extranet dengan membangun sebuah DMZ). Selain itu, *firewall* juga diterapkan pada setiap *layer* Intranet *server farm*. IPS dan IDS digunakan untuk mendeteksi dan mengantisipasi masuknya serangan / aktivitas komunikasi data yang dapat menimbulkan gangguan layanan *Data Center* atau kebocoran data. Semua user yang mengakses data dalam *Data Center* dibatasi oleh kebijakan keamanan. Keamanan fisik dilakukan dengan menerapkan parameter-parameter keamanan seperti: alarm, *biometrik*, *surveillance camera*, *trapdoor*, sistem pemadam api, *raised floor*, *backup generator*, *grounding*, UPS, *circuit breaker*, dan pengaturan suhu dan kualitas udara (*humidity environment*). *Data Center* juga dapat dilengkapi dengan SOP dan kebijakan keamanan untuk menjamin keselamatan personel *Data Center* dan data.

g) Blade Server and Storage Area Network

Data Center dirancang untuk menggunakan SAN dengan teknologi RAID untuk menjamin ketersediaan dan kinerja data, menghindari kehilangan data akibat kerusakan media penyimpanan, memudahkan pengelolaan media penyimpanan, serta memudahkan konsolidasi data dengan *Data Center* Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang lain. Arsitektur *Data Center* menggunakan teknologi *blade server* yang memungkinkan server-server dapat berbagi *power supply*, *cooling*, dan berbagai *resources* yang lain. Penggunaan *blade server* dapat menghemat ruang *Data Center* dan memudahkan pengelolaan server di *Data Center*.

h) Backup and Recovery Strategy

Data dan aplikasi dalam *Data Center* dilindungi dengan teknologi RAID guna menghindari risiko kehilangan data / gangguan operasi akibat kerusakan media penyimpanan. *Emergency Recovery Disk* (ERD) diterapkan untuk mempercepat instalasi server, *Configuration*

Disk (CFD) untuk mempercepat proses konfigurasi perangkat nonserver, RAID 1 (mirror) untuk setiap media *storage server*, RAID 5 dan *tape backup* untuk media penyimpanan data (rowdata). Strategi *backup* dan *recovery* juga dikaitkan dengan *Disaster Recovery Plan* dan *Business Continuity Plan*.

i) *Disaster Recovery Plan* (DRP) and *Business Continuity Plan* (BCP)

Data Center dilengkapi dengan *disaster recovery center* (DRC) untuk mengantisipasi terjadinya risiko gangguan yang bersifat *catastrophic* (bencana besar), serta BCP untuk mengantisipasi risiko yang intensitasnya lebih kecil. Integrasi dan konsolidasi *Data Center* dengan DRC dilakukan secara *real time*. Pengembangan DRC Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau akan menjadi lebih mudah bila rancangan *Data Center* dibangun berdasarkan *Business Impact Analysis* (BIA), dengan mengintegrasikan analisis/ manajemen risiko operasional terhadap BIA *Data Center*.

j) Standar Internasional.

Data Center sebaiknya dibangun dengan merujuk pada standar-standar internasional, seperti COBIT, ISO17799-2005 tentang manajemen keamanan sistem informasi, NIST terutama NISTSP800-37 *Guide for the Security Certification and Accreditation of Federal Information System*, NIST SP80034 *Contingency Planning Guide for Information Technology System*, NISTSP80014 *Generally Accepted Principles and Practices for Securing Information Technology System*. *Compliance* terhadap standar-standar tersebut memudahkan proses audit dan akuntabilitas yang tinggi sesuai dengan standar internasional.

k) Tahap Pengembangan *Data Center*

Pengembangan *Data Center* Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dilakukan secara bertahap dalam tenggang waktu selama 5 (lima)

tahun, dimana setiap tahun dibagi kedalam 4 (empat) kuartal pengembangan. Pengembangan *Data Center* DISKOMINFO, Statistik, dan Persandian mengalami beberapa fase pengembangan. Setiap fase memiliki persyaratan kondisi yang harus dipenuhi sebelum berpindah ke fase berikutnya. Adapun fase-fase pengembangan *Data Center* dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Fase Pengembangan.

Fase Pengembangan merupakan fase awal *Data Center* Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Pada fase ini, *Data Center* meng - host aplikasi – aplikasi di Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan melakukan replikasi data dari server-server aplikasi ke dalam SAN *Data Center*. Server-server pada tiap *server farm* hanya merupakan server-server yang digunakan oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Fase Pengembangan berakhir bila kondisi-kondisi berikut telah terpenuhi.

- a) Aplikasi - aplikasi yang ada telah memasuki tahap *deployment*.
- b) Semua proses migrasi data dari aplikasi-aplikasi kritis yang terkait telah selesai dilakukan.
- c) Semua aplikasi kritis yang terkait telah selesai di *engineering* dan memasuki tahap *deployment*.
- d) Semua pengalihan layanan aplikasi kritis yang terkait kedalam *Data Center* telah selesai dilakukan.

2. Fase Pertumbuhan.

Fase pertumbuhan adalah fase kedua yang bertujuan untuk memindahkan aplikasi – aplikasi kritis yang masih tersisa ke dalam *Data Center*. Fase ini dimulai dengan proses migrasi data dari aplikasi kritis yang tersisa, replikasi data dilakukan sampai aplikasi kritis telah dapat di-host dalam *Data Center*. Pengadaan server bagi suatu aplikasi kritis pada setiap *server farm*

dilakukan ketika aplikasi kritis terkait telah selesai di-*enhance* dalam rangka penyesuaian dengan arsitektur komputasi *Data Center*. Fase pertumbuhan berakhir bila kondisi-kondisi berikut telah terpenuhi.

- a) Semua proses migrasi data aplikasi kritis telah selesai dilakukan.
- b) Semua aplikasi kritis telah di-*host* dalam *Data Center*.
- c) Semua proses pengalihan layanan aplikasi kritis telah selesai dilakukan.

3. Fase Penyempurnaan.

Data Center Fase ini merupakan fase terakhir pengembangan *Data Center*. Pada fase ini, semua data dan aplikasi kritis telah di-*host* didalam *Data Center* dan telah beroperasi dengan optimal. Fase penyempurnaan adalah fase untuk melindungi *Data Center* dan menjamin kesinambungan layanan TIK dilingkungan Kemankertrans dengan membangun *Disaster Recovery Center* (DRC). DRC merupakan *Data Center* atau *site* alternatif yang dapat digunakan ketika *Data Center* mengalami gangguan atau bencana. Fase ini dimulai dengan pengembangan DRC Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, kemudian dilanjutkan dengan proses migrasi dan sinkronisasi data serta aplikasi kritis dengan DRC Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Dalam fase ini dibangun *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Business Continuity Plan* (BCP). *DRP* Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau merupakan landasan awal pengembangan rencana-rencana darurat TIK lainnya dalam *BCP* Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Fase penyempurnaan berakhir bila kondisi-kondisi berikut telah terpenuhi.

- a) *DRP* dan *DRC* DISKOMINFO telah memasuki tahap *deployment*.

- b) Migrasi semua data yang ada di *Data Center* ke DRC telah selesai dilakukan.
- c) Strategi sinkronisasi dan *recovery* data telah berjalan dengan optimal.

Setelah seluruh fase pengembangan dilalui, *Data Center* membutuhkan proses pengembangan dan perbaikan guna menjaga tingkat efektifitas *Data Center* dalam memberikan layanan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Pengembangan dan perbaikan dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan perkembangan kebutuhan layanan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

5.3 Cetak Biru Inisiatif Infrastruktur TIK dan Perawatan (*Maintenance*)-nya

Berikut adalah ringkasan inisiatif Infrastruktur TIK Kabupaten Pulang Pisau untuk perioda 2018-2022

Tabel 44. Ringkasan Inisiatif Infrastruktur TI

No	Program / Proyek Infrastruktur TI	Deskripsi
1	Revitalisasi <i>Data Center</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan kajian Detail Engineering Design (DED) untuk mencapai Tier-3 <i>Data Center</i>. b. Pembangunan Tier-3 <i>Data Center</i>
2	Pembangunan Disaster Recovery Center (DRC)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan kajian Detail Engineering Design (DED) DRC b. Pembangunan DRC
3	Implementasi ISO 27001 untuk <i>Data Center</i>	
4	Peningkatan Kapasitas Jaringan TI	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas bandwidth (VPN untuk akses data Pemda) b. Implementasi sentralisasi akses melalui

		<i>Single Sign On.</i>
5	Optimalisasi Perangkat jaringan TI	a. Penerapan Cloud Computing melalui Virtualisasi Server b. Redesain arsitektur jaringan untuk level unit kerja
6	Peningkatan Keamanan Jaringan TI	a. Melakukan Audit keamanan jaringan TI b. Penerapan IDS/IPS

5.4 Potensi Masalah, Tantangan, dan Manajemen Perubahan pada Inisiatif Infrastruktur TIK

Potensi masalah adalah pada *business process re-engineering* karena bisa mengganggu kegiatan yang sudah berjalan walaupun tidak sempurna, dan orang-orang terkait business process lama bisa jadi akan berusaha menghalangi. Pemecahannya adalah dengan mendapatkan SK Bupati Pulang Pisau selaku pimpinan tertinggi di Kabupaten Pulang Pisau.

BAB VI

INISIATIF DAN CETAK BIRU ORGANISASI dan TATA KELOLA e- GOVERNMENT

6.1 Ringkasan Layanan Pemerintahan Saat ini terkait Kondisi Tata-Kelola TIK

Dengan memperhatikan penjelasan di atas dan membandingkannya dengan kerangka kerja struktur fungsional tata kelola TI, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut ini:

- a) Tidak ada susunan prioritas pengembangan TIK dalam jangka panjang.
- b) Pengembangan TIK didasarkan pada kebutuhan aplikasi/informasi dari OPD di lingkungan
- c) Fungsi operasional layanan TI terutama yang memberikan dukungan bagi user dalam penggunaan aplikasi, database dan infrastruktur TI masih belum ada atau belum jelas penugasannya.
- d) Untuk fungsi kontrol seperti audit TI, *Quality Control* dan *Compliance* masih belum ada penugasannya. Inspektorat sebagai unsur pengawasan di lingkungan juga belum memiliki unsur audit TI.

Untuk dapat melaksanakan tata kelola TIK yang baik maka perlu dilakukan proses-proses pengelolaan TIK yang sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan asesmen yang dilakukan berikut hasil analisis yang terkait dengan proses-proses TIK yang ada saat ini (*existing*) di:

a) Kebijakan dan Prosedur TIK

- 1. Kebijakan dan prosedur TIK harus didefinisikan ulang dengan akan adanya perubahan nomenklatur urusan Komunikasi dan

Informatika sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2. Kebijakan dan prosedur TIK yang sudah ada perlu dilakukan assessment kembali sesuai dengan perubahan organisasi, RPJMD dan perkembangan Teknologi.
3. Kelengkapan kebijakan dan Prosedur TIK harus mengacu pada praktek terbaik industry khusus dapat menggunakan referensi dari beberapa standar seperti ITSM/ISO 2000, ISO 27000, dan juga kerangka kerja COBIT 5 serta standar lainnya yang dapat digunakan dan sesuai dengan kebutuhan TIK

b) Pengadaan TIK

1. Untuk pengadaan TI masih dilakukan oleh masing-masing OPD.
2. Infrastruktur TI dikelola oleh Pusat Jaringan Komunikasi.
3. Masing-masing pengadaan server dan aplikasi TI dilakukan oleh masing-masing OPD tanpa kewajiban memberitahukan kepada DISKOMINFO selaku pelaksana dan pengendali TI.

c) IT Service Management

1. Belum ada layanan Help Desk/contact center untuk layanan TI. Untuk dukungan atas layanan TI masih langsung menghubungi Personil TI terkait. Karena pengadaan TI saat ini masih dilakukan sendiri oleh masing-masing OPD maka setelah operasional pun pengelolaannya tidak dilakukan oleh DISKOMINFO selaku pelaksana dan pengendali TI.
2. Kesepakatan eksternal (SLA) antara lembaga sudah ada misalnya antara dengan BNPB, Inatews dan lain-lain.
3. Aplikasi Help Desk sudah ada yang dibuat oleh pihak ketiga namun belum digunakan.
4. Manajemen Layanan TI dan perangkatnya belum ada seperti Layanan Contact Center, katalog layanan TI, SLA/OLA internal belum tersedia.

d) Manajemen Layanan Pihak Ketiga

1. Saat ini pengadaan layanan TI dilakukan oleh masing-masing OPD yang ada di Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau.
2. Untuk layanan-layanan TI yang diberikan oleh pihak ketiga belum dilakukan secara terkoordinir dalam lingkup secara keseluruhan.

e) Manajemen Keamanan TI

1. Inisiatif untuk menerapkan manajemen keamanan informasi belum dilakukan.
2. Inisiatif tersebut perlu dilakukan guna memastikan bahwa sistem manajemen keamanan informasi yang dibangun memang sudah sesuai dengan kebutuhan dan memastikan bahwa aset-aset yang kritikal sudah diproteksi secara memadai. Sebagai contoh kelengkapan seperti *asset register* sebagai dokumen awal yang penting dalam manajemen keamanan informasi saat ini belum ada.

f) Manajemen Kelangsungan Organisasi

1. Belum ada fasilitas DRC (Data Recovery Center)
2. Belum ada rencana untuk menjamin keberlangsungan organisasi seperti *DRP(disaster recovery planning)* dan *BCP (business continuity planning)*

6.2 Kebutuhan Perubahan Organisasi dan Tata Kelola TIK berdasarkan pada standar TIK Nasional

6.2.1 Organisasi TIK Target

Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi harus menjadi bagian tidak terpisahkan dalam tata kelola organisasi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau jika ingin maju dan kuat. Secara spesifik tujuan tata kelola TIK adalah sebagai berikut.

- a. Penyelarasan strategik SI dengan arah kebijakan organisasi.
- b. Lebih terjaminnya layanan SI (*Value Delivery*) .

- c. Manajemen risiko SI.
- d. Manajemen sumberdaya SI.
- e. Pengukuran kinerja SI.

6.2.2 Peningkatan Tata Kelola TIK

Tata kelolaSI (*IS / IT Governance*) diartikan sebagai struktur dari hubungan dan proses yang mengarah dan mengatur organisasi dalam rangka mencapai tujuannya dengan memberikan nilai tambah dari pemanfaatan teknologi informasi sambil menyeimbangkan risiko dibandingkan dengan hasil yang diberikan oleh teknologi informasi dan prosesnya. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip dasar yang menjadi pondasi bangunan Tata Kelola TI yakni sebagai berikut.

- 1. Prinsip 1:** Perencanaan TIK yang sinergis dan konvergen dilevel internal institusi dan nasional.

Memastikan bahwa setiap inisiatif selalu didasarkan pada rencana yang telah disusun sebelumnya dan memastikan bahwa rencana-rencana institusi di semua level pemerintahan, sinergis dan *konvergen* dengan rencana nasional.

- 2. Prinsip 2:** Penetapan kepemimpinan dan tanggung jawab TIK yang jelas di level internal institusi dan nasional.

Memastikan bahwa setiap institusi memahami dan menerima posisi dan tanggung jawabnya dalam peta TIK nasional secara umum, dan memastikan bahwa seluruh entitas fungsional disetiap institusi memahami dan menerima perannya dalam pengelolaan TIK di institusinya masing-masing.

3. Prinsip 3: Pengembangan dan/atau akuisi TIK secara valid.

Memastikan bahwa setiap pengembangan dan/atau akuisisi TIK didasarkan pada alasan yang tepat dan dilakukan dengan cara yang tepat berdasarkan analisis yang tepat dan terus-menerus. Memastikan bahwa dalam setiap pengembangan dan/atau akuisisi TIK selalu ada pertimbangan keseimbangan yang tepat atas manfaat jangka pendek dan jangka panjang, biaya dan risiko- risiko.

4. Prinsip 4: Memastikan operasi TIK berjalan dengan baik, kapan pun dibutuhkan.

Memastikan kesesuaian TIK dalam mendukung institusi, respon sifat atas perubahan kebutuhan kegiatan institusi, dan memberikan dukungan kepada kegiatan institusi di semua waktu yang dibutuhkan institusi.

5. Prinsip5: Memastikan terjadinya perbaikan berkesinambungan (*Continuous Improvement*) dengan memperhatikan faktor manajemen perubahan organisasi dan sumber daya manusia.

Peningkatan tata kelola TIK dilakukan dengan mengacu pada *framework* Tata kelola TIK Nasional, diperlihatkan pada Gambar 6.4 sebagai berikut.



Gambar 14. Model Tata-Kelola TIK Nasional

Seluruh ruang lingkup komponen perencanaan TIK harus mengacu pada *framework* tata kelola TIK Nasional. Model Tata Kelola TIK Nasional dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni sebagai berikut.

1. **Struktur & Peran Tata Kelola**, yaitu identifikasi entitas yang berperan dalam pengelolaan proses-proses TIK dan bagaimana pemetaan perannya dalam pengelolaan proses-proses TIK tersebut. Struktur dan peran tata kelola ini mendasari seluruh proses tata kelola TIK.
2. **Proses Tata Kelola** yaitu proses-proses yang ditujukan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan utama tata kelola dapat tercapai, terkait dengan pencapaian tujuan organisasi, pengelolaan sumber daya, dan manajemen risiko.

Berikut ini merupakan lingkup proses tata kelola.

1. Perencanaan Sistem.
Proses ini menangani identifikasi kebutuhan organisasi dan formulasi inisiatif-inisiatif TIK apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan organisasi tersebut.
2. Manajemen Belanja/Investasi.
Proses ini menangani pengelolaan investasi/belanja TIK.
3. Realisasi Sistem.
Proses ini menangani pemilihan, penetapan, pengembangan/akuisisi sistem TIK, serta manajemen proyek TIK.
4. Pengoperasian Sistem.
Proses ini menangani operasi TIK yang memberikan jaminan tingkat layanan dan keamanan sistem TIK yang dioperasikan.
5. Pemeliharaan Sistem.
Proses ini menangani pemeliharaan aset-aset TIK untuk mendukung pengoperasian sistem yang optimal.

Berikut uraian penjelasan mengenai mekanisme tata kelola.

1. Kebijakan Umum.
Kebijakan umum ditetapkan untuk memberikan tujuan dan batasan-batasan atas proses TIK bagaimana sebuah proses TIK dilakukan untuk memenuhi kebijakan yang ditetapkan.
2. Monitoring & Evaluasi.
Monitoring & evaluasi ditetapkan untuk memastikan adanya umpan balik atas pengelolaan TIK, yaitu berupa ketercapaian kinerja yang diharapkan. Untuk mendapatkan deskripsi kinerja setiap proses TIK digunakan indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan inilah yang akan dapat digunakan oleh manajemen atau auditor, untuk mengetahui apakah proses TIK telah dilakukan dengan baik.

Untuk menjalankan model organisasi TIK, maka pengelolaan mengikuti siklus sebagai berikut.

1. Perencanaan dan pengorganisasian.
2. Akuisisi dan implementasi.
3. Layanan dan dukungan.
4. Pemantauan.

Pendekatan tata kelola yang dirumuskan dalam panduan Tata Kelola TIK Nasional tersebut sebenarnya mengambil praktik terbaik (*best practice*) COBIT sebagai rujukan utamanya sehingga untuk pengukuran kematangan disarankan mulai menggunakan *framework* standard tata kelola internasional. Peningkatan adopsi COBIT dalam tata kelola akan mudah dilakukan jika diiringi dengan peningkatan kompetensi SDM SI terkait.

6.3 Cetak Biru Inisiatif Tata Kelola TIK

Area perbaikan untuk aspek Kelembagaan TIK diperhatikan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 45. Area perbaikan aspek kelembagaan dan SDM TIK

No.	Komponen	Kondisi Target
1.	Pengambilan keputusan TI kritikal	
	a. Penentuan Peran SI	Peraturan Bupati dengan konsep kontrol terpusat yang dijalankan melalui model organisasi TIK yang disosialisasikan ke setiap unit kerja.
	b. Pendefinisian kebutuhan bisnis akan solusi SI	Kontrol terpusat, dengan inisiatif dan anggaran yang dapat dilakukan oleh unit kerja. Inisiatif strategis harus melalui Komite TIK
	c. Belanja SI	Belanja TIK dengan kontrol terpusat dan alokasi anggaran yang memungkinkan tersebar.
	d. Arsitektur SI	Arsitektur TIK menjadi acuan bersama semua unit kerja

		di Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Setiap inisiatif program/proyek terkait TIK harus dalam perspektif Arsitektur TIK.
2.	Struktur Tata Kelola	
	a. Fungsi Komite SI/TI	Telah terdefinisi bentuk dan personil yang terdapat di dalamnya
	b. Posisi SI dalam struktur organisasi keseluruhan	Posisi SI dalam struktur organisasi secara ideal harus dikelola oleh unit kerja dengan tingkat yang lebih tinggi. Akan tetapi opsi lain adalah dengan menjalankan model organisasi TIK sebagaimana dijelaskan
	c. Komposisi SDM SI	<p>Komposisi SDM saat ini belum terpetakan kompetensi teknisnya sehingga perlu dikonsolidasi lebih detail untuk penambahan personel.</p> <p>Solusi dalam pemenuhan sebaran SDM TIK ke depan dapat dilakukan dengan cara berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Restrukturisasi dan reposisi kualifikasi pada setiap unit kerja untuk dilakukan penyebaran secara proporsional. 2. Bimbingan Teknis sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. 3. Rekrutmen baru SDM TIK yang bersumber baik dari internal ataupun eksternal
3.	Proses dan Teknologi	
	a. Kebijakan Pengelolaan SI	Kebijakan pengelolaan TIK telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan Bupati yang tegas.
	b. Standar dan prosedur pengelolaan SI	Standar dan prosedur tertulis untuk pengelolaan SI maupun infrastruktur TI
	c. Standar-standar teknis informasi, aplikasi dan infrastruktur	Standar-standar teknis informasi, aplikasi dan infrastruktur resmi yang terdokumentasi dengan baik

Dari dua kondisi eksisting dan perbaikan sebagaimana telah diuraikan, dapat ditarik beberapa inisiatif program dan proyek seperti ini.

Tabel 46. Program/proyek terkait Kelembagaan

No	Program / Proyek Perbaikan	Deskripsi
1	Implementasi model organisasi TIK	Langkah awal untuk perubahan pengelolaan TIK adalah implementasi model organisasi TIK dengan pembentukan Komite TIK, Komite Pengarah sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian 5.2.
2	Penyusunan pedoman, panduan dan prosedur Tata Kelola SI	Diperlukan penyusunan pedoman, panduan dan prosedur Tata Kelola SI sehingga dipahami bersama, mudah diterapkan secara konsisten untuk terjaminnya layanan TIK yang baik.
3	Tinjauan berkala capaian tata kelola TIK	Melakukan tinjauan tahunan terhadap kematangan tata kelola TIK.

BAB VII

INISIATIF DAN CETAK BIRU

PENGELOLAAN SDM e- GOVERNMENT

7.1 Analisis Kapasitas SDM TIK

Sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan kompetensi di bidang teknologi komunikasi dan informasi saat ini masih kurang bila dibandingkan dengan kebutuhan saat ini. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi hampir di sebagian besar negara. Kebutuhan pemenuhan kebutuhan SDM teknologi informasi dan komunikasi mulai dari kualifikasi dasar, menengah dan juga tinggi. Tidak semua kualifikasi yang disebutkan di atas dimiliki secara proporsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Pemenuhan kebutuhan SDM tersebut sangat tergantung pada kebijakan yang dikeluarkan. Dalam operasionalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdapat 2 (dua) tipe pengelolaan yaitu pengelolaan mandiri dan alih daya (*outsourcing*). Beberapa pertimbangan yang menyebabkan pengelolaan atau implementasi Teknologi Informasi menggunakan alih daya yakni sebagai berikut.

1. Organisasi ingin lebih fokus pada bisnis inti sehingga untuk bisnis pendukung diserahkan kepada pihak ketiga sebagai tenaga *outsourcing*.

2. Saat ini, lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau masih belum dimiliki SDM dengan kualifikasi yang dibutuhkan sedangkan perekrutan tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu yang singkat.
3. Pekerjaan yang dilakukan bersifat sementara sehingga tidak memerlukan SDM secara permanen.

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, khususnya yang terkait pengelolaan dan operasionalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi penggunaan alih daya dilakukan untuk pengadaan perangkat keras, perangkat lunak dan kajian atau konsultasi teknis.

Standar Kompetensi SDM bidang teknologi komunikasi dan informasi merupakan pengetahuan minimum yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menempati suatu pekerjaan tertentu. Kompetensi mengimplikasikan bahwa seseorang tahu apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, bilamana dan mengapa mengerjakan hal tersebut serta mengetahui dan mengantisipasi konsekuensi dari apa yang dikerjakan. Berdasarkan fungsi utama, kualifikasi dan tingkat kompetensi serta pembagian jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer nya maka SDM TIK dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori seperti yang diperlihatkan pada table berikut.

Tabel 47. Pengelompokan SDM TIK

Kualifikasi	Fungsi Utama	Sub Fungsi	Level Kompetensi	Nama Jabatan Fungsional
Engineer	Perangkat	Database	Dasar	Ahli Muda Basis Data

	Lunak		Menengah	Ahli Pertama Basis Data
			Terampil	Ahli Madya Basis Data
			Ahli	Ahli Utama Basis Data
		Aplikasi	Dasar	Ahli Muda Pemrogram
			Menengah	Ahli Pertama Pemrogram
			Terampil	Ahli Madya Pemrogram
			Ahli	Ahli Utama Pemrogram
	Perangkat Keras		Dasar	Ahli Muda Perangkat Keras
			Menengah	Ahli Pertama Perangkat Keras
			Terampil	Ahli Madya Perangkat Keras
			Ahli	Ahli Utama Perangkat Keras
	Jaringan Komputer		Dasar	Ahli Muda Jaringan Komputer
			Menengah	Ahli Pertama Jaringan Komputer
			Terampil	Ahli Madya Jaringan Komputer
			Ahli	Ahli Utama Jaringan Komputer
Analisis	Perangkat Lunak	Bisnis	Dasar	Ahli Muda Analisis Bisnis
			Menengah	Ahli Pertama Analisis Bisnis
			Terampil	Ahli Madya Analisis Bisnis
			Ahli	Ahli Utama Analisis Bisnis

		Sistem	Dasar	Ahli Muda Analis Sistem
			Menengah	Ahli Pertama Analis Sistem
			Terampil	Ahli Madya Analis Sistem
			Ahli	Ahli Utama Analis Sistem
	Tata Kelola		Dasar	Ahli Muda Tata Kelola TIK
			Menengah	Ahli Pertama Tata Kelola TIK
			Terampil	Ahli Madya Tata Kelola TIK
			Ahli	Ahli Utama Tata Kelola TIK
	Audit		Dasar	Ahli Muda Audit TIK
			Menengah	Ahli Pertama Audit TIK
			Terampil	Ahli Madya Audit TIK
			Ahli	Ahli Utama Audit TIK
Teknisi	Perangkat Keras		Dasar	Pelaksana Pemula Perangkat Keras
			Menengah	Pelaksana Perangkat Keras
			Terampil	Pelaksana Lanjutan Perangkat Keras
			Ahli	Penyelia Perangkat Keras
Operator	Perangkat Lunak		Dasar	Pelaksana Pemula Aplikasi
			Menengah	Pelaksana Aplikasi
			Terampil	Pelaksana Lanjutan Aplikasi
			Ahli	Penyelia Aplikasi

Pemetaan kebutuhan SDM TIK berdasarkan jabatan fungsional terhadap unit kerja diperlihatkan pada Tabel 48 sebagai berikut.

Tabel 48. Pemetaan Kebutuhan SDM TIK

Kualifikasi	Fungsi Utama	Sub Fungsi	Setda	Inspektorat	DISKOMINFO	Dikbud	Dinkes	Bappeda	BKD	Dukcapil	NakerKop
Engineer	Perangkat Lunak	Databas e	X		x						
		Aplikasi	X		x	x	x	x	x	x	X
	Perangkat Keras				x						
	Jaringan Komputer				x						
Analisis	Perangkat Lunak	Bisnis	X		x	x	x	x	x	x	X
		Sistem	X		x	x	x	x	x	x	X
	Tata Kelola			x	x						
	Audit			x	x						
Teknisi	Perangkat Keras		X	x	x	x	x	x	x	x	X
Operator	Perangkat Lunak		X	x	x	x	x	x	x	x	X

Solusi dalam pemenuhan sebaran SDM TIK kedepan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Restrukturisasi dan reposisi kualifikasi pada setiap unit kerja untuk dilakukan penyebaran secara proporsional.
2. Bimbingan Teknis sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
3. Rekrutmen baru SDM TIK yang bersumber baik dari internal ataupun eksternal.

Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM TIK berdasarkan kualifikasi diperlukan pelatihan profesional berbasis sertifikasi internasional. Jenis-jenis pelatihan yang dibutuhkan diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel 49. Kebutuhan Pelatihan

Kualifikasi	Fungsi Utama	Sub Fungsi	Level Kompetensi	Pelatihan Profesional
Engineer	Perangkat Lunak	Database	Dasar	Database Administrator
			Menengah	Database Designer
			Terampil	Data Warehouse
			Ahli	Business Intelligent
		Aplikasi	Dasar	Desktop & Web Programming
			Menengah	Government Programming
			Terampil	Secure Programming
			Ahli	Software Engineering Project Management
	Perangkat Keras		Dasar	IT Help Desk Support
			Menengah	IT Service Management

	Jaringan Komputer		Terampil	Computer & Network Forensic
			Ahli	<i>Data Center</i> Profesional
			Dasar	Network Administrator/Engineer
			Menengah	Network Architecure Designer
			Terampil	Security Management
			Ahli	Computer & Network Forensic
Analisis	Perangkat Lunak	Bisnis	Dasar	Software Engineering Project Management
			Menengah	Business Process Management
			Terampil	Business Process Reengineering
			Ahli	Government Architecture
		Sistem	Dasar	Software Engineering Project Management
			Menengah	Business Process Management
			Terampil	Software Architecture
			Ahli	Government Architecture
	Tata Kelola		Dasar	IT Service Management

			Menengah	IT Audit
			Terampil	IT Governance
			Ahli	IT Risk Management
	Audit		Dasar	IT Service Management
			Menengah	IT Audit
			Terampil	IT Risk Management
			Ahli	IT Governance
Teknisi	Perangkat Keras		Dasar	IT Helpdesk Support
			Menengah	Hardware & Network Problem Solving
			Terampil	Software Problem Solving
			Ahli	Computer & Network Forensic
Operator	Perangkat Lunak		Dasar	IT Helpdesk Support
			Menengah	Word Processing Professional
			Terampil	Presentation Professional
			Ahli	Spreadsheet Professional

7.1.1 Cetak Biru Inisiatif Pengelolaan SDM TIK

Area perbaikan untuk aspek Kelembagaan dan SDM TIK diperlihatkan sebagai berikut.

Tabel 50. Area perbaikan aspek kelembagaan dan SDM TIK

No	Komponen	Kondisi Target
1	Pengambilan keputusan TI kritikal	
	a. Penentuan Peran SI	Peraturan Bupati dengan konsep kontrol terpusat yang dijalankan melalui model organisasi TIK yang disosialisasikan ke setiap unit kerja.
	b. Pendefinisian kebutuhan bisnis akan solusi SI	Kontrol terpusat, dengan inisiatif dan anggaran yang dapat dilakukan oleh unit kerja. Inisiatif strategis harus melalui Komite TIK
	c. Belanja SI	Belanja TIK dengan kontrol terpusat dan alokasi anggaran yang memungkinkan tersebar.
	d. Arsitektur SI	Arsitektur TIK menjadi acuan bersama semua unit kerja di Pemerintah Kota Pulang Pisau. Setiap inisiatif program/proyek terkait TIK harus dalam perspektif Arsitektur TIK.
2	Struktur Tata Kelola	
	a. Fungsi Komite SI/TI	Telah terdefinisi bentuk dan personil yang terdapat di dalamnya
	b. Posisi SI dalam struktur organisasi keseluruhan	Posisi SI dalam struktur organisasi secara ideal harus dikelola oleh unit kerja dengan tingkat yang lebih tinggi. Akan tetapi opsi lain adalah dengan menjalankan model organisasi TIK sebagaimana dijelaskan
	c. Komposisi SDM SI	<p>Komposisi SDM saat ini belum terpetakan kompetensi teknisnya sehingga perlu dikonsolidasi lebih detail untuk penambahan personel.</p> <p>Solusi dalam pemenuhan sebaran SDM TIK ke depan dapat dilakukan dengan cara berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Restrukturisasi dan reposisi kualifikasi pada setiap unit kerja untuk dilakukan penyebaran secara proporsional. 2. Bimbingan Teknis sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. 3. Rekrutmen baru SDM TIK yang bersumber baik dari internal ataupun eksternal

3	Proses dan Teknologi	
	a. Kebijakan Pengelolaan SI	Kebijakan pengelolaan TIK telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan Bupati yang tegas.
	b. Standar dan prosedur pengelolaan SI	Standar dan prosedur tertulis untuk pengelolaan SI maupun infrastruktur TI
	c. Standar-standar teknis informasi, aplikasi dan infrastruktur	Standar-standar teknis informasi, aplikasi dan infrastruktur resmi yang terdokumentasi dengan baik

Dari dua kondisi eksisting dan perbaikan sebagaimana telah diuraikan, dapat ditarik beberapa inisiatif program dan proyek seperti berikut ini.

Tabel 51. Program/Proyek Terkait Kelembagaan

No	Program / Proyek Perbaikan	Deskripsi
1	Implementasi model organisasi TIK	Langkah awal untuk perubahan pengelolaan TIK adalah implementasi model organisasi TIK dengan pembentukan Komite TIK, Komite Pengarah sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian 5.1.
2	Penyusunan pedoman, panduan dan prosedur Tata Kelola SI	Diperlukan penyusunan pedoman, panduan dan prosedur Tata Kelola SI sehingga dipahami bersama, mudah diterapkan secara konsisten untuk terjaminnya layanan TIK yang baik.
3	Tinjauan berkala capaian tata kelola TIK	Melakukan tinjauan tahunan terhadap kematangan tata kelola TIK.

Tabel 52. Program/Proyek terkait SDM SI

No	Program/Proyek Perbaikan	Deskripsi
1	Pelatihan IT Help Desk Support	Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan proses dalam melakukan Help

		Desk Support melalui sebuah Call Center dan 3 Level Support dalam penanganan masalah dan insiden TIK. Peserta pelatihan adalah SDM TIK dengan kualifikasi Teknisi, Operator dan Engineer.
2	Pelatihan IT Service Management	Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan management layanan TIK di lingkungan Pemerintah Kota Pulang Pisau berbasis framework ITIL (IT Infrastructure Library) Versi 3.0. Peserta pelatihan ini adalah Engineer, Analis, Teknisi dan Operator. Selain tenaga prantara komputer pejabat struktural setingkat eselon 3 dan 2 juga dapat menjadi peserta pelatihan ini.
3	Pelatihan IT Governance	Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang tata kelola TIK di lingkungan Pemerintah Kota Pulang Pisau. Peserta dalam pelatihan ini terbagi dua yaitu untuk prantara komputer dengan kualifikasi Analis dan pejabat struktural di DISKOMINFO, Setda dan Sekretariat Dirjen.
4	Pelatihan IT Audit	Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam proses Audit TIK di lingkungan Pemerintah Kota Pulang Pisau. Peserta pelatihan ini terdiri dari prantara komputer dengan kualifikasi Analis Tata Kelola dan Inspektorat Jenderal.
5	Pelatihan IT Risk Management	Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang manajemen risiko dalam TIK di lingkungan Pemerintah Kota Pulang Pisau. Peserta dalam pelatihan ini terbagi dua yaitu untuk prantara komputer dengan kualifikasi Analis dan pejabat struktural di DISKOMINFO, Setda dan Sekretariat Dirjen.
6	Pelatihan Project Management	Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang manajemen pengelolaan proyek perangkat lunak di lingkungan Pemerintah

		Kota Pulang Pisau. Peserta dalam pelatihan ini terbagi dua yaitu untuk pranata komputer dengan kualifikasi Engineer, Analis dan pejabat struktural di DISKOMINFO, Setda dan Sekretariat Dirjen.
7	Pelatihan Security Management	Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam bindag pengelolaan keamanan TIK berbasis ISO 27001. Peserta pelatihan ini ditujukan untuk pranata komputer dengan kualifikasi Engineer.
8	Pelatihan Pengelolaan Data Center dan DRC	Pelatihan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan Data Center dan DRC. Peserta pelatihan ini ditujukan untuk pranata komputer dan pejabat struktural di DISKOMINFO.
9	Pelatihan Pengelolaan Virtualisasi Server	Pelatihan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan Virtualisasi Server serta pengelolaannya untuk peningkatan penggunaan perangkat keras server secara efisien. Peserta pelatihan ditujukan untuk pranata komputer dengan kualifikasi Engineer.
10	Workshop SEO	Workshop ini bertujuan untuk melakukan peningkatan akses dan rangking website yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pulang Pisau. Peserta dari Workshop ini adalah Pranata Komputer dengan kualifikasi Engineer dan Analis, selain itu dapat diikuti oleh staff di Setda dan Sekretariat Dirjen.
11	Pelatihan & Workshop Business Intelligence – Data Mining	Pelatihan ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menggali informasi dari data warehouse dan melakukan proses mining untuk mendapatkan pola data dan informasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pulang Pisau. Peserta Pelatihan ini adalah Pranata Komputer dengan kualifikasi Engineer dan Analis serta staff di Setda dan Sekretariat Dirjen.
12	Pelatihan Integration System	Pelatihan ini ditujukan untuk memberikan

		<p>pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan integrasi sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kota Pulang Pisau. Peserta Pelatihan ini adalah Pranata Komputer dengan kualifikasi Engineer dan Analis</p>
13	Workshop Penggunaan Aplikasi e-Office	<p>Workshop ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dalam penggunaan aplikasi e-Office yang terdiri dari email, pernjadwalan, dan aplikasi office populer lainnya seperti pengolah kata, lembar kerja, dan presentasi. Peserta pelatihan ini adalah pranata komputer dengan kualifikasi Operator, dan staff di semua unit kerja Pemerintah Kota Pulang Pisau.</p>
14	Pelatihan GIS	<p>Pelatihan ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Geografis untuk lingkungan Pemerintah Kota Pulang Pisau. Peserta Pelatihan ini adalah pranata komputer dengan kualifikasi Engineer dan Analis.</p>
15	Pelatihan Business Process Management	<p>Pelatihan ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan dalam pengelolaan proses, penyusunan standar proses dalam setiap lingkungan unit kerja di Pemerintah Kota Pulang Pisau. Peserta Pelatihan ini adalah pranata komputer dengan kualifikasi Analis dan para staff kunci di setiap unit kerja Pemerintah Kota.</p>
16	Pelatihan Pengelolaan Aplikasi	<p>Pelatihan ini ditujukan untuk memberikan keterampilan praktis pada pranata komputer dengan kualifikasi operator dan teknisi untuk setiap aplikasi yang akan diimplementasikan dalam inisiatif aplikasi.</p>

7.3 Potensi Masalah dan Tantangan, serta Manajemen Perubahan pada Inisiatif Pengelolaan SDM TIK

Potensi masalah adalah pada business process re-engineering karena bisa mengganggu kegiatan yang sudah berjalan walaupun tidak sempurna, dan orang-orang terkait business process lama bisa jadi akan berusaha menghalangi. Pemecahannya adalah dengan mendapatkan SK Bupati Pulang Pisau selaku pimpinan tertinggi di Kabupaten Pulang Pisau.

BAB VIII

PETA INISIATIF e-GOVERNMENT

8.1 Ringkasan dan Uraian Peta Alur e-Government

Ada 3 dimensi inisiatif pada Roadmap TIK Pulang Pisau 2018-2022, yaitu:

1. Dimensi Aplikasi
2. Dimensi Infrastruktur
3. Dimensi Tata-Kelola dan
4. Pengelolaan SDM

8.2 Potensi Masalah dan Tantangan, serta Manajemen Perubahan pada Implementasi Peta Alur e-Government

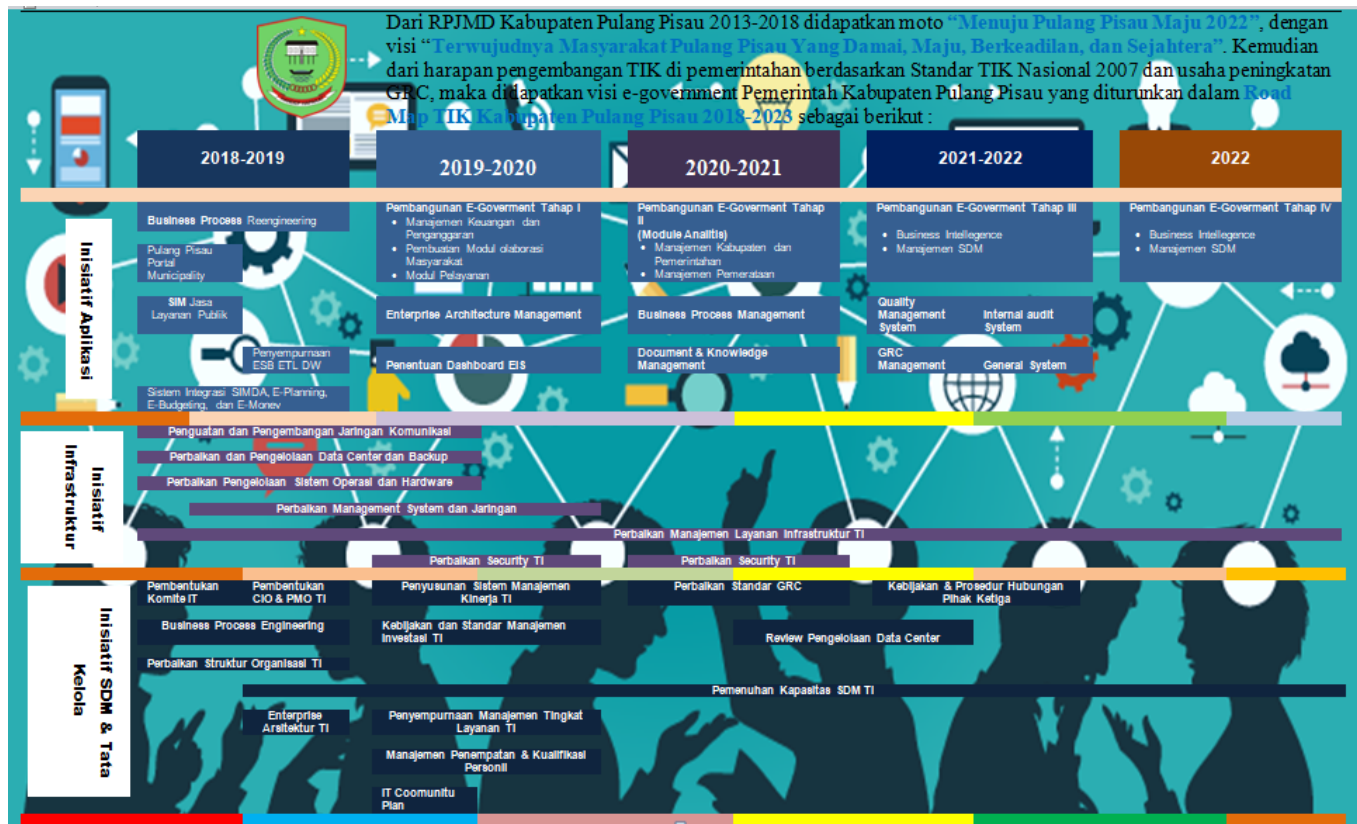
Potensi masalah adalah pada *business process re-engineering* karena bisa mengganggu kegiatan yang sudah berjalan walaupun tidak sempurna, dan orang-orang terkait business process lama bisa jadi akan berusaha menghalangi. Pemecahannya adalah dengan mendapatkan SK Bupati Pulang Pisau selaku pimpinan tertinggi di Kabupaten Pulang Pisau.

BAB IX

PENUTUP

9.1 Kesimpulan

Peta Alur lengkap adalah sebagai berikut:



Gambar 15. Peta Alur Lengkap

9.2 Saran – saran

Dari hasil pembahasan yang ada roadmap e-Government ini adalah alat bantu perencanaan kegiatan, dan setiap keputusan hendaknya diambil atas kesepakatan bersama antar OPD atas petunjuk dan berdasarkan keputusan Bupati Pulang Pisau selaku pimpinan tertinggi di kabupaten Pulang Pisau.

Adapun daftar inisiatif adalah sebagai berikut

9.2.1 Inisiatif Aplikasi

Kebutuhan OPD yang dirasa mendesak untuk tersedia atau ditingkatkan berdasarkan situasi dan kondisi saat ini sesuai RPJMD 2018-2022 yaitu:

1. Sistem pendukung keputusan eksekutif (portal EIS)
2. Sistem Data Sharing antar OPD (portal Data Sharing)
3. Publikasi informasi umum dan pemerintahan (Portal Kolaborasi Masyarakat)
4. Manajemen pelaporan pemerintahan (database OPD yang terintegrasi)
5. Sistem Pemilu Daerah (terkait data kependudukan)
6. Sistem pengendalian lalu lintas dan kemacetan
7. Perpajakan dan retribusi
8. Bisnis dan investasi
9. Sistem pengaduan masyarakat
10. Sistem pengendalian sampah perkotaan
11. Sistem promosi pariwisata
12. Sistem pemberdayaan IKM dan UKM
13. Sistem pelayanan kesehatan online
14. Sistem pelayanan pendidikan online
15. Sistem pelayanan ketenagakerjaan online
16. Sistem pelayanan jejaring pengaman sosial online
17. Belanja aplikasi dengan kontrol terpusat dan alokasi anggaran yang tersebar di OPD

9.2.2 Inisiatif Infrastruktur

Kebutuhan pembangunan infrastruktur TIK yang dirasa paling mendesak berdasarkan situasi dan kondisi saat ini, yaitu:

1. Data center berbasis modular dengan konsep full redundancy
2. Pembangunan Pulang Pisau Command Center (PPCC) untuk pengambilan keputusan
3. Pembangunan Data Warehouse Tunggal untuk Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau
4. Instalasi firewall H/W di server utama dan firewall S/W di setiap server & client
5. Penguatan Intrusion Detection/Prevention System (IDS/IPS)

6. Peningkatan kapasitas bandwidth untuk akses data nasional maupun internasional
7. Kolaborasi dan koordinasi dengan perusahaan penyedia layanan broadband
8. Pembangunan akses internet sampai kelurahan, sekolah negeri, dan Fasum lainnya
9. Pembangunan sistem pemulihan bencana (DRC)
10. Pembangunan sistem komputasi terpusat yang mobile-friendly
11. Belanja infrastruktur TIK dengan kontrol terpusat dan alokasi anggaran yang memungkinkan tersebar di OPD-OPD

9.2.3 Inisiatif Tata Kelola

Kebutuhan perubahan tata kelola yang dirasa paling mendesak berdasarkan situasi dan kondisi saat ini, yaitu:

1. Penyusunan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Sumberdaya TIK, meliputi bagi-pakai SDM TIK, integrasi & inter-operabilitas data, bagi-pakai infrastruktur TIK
2. Pembentukan PMO TIK Kab. Pulang Pisau (lintas OPD)
3. Manajemen pelaporan pemerintahan berbasis online
4. Setiap Client menggunakan perimeter keamanan seminimalnya antivirus
5. Setiap Server menggunakan perimeter keamanan seminimalnya antivirus dan firewall
6. Untuk beberapa Wireless Access Point menggunakan password dengan enkripsi WPA/WPA2
7. Penggunaan Backup dan Restore
8. Dilakukan Kajian dan Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) agar terbentuk tata kelola keamanan informasi dan *security awareness*, sehingga dapat meningkatkan dan mengoptimalkan daya guna dari sistem informasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau
9. Dilakukan Pentesting minimal 1-2 kali setiap tahunnya

9.2.4 Inisiatif Pengelolaan SDM

Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Manusia TIK yang dirasakan paling mendesak berdasarkan situasi dan kondisi saat ini, yaitu:

1. Penyusunan peraturan daerah untuk pola jabatan fungsional TIK
2. Penyusunan standar kualifikasi dan kompetensi personil TIK

3. Pemetaan kebutuhan SDM TIK berdasarkan jabatan fungsional terhadap OPD
4. Pembentukan PMO TIK Kab. Pulang Pisau (lintas OPD), dimana Ka.Diskominfo berfungsi sebagai Ka. PMO TIK selaku pelaksana teknis Dewan TIK Kabupaten
5. Pelatihan professional berbasis sertifikasi internasional untuk SDM TIK di OPD
6. Belanja rekrutmen dan pelatihan TIK dengan kontrol terpusat dan alokasi anggaran yang memungkinkan tersebar di OPD
7. Manajemen pelayanan cuti & pemangkatan personil berbasis online
8. Manajemen pelaporan kinerja personil OPD berbasis mobile

REFERENSI

- Golden, Bernard (2013). Amazon Web Services For Dummies (<https://books.google.com/books?id=xSVwAAAAQBAJ>). For dummies. John Wiley & Sons. p. 234. ISBN 9781118652268. Retrieved 2014-07-06. "[...] traditional business intelligence or data warehousing tools (the terms are used so interchangeably that they're often referred to as BI/DW)
- Lamm, Blount, etc., Under Control: Governance Across the Government (<http://www.amazon.com/Under-Control-Governance-Across-Government/dp/1430215925>), retrieved 2013-04-06
- Bonazzi, R., Hussami, L. & Pigneur, Y. (2009), "Compliance Management is Becoming a Major Issue in IS Design", in D'atri, Alessandro; Saccà, Domenico, Information Systems: People, Organizations, Institutions, and Technologies (<https://web.archive.org/web/20120312075228/http://people.hec.unil.ch/ypigneur/files/2010/01/complianceManagement.pdf>) (PDF), Springer, pp. 391–398, doi:10.1007/978-3-7908-2148-2 (<https://doi.org/10.1007/978-3-7908-2148-2>), archived from the original (<http://people.hec.unil.ch/ypigneur/files/2010/01/complianceManagement.pdf>) (PDF) on 2012-03-12, retrieved 2013-04-06
- Racz, N., Weippl, E. & Seufert, A. (2010), Bart De Decker; Ingrid Schaumüller-Bichl, eds., A frame of reference for research of integrated GRC, Communications and Multimedia Security, 11th IFIP TC 6/TC 11 International Conference, CMS 2010 Proceedings, Berlin: Springer, pp. 106–117, ISBN 978-3-642-13240-7

LAMPIRAN

LAMPIRAN

METATOR INISIATIF

Lamp.1-1 Inisiatif Aplikasi Sistem Informasi

No.	APP-01
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Manajemen Kewilayahan Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Deskripsi Singkat	Menyediakan aplikasi pengelolaan tata ruang dan wilayah
Tujuan	Keterpaduan tata ruang wilayah, pemanfaatan ruang darat dan air, serta keterpaduan dari pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka melindungi fungsi ruang dan pencegahan terhadap dampak negatif terhadap lingkungan. Sehingga menghasilkan pemanfaatan sumber daya alam dan seluruh aset kewilayahan yang seimbang, serasi, dan berkembang di semua sektor.
Manfaat yang diharapkan	Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten, mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya, dan menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas.
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi Kebutuhan Sistem- Analisis dan Desain Sistem- Pengembangan Sistem (Coding)- Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing)- Instalasi & Konfigurasi Sistem- Pelatihan& Pendampingan- Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	<p>a. Platform Aplikasi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Berbasis web dan/atau mobile- Script programming: Java dan/atau PHP- RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle- O/S Linux Server, Windows Server <p>b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).</p>
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Ahli Geospasial & Tata Ruang, Business Analyst, System Analyst, SW Architech, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2020
Selesai	2020
Estimasi Biaya investasi	Rp 450,000,000

No.	APP-02
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Pengelolaan Barang dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Deskripsi Singkat	Administrasi masalah barang dan kekayaan daerah
Tujuan	Pengadministrasian barang dan aset daerah, meningkatkan mutu perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan maupun distribusi barang daerah, meningkatkan pengawasan atas penggunaan barang dan kekayaan daerah.
Manfaat yang diharapkan	Kemudahan, kecepatan dan keakuratan pengaksesan informasi barang daerah, pelaporan, rencana kebutuhan dan perhitungan nilai dalam semua laporan yang dihasilkan.
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (<i>Coding</i>) - Pengujian Sistem (<i>Unit & Integration Testing</i>) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan & Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (<i>secure</i>).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2021
Selesai	2021
Estimasi Biaya investasi	Rp 450,000,000

No.	APP-03
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Inspektorat
Deskripsi Singkat	Monitoring kegiatan yang sedang dilaksanakan dan memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya
Tujuan	Mengkaji kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan, menilai ketepatan pola kerja dan manajemen yang digunakan, menyesuaikan kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan
Manfaat yang diharapkan	Sebagai alat pendukung perencanaan, dapat mengetahui kemajuan program, memantau aktivitas dan hasil aktivitas program
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (<i>Coding</i>)

	<ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Sistem (<i>Unit & Integration Testing</i>) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2019
Selesai	2019
Estimasi Biaya investasi	Rp 375,000,000

No.	APP-04
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Deskripsi Singkat	Sistem yang digunakan dalam memnuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi
Tujuan	Menilai efisiensi penggunaan sumber daya, efektivitas pencapaian terhadap rencana, menilai kualitas hasil, dan pencapaian output dan outcome.
Manfaat yang diharapkan	Memberikan feedback untuk meningkatkan mutu aktivitas organisasi, akutabilitas kinerja, memberikan informasi dalam menunjang proses pengambilan keputusan, meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya, dan sebagai dasar peningkatan mutu informasi
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).

Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2021
Selesai	2021
Estimasi Biaya investasi	Rp 350,000,000

No.	APP-05
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Perkantoran (e-Office) Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Bagian Organisasi/ SETDA
Deskripsi Singkat	e-Office adalah suatu sistem yang berhubungan dengan administrasi yang secara maya memusatkan komponen-komponen sebuah organisasi, di mana data, informasi dan komunikasi dibuat melalui media telekomunikasi.
Tujuan	Memudahkan dan menyederhanakan sistem, prosedur, mekanisme, dan control kerja yang efektif serta meningkatkan mutu layanan administrasi
Manfaat yang diharapkan	Mempermudah administrasi yang terkait dengan data perkantoran
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Architech, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2019
Selesai	2019
Estimasi Biaya investasi	Rp 350,000,000

No.	APP-06
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Kearsipan Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Deskripsi Singkat	Aplikasi e-filling dan spreadsheet yang terintegrasi dengan e-Persuratan
Tujuan	Mengendalikan penciptaan arsip, pengefisienan dan pengefektifan pengelolaan arsip, dan terciptanya penyusutan arsip secara tepat
Manfaat yang diharapkan	Menyediakan sistem arsip persuratan yang rapi dan akuntabel, serta mudah ditelusuri. Serta menjadi bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan.
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Architech, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2019
Selesai	2019
Estimasi Biaya investasi	Rp 350,000,000

No.	APP-7
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Deskripsi Singkat	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian merupakan suatu sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk mengelola data, manajemen dan administrasi kepegawaian
Tujuan	Terwujudnya suatu sistem informasi manajemen yang berintegrasi dalam suatu jaringan komputer yang mampu menghasilkan informasi yang bermutu untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen kepegawaian
Manfaat yang diharapkan	Adanya pengelolaan data kepegawaian yang efektif, efisien serta tepat dan akurat. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan informasi data pegawai yang cepat, tepat, akuntabel dan up to date
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem

	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (<i>Coding</i>) - Pengujian Sistem (<i>Unit & Integration Testing</i>) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Architech, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasidan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2021
Selesai	2021
Estimasi Biaya investasi	Rp 400,000,000

No.	APP-08
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Perpustakaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Deskripsi Singkat	Pembuatan aplikasi perpustakaan untuk perpustakaan daerah dan perpustakaan sekolah
Tujuan	Memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, serta pemeliharaan data dapat terdokumentasi dengan baik.
Manfaat yang diharapkan	Meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat dan lebih mudah dalam pencarian, peminjaman, dan pemeliharaan data di perpustakaan
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil:

	Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2022
Selesai	2022
Estimasi Biaya investasi	Rp 300,000,000

No.	APP-09
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Manajemen Persuratan (e-Mail) Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Memudahkan dokumentasi persuratan di lingkungan pemerintah daerah beserta pengaturan akunnya
Tujuan	Menyediakan sistem arsip persuratan yang rapi dan akuntabel, serta mudah ditelusuri
Manfaat yang diharapkan	Surat masuk, surat keluar, notulen rapat, dokumen pendamping, edaran, SK, undangan rapat, himbauan dan lain-lain
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (<i>Coding</i>) - Pengujian Sistem (<i>Unit & Integration Testing</i>) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan & Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (<i>secure</i>).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Architech, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2020
Selesai	2020
Estimasi Biaya investasi	Rp 200,000,000

No.	APP-10
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Manajemen Auditing (e-Audit) Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Inspektorat
Deskripsi Singkat	Aplikasi pengelolaan proses audit dan basis data hasil audit; penilaian/rating hasil audit setiap OPD; alat bantu untuk mendukung perbaikan kinerja OPD secara berkelanjutan

Tujuan	Mengawasi struktur organisasi dan manajemen kegiatan e-Audit, serta menetapkan prosedur pengendalian khusus atas aplikasi akuntansi dan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua transaksi telah diotorisasi dan dicatat serta diolah seluruhnya dengan cermat dan tepat waktu
Manfaat yang diharapkan	Kebenaran dan ketidaksesuaian dapat ditemukan dengan cepat, dan laporan dapat dibuat secara sistematis.
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan & Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, PostgreSQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Architect, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2022
Selesai	2022
Estimasi Biaya investasi	Rp 350,000,000

No.	APP-11
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Pengelolaan TIK Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Aplikasi pengelola data dan informasi kinerja perencanaan, pembangunan dan pengembangan, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK
Tujuan	Adanya aplikasi untuk menginputkan dan merekap data/informasi TIK
Manfaat yang diharapkan	Memudahkan pengadministrasian terkait data dan informasi TIK
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan & Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP

	<ul style="list-style-type: none"> - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Architech, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasidan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2020
Selesai	2020
Estimasi Biaya investasi	Rp 350,000,000

No.	APP-12
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan & Desa Terpadu Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian, Kecamatan, Kelurahan
Deskripsi Singkat	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Layanan bagi Kecamatan & Desa secara Terpadu
Tujuan	Memudahkan dan mempercepat penanganan dan proses pelayanan publik hingga tingkat desa
Manfaat yang diharapkan	Semua data yang disimpan tidak akan mudah rusak dan hilang seperti sistem sebelumnya yang masih dicatat dalam buku
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (<i>Coding</i>) - Pengujian Sistem (<i>Unit & Integration Testing</i>) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Architech, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasidan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2019
Selesai	2019
Estimasi Biaya investasi	Rp 400,000,000

No.	APP-13
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Geospasial Terpadu Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Deskripsi Singkat	Pembangunan aplikasi SIG Terpadu terintegrasi dengan aplikasi SI Perkebunan, SI Pertanian, SI PUPR, SI Perumahan dan Pemukiman, SI Lingkungan Hidup, SI Penanggulangan Bencana, SI Sumber Daya Air dan SI Pengelolaan Perhubungan
Tujuan	Menyediakan akses terhadap Informasi Geospasial dan mewujudkan penyelenggaraannya yang berdaya guna dan berhasil guna baik di pemerintahan maupun berbagai aspek kehidupan masyarakat
Manfaat yang diharapkan	Mendukung sektor publik dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, serta mendukung dalam pengambilan keputusan, inventarisasi sumber daya alam, penataan ruang dan pembangunan sarana prasarana serta investasi bisnis dan ekonomi
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Architech, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasidan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2022
Selesai	2022
Estimasi Biaya investasi	Rp 600,000,000

No.	APP-14
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Air Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
Deskripsi Singkat	Monitoring kondisi kesehatan lingkungan dan air minum, pengelolaan proses perizinan terkait lingkungan hidup dan sumber daya air (AMDAL, UKL/UPL) serta monitoring pelaksanaannya
Tujuan	Memonitor status kesehatan lingkungan dan air minum dan pengurusan perizinan dan mendistribusikan informasinya ke

	masyarakat
Manfaat yang diharapkan	Memberikan gambaran kondisi kesehatan lingkungan dan sumber daya air secara umum sehingga dapat diakses banyak orang
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2020
Selesai	2020
Estimasi Biaya investasi	Rp 400,000,000

No.	APP-15
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Manajemen Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum
Deskripsi Singkat	Aplikasi pengelola data dan informasi Ke-PU-an
Tujuan	Monitoring status dan kondisi Ke-PU-an serta perencanaan peningkatan dan pemeliharaan bidang ke-PU-an
Manfaat yang diharapkan	Pembangunan jalan/jembatan, target, progress, permasalahan, kendala, solusi, dan alternatif solusi, deviasi terhadap target
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).

Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2019
Selesai	2019
Estimasi Biaya investasi	Rp 450,000,000

No.	APP-16
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Pengelolaan Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
Deskripsi Singkat	Pembuatan aplikasi yang digunakan untuk mengelola data sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Pulang Pisau
Tujuan	Mempermudah mengelola data sarana dan prasarana perhubungan yang digunakan
Manfaat yang diharapkan	Memperoleh informasi kondisi infrastruktur perhubungan di Kabupaten Pulang Pisau secara cepat sehingga mempercepat penanganan jika ada kerusakan, mempermudah penginputan dan pencarian data saran dan prasaran perhubungan
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2020
Selesai	2020
Estimasi Biaya investasi	Rp 450,000,000

No.	APP-17
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Pulang Pisau

Perangkat Daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Deskripsi Singkat	Menyediakan informasi penataan dan monitoring kawasan perumahan dan permukiman
Tujuan	Mampu memberikan informasi tambahan kepada masyarakat, investor dan pemerintah dalam hal perumahan dan permukiman, melihat lahan yang tersedia,
Manfaat yang diharapkan	Adanya informasi mengenai kepastian hukum atas kelayakan, kenyamanan, keamanan yang sesuai dengan fungsinya yaitu peruntukan lahan untuk lahan permukiman dilengkapi gambar arsitektur, gambar situasi bangunan perumahan & permukiman, status hukum tanah/lahan, serta luas tapak bangunan serta kondisi fisik bangunan
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2020
Selesai	2020
Estimasi Biaya investasi	Rp 400,000,000

No.	APP-18
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Deskripsi Singkat	Sistem informasi untuk mengelola pelaksanaan program dan kegiatan serta data dan informasi bidang tata ruang dan bangunan
Tujuan	Untuk penyebarluasan informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar mudah diakses oleh masyarakat, pelaku dunia usaha dan investor yang membutuhkan dan akan memanfaatkan ruang di Kab. Pulang Pisau
Manfaat yang diharapkan	Setelah mengimplementasikan sistem ini, diharapkan dapat menghindarkan terjadinya banjir, kemacetan, serta memudahkan pembangunan infrastruktur dan transportasi, hingga pembangunan

	perumahan dan perkantoran
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (<i>Coding</i>) - Pengujian Sistem (<i>Unit & Integration Testing</i>) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Architech, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasidan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2019
Selesai	2019
Estimasi Biaya investasi	Rp 450,000,000

No.	APP-19
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Deskripsi Singkat	Memberikan informasi tentang perizinan dan penanaman modal daerah
Tujuan	Membantu pemerintah daerah dalam melakukan pencatatan, pemerosesan dan penanganan perizinan serta pencetakansuratizin sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dan memberikan citra pemerintah daerah yang positif
Manfaat yang diharapkan	Berkemampuan menangani banyak izin dengan mudah dan cepat, dapat melakukan pelaporan, pencetakan, dan sebagai bank data dalam menyediakan informasi bagi publik
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server

	b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2019
Selesai	2019
Estimasi Biaya investasi	Rp 450,000,000

No.	APP-20
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Pertanian Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
Deskripsi Singkat	Monitoring produksi pertanian
Tujuan	Memberikan informasi yang tepat kepada petani dalam proses pengambilan keputusan berusaha tani untuk meningkatkan produktivitasnya serta memperbaiki aksesibilitas petani dengan cepat terhadap informasi pasar, input produksi, tren konsumen, yang secara positif berdampak pada kualitas dan kuantitas produksi
Manfaat yang diharapkan	Membuka akses petani terhadap segala informasi pertanian, berkembangnya pertanian lahan marginal, memfasilitasi dokumentasi informasi pertanian di tingkat lokal yang dapat diakses secara lebih luas
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan & Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Architech, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2020
Selesai	2020
Estimasi Biaya investasi	Rp 400,000,000

No.	APP-25
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Perkebunan Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan
Deskripsi Singkat	Pengembangan Sistem Informasi Perkebunan di Kabupaten Pulang Pisau
Tujuan	Menyediakan data terkini dan lengkap terhadap hasil produksi perkebunan
Manfaat yang diharapkan	Menghasilkan sistem yang mampu memberikan informasi mengenai kondisi perkebunan di Kabupaten Pulang Pisau secara real time
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (<i>Coding</i>) - Pengujian Sistem (<i>Unit & Integration Testing</i>) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan & Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Architech, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2020
Selesai	2020
Estimasi Biaya investasi	Rp 400,000,000

No.	APP-26
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Perikanan Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Perikanan
Deskripsi Singkat	Aplikasi sebagai bahan dasar dalam usaha memperoleh gambaran tentang kondisi sumberdaya yang terdapat di perairan secara kuantitatif dan kualitatif
Tujuan	Memudahkan sistem pendataan, memudahkan penyebaran informasi, serta menyediakan data yang cepat terkait perikanan
Manfaat yang diharapkan	Masyarakat dapat mengerti karakteristik perikanan Indonesia, menciptakan rasa kepemilikan yang bertanggung jawab terhadap perikanan Indonesia, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan secara valid dan lengkap sebagai bahan kebijakan
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (<i>Coding</i>) - Pengujian Sistem (<i>Unit & Integration Testing</i>)

	<ul style="list-style-type: none"> - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2020
Selesai	2020
Estimasi Biaya investasi	Rp 400,000,000

No.	APP-23
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Perindustrian Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Deskripsi Singkat	Pembangunan sistem informasi untuk mengelola data dan informasi bidang perindustrian; penyelenggaraan pelayanan & perizinan serta fasilitasi dan insentif bidang perindustrian
Tujuan	Sarana pemasaran yang mudah dan efisien, meningkatkan efisiensi kegiatan produksi, menciptakan sinergi perusahaan, dan meningkatkan produktivitas dunia industri
Manfaat yang diharapkan	Memberikan solusi yang dapat membantu urusan bisnis secararingkas dan tidak perlu lagi memakan biaya yang begitu besar
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator

	Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2019
Selesai	2019
Estimasi Biaya investasi	Rp 400,000,000

No.	APP-24
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Perdagangan Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Deskripsi Singkat	Pembangunan sistem informasi untuk mengelola data dan informasi bidang perdagangan penyelenggaraan pelayanan & perizinan serta fasilitasi dan insentif bidang perdagangan
Tujuan	Menentukan kebijakan harga, termasuk penetapan harga patokan serta waktu dan jadwal impor, serta mengevaluasi kondisi pasar untuk mendeteksi masalah pemasaran
Manfaat yang diharapkan	Mendistribusikan informasi kepada pihak berwenang dalam bentuk laporan untuk membantu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian harga di pasar
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan & Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2020
Selesai	2020
Estimasi Biaya investasi	Rp 350,000,000

No.	APP-29
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Koperasi dan UKM Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Deskripsi Singkat	Pembuatan Aplikasi yang digunakan untuk mengelola informasi dan membantu Koperasi serta Industri Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Pulang Pisau

Tujuan	Mengumpulkan data Koperasi dan UKM dan pemeliharaannya secara online dan interaktif, menyediakan informasi tentang UKM secara cepat, dinamis dan mudah didapat
Manfaat yang diharapkan	Sebagai sarana untuk memperoleh berbagai informasi yang terkait dengan usahanya dan dapat meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada masyarakat umum
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2020
Selesai	2020
Estimasi Biaya investasi	Rp 350,000,000

No.	APP-30
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Deskripsi Singkat	Membantu memberikan informasi promosi pariwisata dan database pelaku usaha pariwisata daerah
Tujuan	Menyediakan database potensi dan pelaku pariwisata daerah
Manfaat yang diharapkan	Identifikasi potensi wisata, kemudahan pengelolaan dan inventarisasi potensi dan pelaku usaha pariwisata daerah serta mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi wisata serta terdapatnya sarana promosi pariwisata Pulang Pisau.
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP

	<ul style="list-style-type: none"> - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2022
Selesai	2022
Estimasi Biaya investasi	Rp 350,000,000

No.	APP-31
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Seni dan Budaya Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Deskripsi Singkat	Membantu memberikan informasi promosi dan profiling kegiatan kebudayaan daerah
Tujuan	Menyediakan website profil dan dokumentasi kegiatan dan informasi kebudayaan daerah
Manfaat yang diharapkan	Adanya data yang accessible serta kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi, data, sejarah dari kebudayaan dan kearifan lokal daerah. Selain itu mempermudah aktivitas profiling dan dokumentasi kegiatan budaya daerah guna menjaga nilai kearifan budaya dan seni lokal.
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan & Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan

Mulai	2022
Selesai	2022
Estimasi Biaya investasi	Rp 250,000,000

No.	APP-32
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Sosial dan Kesejahteraan Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Sosial
Deskripsi Singkat	Sistem manajemen kesejahteraan sosial daerah terpadu.
Tujuan	Memudahkan pengaksesan data kesejahteraan sosial daerah dari berbagai sumber external yang ada (OPD dan UPTD, Badan Daerah serta Kementerian)
Manfaat yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan integrasi data sosial masyarakat - Kesatuan data dan informasi sosial daerah
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (<i>Coding</i>) - Pengujian Sistem (<i>Unit & Integration Testing</i>) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	<p>a. Platform Aplikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server <p>b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).</p>
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	<p>Komponen biaya (RAB) terdiri dari:</p> <p>Personil:</p> <p>Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator</p> <p>Non Personil:</p> <p>ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan</p>
Mulai	2020
Selesai	2020
Estimasi Biaya investasi	Rp 350,000,000

No.	APP-33
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Bina Orsospol Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Deskripsi Singkat	Pengembangan aplikasi database dan monitoring aktivitas orsospol daerah
Tujuan	Memudahkan pendataan dan pengawasan organisasi politik di tingkat daerah
Manfaat yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan dalam mengawasi, memantau perkembangan pendataan organisasi orsospol. - Adanya data analitikal berbasis geografis/ infografis untuk perkembangan orsospol daerah
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem

	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2022
Selesai	2022
Estimasi Biaya investasi	Rp 250,000,000

No.	APP-30
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Deskripsi Singkat	Pengembangan Sistem Informasi pengelolaan kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat.
Tujuan	Memudahkan proses pengelolaan, monitoring dan sosialisasi kegiatan dan program- program daerah bagi pemberdayaan dan pengembangan masyarakat desa.
Manfaat yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan penginputan dan penyebarluasan informasi terkait program dan kegiatan pembinaan masyarakat dan desa - Terjalannya harmonisasi dan sinergitas Program Antara Desa - Meningkatnya efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumber dana lainnya - Mempermudah proses analisa dan monitoring efektivitas program pemberdayaan
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle

	- O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (<i>secure</i>).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2019
Selesai	2019
Estimasi Biaya investasi	Rp 400,000,000

No.	APP-31
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Pengelolaan Linmas Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Deskripsi Singkat	Pengembangan aplikasi pengelolaan organisasi perlindungan masyarakat (Linmas) yang meliputi fungsi monitoring, penugasan, penggajian, pengelolaan organisasi dan pemberdayaan organisasi serta SDM seluruh organisasi Linmas di wilayah Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau.
Tujuan	Memudahkan proses manajemen, monitoring, pendataan dan pengelolaan organisasi dan pemberdayaan dari SDM Linmas di seluruh lingkungan pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau.
Manfaat yang diharapkan	Mempermudah proses monitoring, pendataan dan pengelolaan organisasi, SDM, dan tata kelola Linmas di hingga ke tingkat desa.
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (<i>Unit & Integration Testing</i>) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan & Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (<i>secure</i>).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2021

Selesai	2021
Estimasi Biaya investasi	Rp 275,000,000

No.	APP-32
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
Deskripsi Singkat	Pengembangan aplikasi Kepemudaan & Olahraga dengan fungsi pendataan potensi kepemudaan, kegiatan dan pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan di tingkat pedesaan (karang taruna dll)
Tujuan	Memudahkan aktivitas monitoring potensi pemuda daerah, serta manajemen kegiatan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan di tingkat daerah
Manfaat yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan dalam mendata pemuda berpotensi dan berprestasi daerah, - Memudahkan proses manajemen kegiatan, pemberdayaan pemuda serta aktivitas monitoring organisasi kepemudaan daerah.
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (<i>Coding</i>) - Pengujian Sistem (<i>Unit & Integration Testing</i>) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (<i>secure</i>).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2022
Selesai	2022
Estimasi Biaya investasi	Rp 250,000,000

No.	APP-33
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
Deskripsi Singkat	Pengembangan aplikasi SI Kesehatan masyarakat dengan fungsi input data kesehatan masyarakat di tingkat Kecamatan, Puskesmas, dan UPTD guna menghasilkan report data yang dibutuhkan oleh masing masing elemen organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan

	dengan termasuk di dalamnya aplikasi klinik kesehatan terintegrasi.
Tujuan	Memudahkan proses monitoring kesehatan masyarakat melalui kemudahan proses input, analisis dan proses berbagi tukar data kesehatan
Manfaat yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan proses tabulasi data dari data yang diperoleh dan diinput dari seluruh UPTD - Memudahkan proses olah data kesehatan bulanan, semester dan tahunan daerah ke dalam infografis - Memudahkan proses berbagi tukar dan update data antar bagian, dan sub bagian di lingkungan dinas kesehatan.
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan & Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	<p>a. Platform Aplikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server <p>b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).</p>
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	<p>Komponen biaya (RAB) terdiri dari:</p> <p>Personil:</p> <p>Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator</p> <p>Non Personil:</p> <p>ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan</p>
Mulai	2020
Selesai	2020
Estimasi Biaya investasi	Rp 400,000,000

No.	APP-34
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Deskripsi Singkat	Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru dan aplikasi dashboard data pendidikan
Tujuan	Memudahkan proses monitoring peserta didik, kurikulum, ppdb dan proses input data pendidikan
Manfaat yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi aktivitas input data pendidikan melalui proses sekali input data - Kemudahan manajemen ppdb - Kemudahan monitoring aktivitas pendidikan di lingkungan pemerintahan
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing)

	<ul style="list-style-type: none"> - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Architech, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasidan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2022
Selesai	2022
Estimasi Biaya investasi	Rp 400,000,000

No.	APP-35
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Deskripsi Singkat	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen tenaga kerja dan transmigrasi. Aplikasi berfungsi untuk memudahkan proses manajemen program ketenagakerjaan, data tenaga kerja, pencari kerja, kerjasama industrial, pembinaan & pelatihan tenaga kerja/ pengangguran, penyebaran informasi ketenagakerjaan, proses pelayanan calon TKI (sehingga pemrosesan data menjadi lebih cepat dan efisien) dan manajemen data ketransmigrasian
Tujuan	Memudahkan aktivitas pengawasan, pemantauan dan manajemen ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi
Manfaat yang diharapkan	Kemudahan monitoring pembinaan, penempatan naker, pelatihan kerja, pendataan pencari kerja & pengangguran serta pengelolaan kegiatan pembinaan hubungan kerjasama industrial.
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).

Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2019
Selesai	2019
Estimasi Biaya investasi	Rp 250,000,000

No.	APP-36
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Deskripsi Singkat	Pengembangan aplikasi monitoring program Keluarga Berencana dengan fungsi pengelolaan data dan informasi keluarga dan Dashboard Data : Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, PLKB/IMP, Bina Keluarga Lansia, PIKRM dan UPPKS.
Tujuan	Membantu memonitor program program keluarga berencana.
Manfaat yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan monitoring program pembinaan keluarga, remaja, balita, lansia dan keluarga berencana daerah - Kemudahan integrasi data Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, PLKB/IMP, Bina Keluarga Lansia, PIKRM dan UPPKS.
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2022
Selesai	2022
Estimasi Biaya investasi	Rp 350,000,000

No.	APP-37
-----	--------

Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Deskripsi Singkat	Pengembangan Aplikasi Penanggulangan Bencana berbasis SIG yang memudahkan proses kolaborasi dan proses komando cepat tanggap bencana bagi OPD- OPD yang terkait.
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> -Memudahkan pengawasan kebencanaan secara real time, manajemen program mitigasi bencana daerah dan koordinasi penanggulangan kebencanaan bagi OPD-OPD yang terkait dalam kegiatan mitigasi Bencana. -Kemudahan koordinasi BPBD dengan command center dan seluruh OPD- OPD yang terkait dalam mengawasi dan aktivitas penanggulangan bencana.
Manfaat yang diharapkan	Memudahkan proses mitigasi bencana bagi masyarakat dan koordinasi bagi seluruh OPD- OPD yang terkait dalam penanggulangan Bencana di lingkungan pemerintahan Pulang Pisau.
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2020
Selesai	2020
Estimasi Biaya investasi	Rp 350,000,000

No.	APP-38
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Aspirasi Rakyat (e-Aspirasi) Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Deskripsi Singkat	Pengembangan sistem informasi media partisipasi publik dalam memberikan feedback terhadap kebijakan publik. Aplikasi yang dikembangkan mendukung seluruh platform yang populer digunakan oleh masyarakat Pulang Pisau sehingga setiap bentuk pengaduan dapat dijangkau, diawasi dan direspon dengan mudah oleh OPD/ pihak pemerintah yang berwenang dan diawasi/ direspon oleh

	masyarakat.
Tujuan	Memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyumbangkan aspirasinya terhadap pemerintahan kabupaten.
Manfaat yang diharapkan	Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau mudah dalam menyumbangkan aspirasi secara langsung tanpa terhalang keterbatasan media, situasi dan kondisi serta hierarki pemerintahan dalam menyumbangkan aspirasinya terhadap pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2022
Selesai	2022
Estimasi Biaya investasi	Rp 350,000,000

No.	APP-43
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Legislatif Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Deskripsi Singkat	Sistem informasi pengelolaan proses legislasi daerah
Tujuan	Mempermudah dalam proses pembentukan peraturan daerah
Manfaat yang diharapkan	Menjadi fasilitas pendukung lembaga legislatif daerah dalam melakukan tugasnya
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (<i>Coding</i>) - Pengujian Sistem (<i>Unit & Integration Testing</i>) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server

	b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2023
Selesai	2023
Estimasi Biaya investasi	Rp 350,000,000

No.	APP-40
Nama Kegiatan/Inisiatif	Katalog Kebijakan Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Bagian Hukum
Deskripsi Singkat	Pemeliharaan Aplikasi JDIIH
Tujuan	Sarana untuk mengajukan draft hukum tiap SKPD
Manfaat yang diharapkan	Sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum, meningkatkan penyebaran dan pemahaman pengetahuan hukum, memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya serta meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Architect, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2019
Selesai	2019
Estimasi Biaya investasi	Rp 175,000,000

No.	APP-41
-----	--------

Nama Kegiatan/Inisiatif	Revitalisasi Portal Web Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Pengembangan desain portal web Kabupaten Pulang Pisau
Tujuan	Media online OPD Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau. Melengkapi fitur dan fungsionalitas website pemerintah daerah.
Manfaat yang diharapkan	Portal web yang diakses oleh masyarakat menampilkan info dengan fitur lengkap dan menarik bagi masyarakat
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2020
Selesai	2020
Estimasi Biaya investasi	Rp 225,000,000

No.	APP-42
Nama Kegiatan/Inisiatif	Portal Informasi Publik Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Bagian Hubungan Masyarakat
Deskripsi Singkat	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan konten ke arah yang bernilai edukatif bagi masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pulang Pisau serta berisi konten yang dibutuhkan dan menarik bagi masyarakat yang didukung kelengkapan fitur dan kemudahan desain navigasi dan tampilan website sehingga memudahkan masyarakat dalam mensortir, dan membaca berita. - Mobile friendly web.
Tujuan	Pengembangan konten ke arah yang bernilai edukatif bagi masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pulang Pisau serta berisi konten yang dibutuhkan dan menarik bagi masyarakat
Manfaat yang diharapkan	Isi portal lebih edukatif sesuai kebutuhan
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing)

	<ul style="list-style-type: none"> - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2021
Selesai	2021
Estimasi Biaya investasi	Rp 225,000,000

No.	APP-43
Nama Kegiatan/Inisiatif	Portal Pelayanan dan Pengaduan Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Bagian Hubungan Masyarakat
Deskripsi Singkat	Pengembangan aplikasi Senjang Pulang Pisau menjadi smart app yang mengakomodir pertanyaan dan pengaduan masyarakat yang mendukung fitur geolokasi, secara langsung menuju pemerintah terkait, serta terpadu di lingkungan pemerintahan dan eskalasi pemerintahan.
Tujuan	Kemudahan masyarakat dalam menyalurkan pengaduan dan pemerintah daerah dalam merespon
Manfaat yang diharapkan	Optimalnya fasilitas pelayanan dan pengaduan
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator

	Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2022
Selesai	2022
Estimasi Biaya investasi	Rp 400,000,000

No.	APP-44
Nama Kegiatan/Inisiatif	Portal Aplikasi Internal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Pengembangan portal untuk mendukung media komunikasi dan kolaborasi pegawai pemerintahan/ ASN yang menyediakan layanan seperti aplikasi email, informasi internal pemerintahan, e-office/ E-TND dan akses terhadap aplikasi fungsional sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing masing pegawai yang menerapkan konsep single sign on.
Tujuan	Menyediakan portal internal terpadu bagi pegawai/ ASN di lingkungan pemerintahan kabupaten Pulang Pisau
Manfaat yang diharapkan	Terbangunnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintah berbasis Elektronik
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (<i>Unit & Integration Testing</i>) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2019
Selesai	2019
Estimasi Biaya investasi	Rp 400,000,000

No.	APP-45
Nama Kegiatan/Inisiatif	Sistem Informasi Eksekutif Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Dashboard Informasi Eksekutif merupakan salah satu aplikasi

	Decision Support System (DSS) dimana data dan informasi yang ditampilkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh eksekutif baik Kepala Daerah atau Kepala Instansi tertentu
Tujuan	Adanya kebutuhan dari pihak eksekutif pemerintahan akan informasi yang lengkap tersaji secara singkat dan ringkas dalam pelaporannya, memiliki daya guna tinggi, tepat sasaran kepada apa yang dibutuhkan, dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Informasi yang dihasilkan merupakan ringkasan dari hasil analisis terhadap pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.
Manfaat yang diharapkan	Para eksekutif bisa mendapatkan informasi yang diinginkan dengan lebih cepat dan mudah
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (<i>Unit & Integration Testing</i>) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan & Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2023
Selesai	2023
Estimasi Biaya investasi	Rp 450,000,000

No.	APP-56
Nama Kegiatan/Inisiatif	Data Warehouse & Government Service Bus Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Pembangunan data warehouse sebagai repositori yang mendukung interoperabilitas data antar lini pemerintahan organisasi Pemerintah Daerah dan Pihak Eksternal Pemerintahan
Tujuan	Pembangunan data warehouse sebagai pusat data dan informasi terpadu antar OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau.
Manfaat yang diharapkan	Dapat terintegrasinya data-data yang dibutuhkan antar OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem

	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah, kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2022
Selesai	2023
Estimasi Biaya investasi	Rp 1,000,000,000

No.	APP-47
Nama Kegiatan/Inisiatif	Data Base TIK Kabupaten Pulang Pisau Berbasis SIG
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Pembangunan data base TIK berbasis SIG diperlukan guna mengetahui kondisi eksisting penerapan TIK saat ini dan sebagai pendukung pengambilan keputusan kebijakan pengembangan TIK di Kabupaten Pulang Pisau ke depan.
Tujuan	Pembangunan data base TIK berbasis SIG sebagai pendukung pengambilan keputusan kebijakan pengembangan TIK di Kabupaten Pulang Pisau ke depan.
Manfaat yang diharapkan	Dapat terintegrasinya data-data TIK di Kabupaten Pulang Pisau yang dibutuhkan pemangku kepentingan TIK baik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kesandian dan Statistik, maupun OPD di Pemerintahan Pulang Pisau
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Sistem - Analisis dan Desain Sistem - Pengembangan Sistem (Coding) - Pengujian Sistem (Unit & Integration Testing) - Instalasi & Konfigurasi Sistem - Pelatihan& Pendampingan - Pemeliharaan Sistem
Spesifikasi Teknis	a. Platform Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis web dan/atau mobile - Script programming: Java dan/atau PHP - RDBMS: MySQL, Postgre SQL dan/atau Oracle - O/S Linux Server, Windows Server b. Mendukung integrasi berbasis SOA, antar muka yang mudah,

	kinerja yang cepat dan aman (secure).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2019
Selesai	2019
Estimasi Biaya investasi	Rp 400,000,000

Inisiatif Infrastruktur

No.	INF-01
Nama Kegiatan/Inisiatif	Pemeliharaan dan Penambahan kapasitas bandwidth di Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Kegiatan penyediaan bandwidth di lingkungan pemerintahan
Tujuan	Tersedianya akses internet dan sistem informasi yang dapat melayani kebutuhan operasional Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Manfaat yang diharapkan	Meningkatnya integritas dan availability data serta memperpanjang umur pakai server dan aplikasi.
Ruang lingkup	Penambahan bandwidth dari tahun ke tahun berdasarkan peningkatan demand jaringan internet dari OPD yang ada di lingkungan pemerintahan
Spesifikasi Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Local loop (FO) dengan kapasitas 500 Mbps (clear channel) yang ditingkatkan per-tahunnya secara bertahap. Terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> a. Bandwidth ke Backbone Internasional 100 Mbps Simetri CIR (1:1) dengan media FO. b. Bandwidth ke Backbone Lokal (IIX) sebesar 400Mbps Simetri CIR (1:1) dengan media FO. 6. Co-location backup webserver dan instalasinya di NOC vendor dengan fasilitas security (Firewall, IPS, Anti SPAM dll.) dan load balancing. 7. IP Publik minimal 64. 8. Fasilitas MRTG bandwidth report secara terpisah untuk setiap sub interface (internasional dan IIX). 9. Akses ke portal monitoring jaringan WAN Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau 10. Service Level Agreement (SLA) Availability 99% (Standard).
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: System Engineer/Network Engineer/Ahli Keamanan Informasi Non Personil: Sesuai kebutuhan berdasarkan persyaratan masing-masing perangkat.
Mulai	2019
Selesai	2023
Estimasi Biaya investasi	Rp 10,000,000,000

No.	INF-02
Nama Kegiatan/Inisiatif	Pengadaan dan Pemeliharaan IP PBX/VoIP dalam 4 tahun di Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	IP PBX adalah perangkat switching komunikasi telepon dan data berbasis teknologi Internet Protocol (IP) yang mengendalikan ekstension telepon analog (TDM) maupun ekstension IP Phone.
Tujuan	Memudahkan komunikasi baik di lingkungan internal maupun eksternal serta mengurangi belanja biaya komunikasi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Manfaat yang diharapkan	Meningkatnya efektivitas komunikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Ruang lingkup	Pengadaan Perangkat IP PBX Instalasi dan Pelatihan

Spesifikasi Teknis	- Menggunakan teknologi Open Platform - Perangkat Switching IP PBX - Phone Device
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	- Perangkat Switching IP PBX - Phone Device - Pelatihan
Mulai	2020
Selesai	2023
Estimasi Biaya investasi	Rp 2,000,000,000

No.	INF-03
Nama Kegiatan/Inisiatif	Pembangunan NOC dan Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perangkat Jaringan (Load Balancer, Switching Device, Network Monitoring System) di Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau akan meningkat pula jumlah user dan bandwidth serta adanya jaringan komunikasi yang handal beserta NOC pendukung
Tujuan	Mengembangkan fasilitas jaringan komunikasi mencakup seluruh Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Manfaat yang diharapkan	Tersedianya layanan jaringan komunikasi data yang handal yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh OPD maupun pihak terkait lainnya.
Ruang lingkup	1. Perancangan Jaringan Komunikasi 2. Penyiapan fisik Jaringan Komunikasi 3. Pengadaan Perangkat Jaringan Komunikasi 4. Pelaksanaan pemasangan perangkat Jaringan Komunikasi 5. Pengujian Perangkat Jaringan Komunikasi 6. Pelaporan Pekerjaan
Spesifikasi Teknis	1. Design Jaringan 2. Perangkat Jaringan 3. Spesifikasi Tenaga ahli dengan fungsi sebagai berikut: a. Tenaga Ahli Jaringan Komputer b. Tenaga Ahli Sipil c. Tenaga Ahli K3 4. Implementasi Pekerjaan mulai dari: a. Persiapan b. Perancangan c. Pelaksanaan d. Migrasi e. Pengujian f. Pelaporan
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	1. NOC 2. Network Monitoring System 3. Switching Device 4. Load Balancer 5. Pekerjaan Sipil 6. Pengawasan
Mulai	2020
Selesai	2020
Estimasi Biaya investasi	Rp 1,000,000,000

No.	INF-04
Nama Kegiatan/Inisiatif	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perangkat Storage (Network Attached Storage, Storage Area Network and Switching) di Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau akan meningkat pula jumlah user dan bandwidth serta adanya jaringan komunikasi yang handal.
Tujuan	Mengembangkan fasilitas jaringan komunikasi mencakup seluruh Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Manfaat yang diharapkan	Tersedianya layanan jaringan komunikasi data yang handal yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh OPD maupun pihak terkait lainnya.
Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perancangan Jaringan Komunikasi 2. Penyiapan fisik Jaringan Komunikasi 3. Pengadaan Perangkat Jaringan Komunikasi 4. Pelaksanaan pemasangan perangkat Jaringan Komunikasi 5. Pengujian Perangkat Jaringan Komunikasi 6. Pelaporan Pekerjaan
Spesifikasi Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Design Jaringan 2. Perangkat Jaringan 3. Spesifikasi Tenaga ahli dengan fungsi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga Ahli Jaringan Komputer b. Tenaga Ahli Sipil c. Tenaga Ahli K3 4. Implementasi Pekerjaan mulai dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Persiapan b. Perancangan c. Pelaksanaan d. Migrasi e. Pengujian f. Pelaporan
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Network Attached Storage 2. Storage Area Network and Switching 3. Pekerjaan Sipil 4. Pengawasan
Mulai	2021
Selesai	2021
Estimasi Biaya investasi	Rp 1,000,000,000

No.	INF-05
Nama Kegiatan/Inisiatif	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Perangkat Keamanan Sistem (Firewall, Application Security Manager, Unified Threat Management, Enterprise Anti Virus) di Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau akan meningkat pula jumlah user dan bandwidth serta adanya jaringan komunikasi yang handal.

Tujuan	Mengembangkan fasilitas jaringan komunikasi mencakup seluruh desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Manfaat yang diharapkan	Tersedianya layanan jaringan komunikasi data yang handal yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh OPD maupun pihak terkait lainnya.
Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perancangan Jaringan Komunikasi 2. Penyiapan fisik Jaringan Komunikasi 3. Pengadaan Perangkat Jaringan Komunikasi 4. Pelaksanaan pemasangan perangkat Jaringan Komunikasi 5. Pengujian Perangkat Jaringan Komunikasi 6. Pelaporan Pekerjaan
Spesifikasi Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Design Jaringan 2. Perangkat Jaringan 3. Spesifikasi Tenaga ahli dengan fungsi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga Ahli Jaringan Komputer b. Tenaga Ahli Sipil c. Tenaga Ahli K3 4. Implementasi Pekerjaan mulai dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Persiapan b. Perancangan c. Pelaksanaan d. Migrasi e. Pengujian f. Pelaporan
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Firewall 2. Application Security Manager 3. Unified Threat Management 4. Enterprise Anti Virus 5. Pekerjaan Sipil 6. Pengawasan
Mulai	2022
Selesai	2022
Estimasi Biaya investasi	Rp 1,000,000,000

No.	INF-06
Nama Kegiatan/Inisiatif	Peningkatan Ketersediaan dan Keamanan Data Center (DRC, Catu Daya, Keamanan Fisik, Access Control) di Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur Data Center diperlukan untuk menjaga ketersediaan akses terhadap data pada data center, untuk itu diperlukan peningkatan infrastruktur daya, fisik dan sistem.
Tujuan	Menajaga kemandirian fisik ketersediaan dan terpeliharanya infrastruktur Data Center
Manfaat yang diharapkan	Meningkatnya keamanan Data Center
Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Perangkat Keamanan Fisik 2. Pelaksanaan pemasangan Perangkat Keamanan Fisik 3. Pengujian Perangkat Keamanan Fisik 4. Pelaporan Pekerjaan
Spesifikasi Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Keamanan Fisik 2. Spesifikasi Tenaga ahli dengan fungsi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Project Leader b. Tenaga Ahli Data Center

	c. Tenaga Ahli System Security d. Project Officer 4. Implementasi Pekerjaan mulai dari: a. Persiapan b. Perancangan c. Pelaksanaan d. Migrasi e. Pengujian f. Pelaporan
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	1. Perangkat Catu Daya 2. Security Fisik 3. APAR (alat Pemadam Kebakaran) d. Access Control e. Grounding & Perangkat Anti Petir f. AC (Air Conditioner)
Mulai	2023
Selesai	2023
Estimasi Biaya investasi	Rp 2,000,000,000

No.	INF-07
Nama Kegiatan/Inisiatif	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perangkat Komputasi (Middle-end Multicore Server) di Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas perangkat pemroses pada server diperlukan guna mendukung optimasi layanan digital di tingkat pemerintahan dan publik (yang terus meningkat dari tahun ke tahun)
Tujuan	Meningkatkan kemampuan komputasi pengolahan data
Manfaat yang diharapkan	Tersedianya performa sistem komputasi pengolahan data yang cepat dan handal
Ruang lingkup	1. Pengadaan Perangkat Komputasi 2. Pelaksanaan pemasangan Perangkat Komputasi 3. Pengujian Perangkat Komputasi 4. Pelaporan Pekerjaan
Spesifikasi Teknis	1. Perangkat Komputasi Server 2. Spesifikasi Tenaga ahli dengan fungsi sebagai berikut: a. Project Leader b. Tenaga Ahli System Engineer c. Project Officer 3. Implementasi Pekerjaan mulai dari: a. Persiapan b. Pengadaan Barang c. Pelaksanaan/ Instalasi d. Pengujian e. Pelatihan f. Pendampingan g. Pelaporan
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Perangkat Komputasi Server
Mulai	2020
Selesai	2023
Estimasi Biaya investasi	Rp 2,000,000,000

No.	INF-08
Nama Kegiatan/Inisiatif	Pemeliharaan Command Center & Data Center di Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Kegiatan pemeliharaan Command Center untuk menjamin ketersediaan dan kelayakan layanan Command Center
Tujuan	Pemeliharaan seluruh perangkat Command Center dan Data Center
Manfaat yang diharapkan	Terjaga dan terawatnya seluruh fasilitas di dalam Command Center
Ruang lingkup	Aktivitas pemeliharaan Command Center dan Data Center
Spesifikasi Teknis	<p>Pengecekan dan pemeliharaan perangkat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan seluruh perangkat dan fungsi di dalam Command Center 2. Battery 3. UPS Systems 4. Power generators, including fuel and components. 5. HVAC infrastructure 6. Switchgear, circuit breakers, PDUs, and ATS. 7. Infrastruktur 8. Security systems and access control <p>Spesifikasi Tenaga dengan fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Project Leader b. Tenaga Ahli System Engineer c. Tenaga Ahli Command Center d. Project Officer
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Jasa Pemeliharaan Command Center dan Data Center
Mulai	2019
Selesai	2023
Estimasi Biaya investasi	Rp 1,250,000,000

No.	INF-09
Nama Kegiatan/Inisiatif	Pengembangan Fungsi Command Center di Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Pengembangan layanan dan fitur Command Center guna memenuhi kebutuhan
Tujuan	Mengembangkan dan menambah fungsi layanan command center
Manfaat yang diharapkan	Bertambahnya fungsi dan manfaat dari Command Center
Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Perangkat Command Center 2. Pengembangan layanan Command Center 3. Pelaksanaan pemasangan Perangkat Command Center 3. Pengujian Perangkat Kcommand Center 4. Pelaporan Pekerjaan
Spesifikasi Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Fisik dan Fitur Layanan Command Center 2. Spesifikasi Tenaga dengan fungsi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Project Leader b. Tenaga Ahli System Engineer c. Tenaga Ahli Command Center d. Project Officer 3. Implementasi Pekerjaan mulai dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Persiapan b. Pengadaan Barang

	c. Pelaksanaan/ Instalasi d. Pengujian e. Pelatihan f. Pendampingan g. Pelaporan
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Perangkat fisik dan penambahan fungsi/ Layanan Command Center
Mulai	2019
Selesai	2019
Estimasi Biaya investasi	Rp 2,000,000,000

No.	INF-10
Nama Kegiatan/Inisiatif	Detail Engineering Design Peningkatan Konektivitas dan Jaringan Komunikasi di Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Kajian DED diperlukan untuk menstandarisasi
Tujuan	Acuan Perluasan Konektivitas Jaringan di seluruh pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau
Manfaat yang diharapkan	Tersedianya rancangan dan acuan perluasan konektivitas jaringan di seluruh lingkungan pemerintahan kabupaten Pulang Pisau
Ruang lingkup	1. Survey 2. Analisa Kebutuhan 3. Perancangan 4. Penyusunan Dokumen Laporan
Spesifikasi Teknis	1. Spesifikasi Tenaga ahli dengan fungsi sebagai berikut: a. Project Leader b. Tenaga Ahli Jaringan c. Tenaga Ahli System Engineer d. Tenaga Ahli Security/ Keamanan Jaringan e. Surveyor f. Project Officer
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Dokumen Rancangan DED Peningkatan Konektivitas dan Jaringan Komunikasi
Mulai	2019
Selesai	2019
Estimasi Biaya investasi	Rp 300,000,000

No.	INF-11
Nama Kegiatan/Inisiatif	Pembangunan Lanjut Infrastruktur Fisik Jaringan Komunikasi Data di Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Membangun infrastruktur fisik jaringan komunikasi data yang menghubungkan seluruh OPD, Kecamatan, Desa, Fasilitas Pelayanan Publik dan Fasilitas Umum secara bertahap.
Tujuan	Terpenuhinya kebutuhan akses dan Jaringan Komunikasi Data di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau
Manfaat yang diharapkan	Perluasan layanan komunikasi data antar opd, uptd, fasilitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau
Ruang lingkup	Pembangunan Infrastruktur Fisik Jaringan Komunikasi Data
Spesifikasi Teknis	1. Perangkat Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data berdasarkan pekerjaan "Detail Engineering Design (DED) Peningkatan Konektivitas dan Jaringan Komunikasi"

	<p>2. Spesifikasi Tenaga dengan fungsi sebagai berikut sesuai dengan hasil pekerjaan "Detail Engineering Design (DED) Peningkatan Konektivitas dan Jaringan Komunikasi"</p> <p>3. Implementasi Pekerjaan mulai dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persiapan b. Pengadaan Barang c. Pelaksanaan/ Instalasi d. Pengujian e. Pelatihan f. Pendampingan g. Pelaporan
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Sesuai dengan hasil pekerjaan "Detail Engineering Design (DED) Peningkatan Konektivitas dan Jaringan Komunikasi"
Mulai	2020
Selesai	2023
Estimasi Biaya investasi	Rp 6,000,000,000

Inisiatif Organisasi dan Tata Kelola

No.	TTK-01
Nama Kegiatan/Inisiatif	Penataan Kelembagaan Organisasi TIK di Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Langkah awal untuk perubahan pengelolaan Teknologi Informasi adalah dengan melakukan Penataan Kelembagaan Teknologi Informasi yang meliputi kegiatan : 1. Pendefinisian Fungsi dan Peran (Termasuk Komite TIK) 2. Uraian Jabatan 3. Kompetensi SDM 4. Pemenuhan Sumber Daya Manusia
Tujuan	Langkah awal untuk perubahan pengelolaan Teknologi Informasi adalah implementasi model organisasi Teknologi Informasi dengan pembentukan Komite Strategi Teknologi Informasi
Manfaat yang diharapkan	-Kemudahan setiao aktivitas manajemen, standarisasi dan integrasi layanan dan inisiatif TIK lintas OPD - Kesatua paduan dalam standarisasi inisiatif TIK akan memudahkan integrasi layanan dan juga integrasi data di dalam inisiatif TIK meskipun berbeda OPD - Pengawasan, monitoring dan jaminan bagi kehandalan tata kelola, infrastruktur dan sistem menjadi lebih transparan dan terjamin
Ruang lingkup	Seluruh OPD
Spesifikasi Teknis	1. Spesifikasi Tenaga ahli dengan fungsi sebagai berikut: a. Project Leader b. Tenaga Ahli Tata Kelola Pemerintahan c. Ahli Data Government e. Surveyor f. Project Officer
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Peraturan Bupati/ Peraturan Daerah Kelembagaan Organisasi TIK
Mulai	2019
Selesai	2019
Estimasi Biaya investasi	Rp 200,000,000

No.	TTK-02
Nama Kegiatan/Inisiatif	Penyusunan dan Implementasi Kebijakan & Prosedur di Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Diperlukan penyusunan pedoman,Implementasi kebijakan dan prosedur Tata Kelola TI sehingga dipahami bersama, mudah diterapkan secara konsisten untuk terjaminnya layanan Teknologi Informasi yang baik. Detil kegiatan yang akan dilakukan adalah: 1. Perencanaan 2. Pengembangan 3. IT Operation & Maintenance (Backup, Restore, Monitoring, Capacity Management, Application Management, Infrastructure Management) 4. Layanan TI Service Desk & Incident 5. Layanan TI Problem 6. Change Management

	7. Configuration Management 8. Risiko TI 9. Keamanan Informasi 10. IT Continuity/Disaster Recovery Plan (DRP) 11. Audit TI
Tujuan	Diperlukan penyusunan pedoman, panduan dan prosedur Tata Kelola TI sehingga dipahami bersama, mudah diterapkan secara konsisten untuk terjaminnya layanan Teknologi Informasi yang baik
Manfaat yang diharapkan	Kemudahan dan kejelasan prosedur untuk persoalan terkait : 1. IT Operation & Maintenance (Backup, Restore, Monitoring, Capacity Management, Application Management, Infrastructure Management) 2. Layanan TI Service Desk & Incident 3. Layanan TI Problem 4. Change Management 5. Configuration Management 6. Risiko TI 7. Keamanan Informasi
Ruang lingkup	Penyusunan Seluruh Prosedur dan Kebijakan terkait Tata Kelola IT, Kajian terkait kebutuhan prosedur dan kebijakan ideal tata kelola TIK di pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau
Spesifikasi Teknis	1. Spesifikasi Tenaga ahli dengan fungsi sebagai berikut: a. Project Leader b. Tenaga Ahli Tata Kelola Pemerintahan c. Ahli Data Government e. Surveyor f. Project Officer
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Kebijakan dan SOP untuk : Kemudahan dan kejelasan prosedur untuk persoalan terkait : 1. IT Operation & Maintenance (Backup, Restore, Monitoring, Capacity Management, Application Management, Infrastructure Management) 2. Layanan TI Service Desk & Incident 3. Layanan TI Problem 4. Change Management 5. Configuration Management 6. Risiko TI 7. Keamanan Informasi
Mulai	2020
Selesai	2022
Estimasi Biaya investasi	Rp 600,000,000

No.	TTK-03
Nama Kegiatan/Inisiatif	Implementasi ITSM Tools (Service Desk, CMDB, dll) di Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	ITSM adalah IT Service Management yang diperlukan dalam pengelolaan operasional IT. ITSM ini terdiri dari beberapa domain proses, adapun aktifitas yang akan dilakukan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Pembentukan Service Desk 2. Pembuatan database asset dan konfigurasi IT

Tujuan	Tersedianya software aplikasi Service Desk dan SOP terkait IT Service Management sesuai framework ITIL/ISO 20000
Manfaat yang diharapkan	Dapat meningkatnya layanan TI dan cepatnya proses manajemen insiden atau masalah TI
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian kerangka framework ITSM - Identifikasi pemilihan aplikasi ITSM - Konfigurasi aplikasi ITSM - Pengujian dan monitoring aplikasi ITSM - Deployment aplikasi ITSM - Training konsep ITSM - Training aplikasi ITSM
Spesifikasi Teknis	ITIL v3 dan ISO 20000
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Ahli ITSM, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2021
Selesai	2021
Estimasi Biaya investasi	Rp 400,000,000

No.	TTK-04
Nama Kegiatan/Inisiatif	Implementasi Information Security Tools (Firewall, IPS, dll) di Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Kegiatan ini bersifat penguatan konfigurasi yang harus dilakukan dalam beberapa periode sehingga dapat memastikan sistem keamanan informasi dapat optimal
Tujuan	Keamanan Jaringan dan data pemerintahan dan untuk memperkuat keamanan jaringan guna mendukung keterpeliharaan dan keamanan data pemerintahan
Manfaat yang diharapkan	Keamanan data terjaga. Keberlangsungan dan keterpeliharaan aplikasi dan data pemerintahan ketika terbebas dari serangan cyber
Ruang lingkup	Implementasi seluruh IST yang dibutuhkan di lingkungan pemerintahan baik fisik maupun non fisik
Spesifikasi Teknis	Konfigurasi Host, Jaringan, Policy, Directive Rule, Korelasi antar Detektor, Konfigurasi Perangkat IDP dan Firewall dan Security Management System
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Business Analyst, System Analyst, SW Developer, SW Tester, DB Specialist, System Engineer, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2020
Selesai	2022

Estimasi Biaya investasi	Rp	600,000,000
--------------------------	----	-------------

No.	TTK-05
Nama Kegiatan/Inisiatif	Pembenahan dan Peningkatan Data Governance di Kabupaten Pulang Pisau
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Melakukan proses manajemen dalam tata kelola data Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau. Dalam hal ini termasuk di dalamnya kegiatan tata kelola data (Data Governance), Data Quality Management , Meta Data Management, arsitektur data dll,
Tujuan	Untuk menstandarisasi dan menjamin kualitas data di lingkungan pemerintahan, sehingga memudahkan proses integrasi data lintas OPD. Memudahkan proses rekonsiliasi permasalahan data Memudahkan proses cleansing data ketika dibutuhkan nantinya
Manfaat yang diharapkan	Kemudahan proses integrasi data lintas OPD. Kemudahan proses rekonsiliasi permasalahan data Kemudahan proses cleansing data ketika dibutuhkan nantinya
Ruang lingkup	Perancangan Tata Kelola Data Sleuruh Pemerintahan Daerah Perancangan dan Standarisasi Data Quality Pemerintahan Daerah Perancangan standar Metadata Penyusunan prosedur, aturan dalam rekonsiliasi data Penyusunan Cultural Awareness Programme
Spesifikasi Teknis	1. Spesifikasi Tenaga ahli dengan fungsi sebagai berikut: a. Project Leader b. Tenaga Ahli Tata Kelola Pemerintahan c. Ahli Data Government d. Ahli Sistem Informasi e. Ahli Basis Data f. Ahli Informatika g. Surveyor h. Project Officer
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Project Leader, Project Manager, Business Analyst, System Analyst, Ahli Basis Data, Ahli Tata Kelola Pemerintahan, Ahli Data Governance, Project Administrator, Surveyor Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2019
Selesai	2020
Estimasi Biaya investasi	Rp 400,000,000

No.	TTK-06
Nama Kegiatan/Inisiatif	Pengembangan Kompetensi SDM
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Pengembangan/ Peningkatan Kompetensi SDM untuk menunjang kebutuhan SDM TIK di seluruh lingkungan kabupaten Pulang Pisau, yang meliputi kegiatan semacam pelatihan, sertifikasi, workshop dll.
Tujuan	Dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi

	dengan standar kinerja yang telah ditetapkan
Manfaat yang diharapkan	Tersedianya SDM TIK yang sesuai dengan kebutuhan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kepentingan pengembangan - Merumuskan acara pengembangan - Monitoring & evaluasi
Spesifikasi Teknis	Sertifikasi (SKKNI)
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Ahli Jaringan, Ahli Software Developer, Ahli SDM, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2019
Selesai	2021
Estimasi Biaya investasi	Rp 300,000,000

No.	TTK-07
Nama Kegiatan/Inisiatif	Penyusunan Key Performance Indikator
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Penyusunan Key Performance Indikator ini ditujukan untuk menetapkan target kinerja dari pengelolaan IT sehingga memberikan sasaran jelas dalam setiap pencapaian suatu proses atau fungsi
Tujuan	Mengetahui sejauh mana perusahaan telah berlangsung efektif dan efisien dan sejauh mana mereka telah mencapai visi misinya
Manfaat yang diharapkan	Adanya tool atau alat untuk mengevaluasi performa organisasi dan karyawan secara berkala yang efektif dan efisien
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan tujuan yang hendak dicapai. - Memiliki bisnis proses yang telah terdefinisi dengan jelas. - Menetapkan ukuran kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. - Memonitor setiap kondisi yang terjadi serta melakukan perubahan yang diperlukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.
Spesifikasi Teknis	Key Performance Indicators
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Ahli SDM, Ahli Keuangan Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan
Mulai	2019
Selesai	2019
Estimasi Biaya investasi	Rp 50,000,000

No.	TTK-08
Nama Kegiatan/Inisiatif	Pengembangan dan Implementasi ISO 27001
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Kegiatan ini diperlukan untuk menetapkan proses sistem keamanan informasi mempunyai standar internasional yaitu ISO 27001
Tujuan	Memberikan gambaran implementasi sistem manajemen keamanan

	informasi berstandar internasional kepada perusahaan, organisasi nirlaba, instansi atau publik agar dapat mempelajari dan mencobamengimplementasikannya di lingkungan sendiri dan melakukan kegiatan audit terhadap semua aspek terkait, seperti: kondisi jaringan komputer lokal, policy, manajemen SDM, organisasi keamanan informasi, dan lain-lain.
Manfaat yang diharapkan	Perusahaan dapat menghindari kemungkinan besar ancaman keamanan seperti tindak perusakan atau terorisme, kebakaran, pencurian, hacking, dan kesalahan penggunaan informasi
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Plan - Do - Check - Act
Spesifikasi Teknis	ISO 27001:2013 – SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi), ISMS (Information Security Management System)
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil: Tenaga Ahli Project Manager, Konsultan ISO 27001, Auditor, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan
Mulai	2019
Selesai	2020
Estimasi Biaya investasi	Rp 600,000,000

No.	TTK-9
Nama Kegiatan/Inisiatif	Pengembangan dan Implementasi ISO 20000-1
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Kesandian
Deskripsi Singkat	Kegiatan ini diperlukan untuk menetapkan proses pengelolaan IT mempunyai standar internasional yaitu ISO 20000
Tujuan	Memungkinkan semua organisasi yang berpondasi pada teknologi informasi mampu menerapkan praktik terbaik untuk merencanakan, menetapkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mereview, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen layanan TI yang ditetapkan secara internasional.
Manfaat yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan dalam insiden dan manajemen insiden ditingkatkan - Pengurangan waktu respon dan gangguan layanan TI - Perbaikan pengelolaan biaya mengarah ke penghematan keuangan - Sebuah budaya perbaikan terus-menerus - Melindungi perusahaan, aset, pemegang saham dan direksi - Peningkatan kepuasan pelanggan dari pelanggan internal dan / atau eksternal
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Plan - Do - Check - Act
Spesifikasi Teknis	ISO 20000-1:2011 (IT Service Management)
Bill of Quantities (BoQ)/RAB	Komponen biaya (RAB) terdiri dari: Personil:

	Tenaga Ahli Project Manager, Konsultan ISO 20000-1, Auditor, Trainer/Implementator, Project Administrator Non Personil: ATK, Komunikasi dan Internet, Sewa Komputer, Pelaporan, Pelatihan dan Pendampingan	
Mulai	2021	
Selesai	2022	
Estimasi Biaya investasi	Rp	600,000,000